

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)

2022



Air Terjun
Matabuntu



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang capaian kinerja, baik makro maupun capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna baik sistematika penulisan maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan ini di masa akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malili, 29 Maret 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	
1.1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	14
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	109

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro	140
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	140
2.1.2. Angka Kemiskinan	142
2.1.3. Angka Pengangguran	143
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	145
2.1.5. Pendapatan Perkapita	152
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	153
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	156
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Hasil	156
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	214
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	216

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	310
3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	310
3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	312
3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat oleh Pemda	312
3.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi oleh Pemda	320
3.3.3. Permasalahan dan Kendala	327
3.3.4. Saran dan Tindak Lanjut.....	327

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Bidang Urusan Pendidikan	332
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	332
4.1.2. Target pencapaian penerapan SPM	332
4.1.3. Anggaran	332
4.1.4. Dukungan Personil	333
4.1.5. Hasil Capaian.....	334
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	334
4.2. Bidang Urusan Kesehatan	335
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	335
4.2.2. Target pencapaian penerapan SPM	336



4.2.3. Anggaran	336
4.2.4. Dukungan Personil	337
4.2.5. Hasil Capaian	338
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	339
4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	341
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	341
4.3.2. Target pencapaian penerapan SPM	341
4.3.3. Anggaran	341
4.3.4. Dukungan Personil	343
4.3.5. Hasil Capaian	343
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	343
4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	344
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	344
4.4.2. Target pencapaian penerapan SPM	344
4.4.3. Alokasi Anggaran	344
4.4.4. Dukungan Personil	345
4.4.5. Hasil Capaian	345
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	345
4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	346
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	346
4.5.2. Target pencapaian penerapan SPM	346
4.5.3. Alokasi Anggaran	347
4.5.4. Dukungan Personil	347
4.5.5. Hasil Capaian	348
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	349
4.6. Bidang Urusan Sosial	351
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	351
4.6.2. Target pencapaian penerapan SPM	352
4.6.3. Alokasi Anggaran	352
4.6.4. Dukungan Personil	352
4.6.5. Hasil Capaian	353
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	354
BAB V PENUTUP	355



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi	2
TABEL 1.2	Panjang Sungai Utama di Kabupaten Luwu Timur	3
TABEL 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur.....	4
TABEL 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Kab.Luwu Timur Tahun 2017-2022.....	5
TABEL 1.5	Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Tahun 2022.....	5
TABEL 1.6	Jumlah OPD Kabupaten Luwu Timur 2022.....	6
TABEL 1.7	Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur 2022	7
TABEL 1.8	Jumlah PNS Berdasarkan OPD Kab.Lutim Th 2020-2022	8
TABEL 1.9	Klasifikasi PNS Berdasarkan Usia & Jenis Kelamin Th 2020-2022	12
TABEL 1.10	Jumlah PPPK Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Kab Lutim Th 2021-2022	12
TABEL 1.11	Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2022	13
TABEL 1.12	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022	14
TABEL 1.13	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022	16
TABEL 1.14	Anggaran dan Realisasi Operasi Tahun Anggaran 2022	17
TABEL 1.15	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022	18
TABEL 1.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022	19
TABEL 1.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022	19
TABEL 1.18	Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022	20
TABEL 1.19	Penjelasan Visi RPJMD RPJMD Kab Luwu Timur 2021-2026	37
TABEL 1.20	Keterkaitan Pokok Visi dan Misi serta Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	40
TABEL 2.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	142
TABEL 2.2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yg bekerja selama seminggu Yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin Di kabupaten luwu timur tahun 2022	144
TABEL 2.3	Data Pengangguran dan Pencari Kerja di Kab Luwu Timur 2022.....	144
TABEL 2.4	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas termasuk Angkatan Kerja, TPAK dan TPT di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022	145
TABEL 2.5	Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Luwu Timur 2018-2022.....	147
TABEL 2.6	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022	149
TABEL 2.7	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kab. Luwu Timur Tahun 2018 – 2022	150
TABEL 2.8	Laju Pertumbuhan PDRB Kab Luwu Timur atas Harga Konstan 2020 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	151
TABEL 2.9	PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2022	153



TABEL 2.10	Rincian Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	155
TABEL 2.11	Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro Kab. Luwu Timur Tahun 2022	155
TABEL 2.12	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Pendidikan	156
TABEL 2.13	Capaian Kinerja Kunci Hasil Pendidikan	159
TABEL 2.14	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Kesehatan	159
TABEL 2.15	Capaian Kinerja Kunci Hasil Kesehatan.....	161
TABEL 2.16	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pekerjaan Umum	162
TABEL 2.17	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pekerjaan Umum	170
TABEL 2.18	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Urusan Perumahan Rakyat.....	171
TABEL 2.19	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Urusan Perumahan Rakyat	173
TABEL 2.20	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	173
TABEL 2.21	Capaian Kinerja Kunci Hasil Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	177
TABEL 2.22	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Sosial	179
TABEL 2.23	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Sosial	181
TABEL 2.24	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Tenaga Kerja	181
TABEL 2.25	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Tenaga Kerja	184
TABEL 2.26	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	185
TABEL 2.27	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	186
TABEL 2.28	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pangan	186
TABEL 2.29	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pangan	188
TABEL 2.30	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pertanahan	188
TABEL 2.31	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pertanahan	189
TABEL 2.32	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Lingkungan Hidup	189
TABEL 2.33	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Lingkungan Hidup	191
TABEL 2.34	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	192
TABEL 2.35	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	192
TABEL 2.36	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	193
TABEL 2.37	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).....	193
TABEL 2.38	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Statistik	194
TABEL 2.39	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Statistik	195
TABEL 2.40	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	195
TABEL 2.41	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	196



TABEL 2.42	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Komunikasi dan Informatika	196
TABEL 2.43	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Komunikasi dan Informatika	198
TABEL 2.44	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perhubungan	198
TABEL 2.45	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Perhubungan	199
TABEL 2.46	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	199
TABEL 2.47	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	199
TABEL 2.48	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	199
TABEL 2.49	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	201
TABEL 2.50	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Penanaman Modal	201
TABEL 2.51	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	202
TABEL 2.52	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Persandian	202
TABEL 2.53	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Persandian	203
TABEL 2.54	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kebudayaan	203
TABEL 2.55	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Kebudayaan	204
TABEL 2.56	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perpustakaan	204
TABEL 2.57	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Perpustakaan	205
TABEL 2.58	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kearsipan	205
TABEL 2.59	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Kearsipan	206
TABEL 2.60	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kelautan dan Perikanan.....	207
TABEL 2.61	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Kelautan dan Perikanan	207
TABEL 2.62	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pariwisata	207
TABEL 2.63	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pariwisata	208
TABEL 2.64	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pertanian	208
TABEL 2.65	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pertanian	209
TABEL 2.66	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perdagangan	209
TABEL 2.67	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Perdagangan	211
TABEL 2.68	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perindustrian	211
TABEL 2.69	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Perindustrian	212
TABEL 2.70	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Transmigrasi	213
TABEL 2.71	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	213
TABEL 2.72	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	213
TABEL 2.73.	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kehutanan	214
TABEL 2.74	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	214
TABEL 2.75	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022	217
TABEL 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	



	Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi oleh Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur 2022	313
TABEL 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Pertanian Oleh Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur 2022	316
TABEL 3.3	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur 2022	321
TABEL 3.4	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur 2022	323
TABEL 3.6	Uraian Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Yang dilaksanakan oleh Kab. Luwu Timur 2022	327
TABEL 4.1	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan 2022	332
TABEL 4.2	Dukungan Personil Bidang Urusan Pendidikan	333
TABEL 4.3	Realisasi target SPM Urusan Pendidikan	334
TABEL 4.4	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan 2022	337
TABEL 4.5	Dukungan Personil Urusan Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2022	337
TABEL 4.6	Realisasi target capaian SPM Urusan Bidang Kesehatan	338
TABEL 4.7	Alokasi anggaran Urusan Pekerjaan Umum	341
TABEL 4.8	Dukungan Personil Urusan Pekerjaan umum Kab.Luwu Timur Tahun 2022	343
TABEL 4.9	Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum	343
TABEL 4.10	Alokasi anggaran Urusan Perumahan Rakyat	344
TABEL 4.11	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat	345
TABEL 4.12	Realisasi Target SPM Urusan Perumahan Rakyat	345
TABEL 4.13	Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	347
TABEL 4.14	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	347
TABEL 4.15	Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	348
TABEL 4.16	Alokasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2022	352
TABEL 4.17	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial	353
TABEL 4.18	Realisasi Target SPM Urusan Sosial	353



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1	Perkembangan IPM Kab Luwu Timur Tahun 2018 – 2022	141
GRAFIK 2.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kab. Luwu Timur Tahun 2017-2022	143
GRAFIK 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu Timur dan Prov. Sulsel Tahun 2018-2022.....	147
GRAFIK 2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur 2018-2022	148
GRAFIK 2.5	Gini Rasio Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2022	155



DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

GAMBAR 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur	3
DIAGRAM 2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Luwu Timur, 2018-2022.....	153



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Keberadaan Kabupaten Luwu Timur tidak dapat dilepaskan dari Sejarah Tanah Luwu yang kemunculannya berawal jauh sebelum masa Pemerintahan Hindiu Belanda menguasai nusantara. Sebelumnya Luwu telah menjadi sebuah kerajaan yang memiliki wilayah hingga ke daerah Kolaka (Propinsi Sulawesi Tenggara) dan Poso (Propinsi Sulawesi Tengah). Hal sejarah Luwu ini dikenal pula dengan nama Tanah Luwu yang dihubungkan dengan nama La Galigo dan Sawerigading. Menyusul setelah Belanda berkuasa penuh di Luwu, maka wilayah Kerajaan Luwu mulai diperkecil, Kemudian dibentuk satu afdeling di Luwu yang dibagi menjadi 5 (lima) *Onder Afdeling* salah satunya *Onder Afdeling* Malili yang ibukotanya terletak di Malili.

Pada tahun 1959 di tetapkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (L.N. 1959 Nomor 74 TLN Nomor 1822) yang mengamanatkan bahwa semua Daerah Eks *Onder-Afdeling* di Sulawesi Selatan, termasuk di antaranya bekas Kewedanaan Malili akan ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten. Namun pada realitas, ternyata Daerah Ex *Onder Afdeling* yakni Malili dan 2 *Onder-Afdeling* lainnya belum dapat diwujudkan pembentukannya, terutama disebabkan karena alasan situasi keamanan yang belum memungkinkan pada waktu itu.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang telah memberikan ruang kebebasan lebih luas terhadap `wacana pemekaran Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal ini dimanfaatkan sebagai momentum yang kuat dalam melanjutkan perjuangan aspirasi Masyarakat Ex Kewedanaan Malili untuk membentuk sebuah Kabupaten.

Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.

Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Propinsi



Sulawesi Selatan dengan batas sebelah utara dan sebelah timur adalah Propinsi Sulawesi Tengah. Batas sebelah selatan adalah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah barat kabupaten ini adalah Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana. Penduduk Kabupaten Luwu Timur bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai jenis agama, suku dan ras. Jenis suku yang ada di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari suku Bugis, Jawa, Bali, Lombok, Pamona, Padoe, Makassar dan Toraja. Semua suku tersebut terdiri dari penganut agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha.

b. Data Geografis Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara $2^{\circ}03'00''$ – $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 Km² atau 11,14 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Luas Wilayah tiap Kecamatan sebagai berikut :

Tabel.1.1
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi.

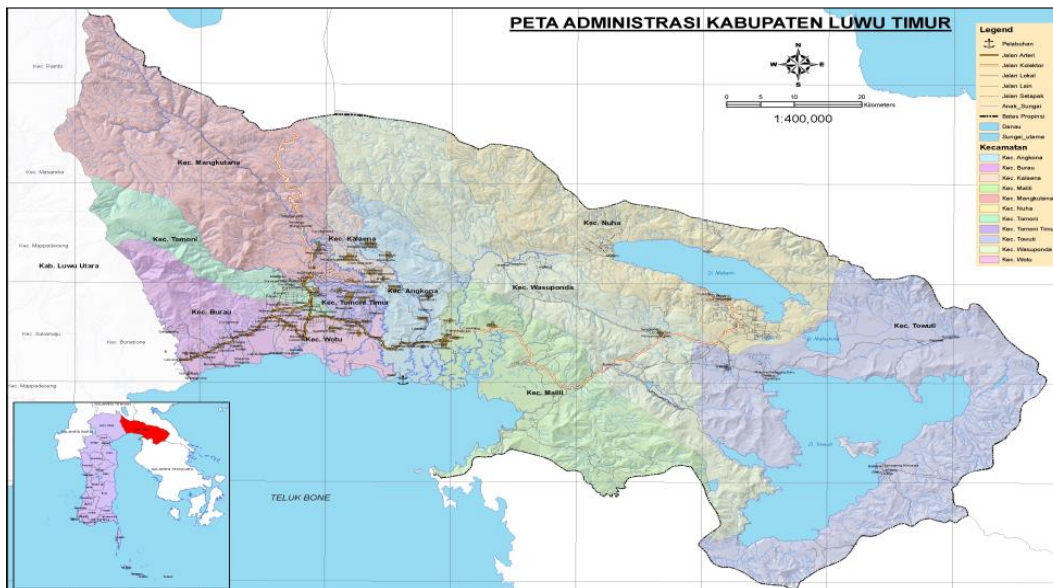
Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Kelurahan	Jumlah Desa
Burau	256,23	3,69		18
Wotu	130,52	1,88		17
Tomoni	230,09	3,31	1	11
Tomoni Timur	921,2	13,26		8
Angkona	147,24	2,12		10
Malili	921,2	13,26	1	16
Towuti	1.820,48	26,21		18
Nuha	808,27	11,64	1	5
Wasuponda	1.244,00	17,91		6
Mangkutana	1.300,96	18,73		11
Kalaena	41,98	0,60		7
Jumlah	6.944,88	112,63	3	125

Sumber : Bagian Pemerintahan Pemda Luwu Timur 2022

Kabupaten Luwu Timur dengan Ibukota Malili memiliki batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Timur : Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone.
- Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 1.1



Terdapat 14 sungai yang mengalir di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, 9 (sembilan) diantaranya adalah sungai utama. Sungai terpanjang adalah sungai Kalaena dengan panjang 85 Km. Sedangkan sungai terpendek adalah sungai Bambalu dengan panjang 15 Km. Panjang sungai utama kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

Tabel.1.2

NAMA SUNGAI	DAERAH ALIRAN	Panjang Sungai (Km)
Larona	Kec. Nuha	60
Ussu	Kec. Nuha, Kec. Malili	30
Cerekang	Kec. Nuha, Kec. Malili	50
Angkona	Kec. Nuha, Kec. Malili, Kec. Angkona	48
Kalaena	Kec. Mangkutana	85
Powosoi	Kec. Mangkutana, Kec. Wotu	18
Senggeni	Kec. Mangkutana, Kec. Wotu	24
Bambalu	Kec. Wotu	15
Pongkeru	Kec. Malili	33,5

Sumber: Bps Kab Luwu Timur (Profil Kab Luwu Timur 2022)

Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut adalah Danau Matano (dengan luas 245,70 km²), Danau Mahalona (25 km²), Danau Towuti (585 km²), Danau Tapparang Masapi (2,43 km²) dan Danau Lantoa (1,72 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha, sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.



c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Luwu Timur bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai jenis agama, suku dan ras. Jenis suku yang ada di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari suku Bugis, Jawa, Bali, Lombok, Pamona, Padoe, Makassar dan Toraja. Semua suku tersebut terdiri dari penganut agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Walaupun struktur masyarakat cukup heterogen dan multi etnis dengan wilayah yang relatif luas dan berbatasan dengan dua wilayah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tingkat Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2022-2023 (kondisi pertengahan tahun/Juni) sebanyak 305.521 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106,02. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Luwu Timur tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebanyak 5.061 atau sebesar 1,67 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 mencapai 43,99 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 312,94 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Mangkutana sebesar 17,28 jiwa/km².

Jumlah penduduk menurut kecamatan dan terhadap rasio besaran berdasarkan kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

No	KECAMATAN	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Burau	34.529	0,65	11,30	134.76
2	Wotu	34.101	1,32	11,16	261.27
3	Tomoni	26.986	1,28	8,83	117.28
4	Tomoni Timur	13.741	1,02	4,50	312.94
5	Angkona	25.516	1,07	8,35	173.30
6	Malili	44.641	2,29	14,61	48.46
7	Towuti	45.310	3,96	14,83	24.89
8	Nuha	23.844	1,14	7,80	29.50
9	Wasuponda	22.157	1,45	7,25	17.81
10	Mangkutana	22.485	0,76	7,36	17.28
11	Kalaena	12.211	0,93	4,00	290.88
KAB. LUWU TIMUR		305.521	1,67	100.00	43,99

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2022 (BPS Kab.Luwu Timur)



Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2022

KELOMPOK UMUR	Jumlah Penduduk					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0-4	24.417	25.037	25.568	29.173	29.566	30.016
5-9	29.848	29.907	29.793	25.346	25.172	25.401
10-14	31.065	30.850	30.454	28.467	27.988	27.411
15-19	29.833	30.223	30.681	27.119	27.298	27.602
20-24	25.846	26.058	27.005	25.847	26.013	26.263
25-29	23.968	23.901	22.668	24.817	25.042	25.357
30-34	24.802	24.586	22.473	23.523	23.893	24.349
35-39	25.206	25.541	24.480	23.958	24.307	24.779
40-44	21.250	21.511	22.461	22.502	22.874	23.292
45-49	17.621	18.076	18.452	18.134	18.601	19.150
50-54	12.058	12.442	13.887	13.782	14.191	14.654
55-59	9.652	9.742	9.940	10.827	11.237	11.685
60-64	7.148	7.298	7.687	8.247	8.629	9.070
65+	5.585	5.764	14.861	6.497	6.791	7.117
70-74	3.331	3.438	-	4.174	4.381	4.625
75+	4.274	4.657	-	4.328	4.528	4.750
Jumlah	295.904	273.994	300.410	296.741	300.511	305.521

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam angka 2022 (hasil sensus penduduk)

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara Geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara 2°03'00" – 3°03'25" Lintang Selatan dan 119°28'56"- 121°47'27' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 Km² atau 11,14 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 125 Desa. dan 3 Kelurahan, Kecamatan Towuti merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Dan Kecamatan terkecil yakni Kecamatan Kalaena dengan luas 41,98 km². Adapun Luas Wilayah tiap Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Tahun 2022

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Kelurahan	Jumlah Desa
Burau	Burau	256,23	3,69	-	18
Wotu	Bawalipu	130,52	1,88	-	17
Tomoni	Mandiri	230,09	3,31	1	11
Tomoni Timur	Kertoraharjo	921,2	13,26	-	8
Angkona	Solo	147,24	2,12	-	10
Malili	Puncak Indah	921,2	13,26	1	16
Towuti	Langkea Raya	1.820,48	26,21	-	18
Nuha	Sorowako	808,27	11,64	1	5
Wasuponda	Ledu ledu	1.244,00	17,91	-	6



Mangkutana	Wonorejo	1.300,96	18,73	-	11
Kalaena	Kalaena kiri	41,98	0,60	-	7
Jumlah		6.944,88	112,63	3	125

Sumber : Bagian Pemerintahan Pemda Luwu Timur Tahun 2022.

e. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah

Pada Tahun 2017 terjadi perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di tindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, Dinas sebanyak 21, Badan 6, Kecamatan 11 kelurahan 3 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Jumlah OPD Kabupaten Luwu Timur 2022

No	Unit Kerja
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat Dprd
3	Inspektorat
4	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pendapatan Daerah
7	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
14	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
15	Dinas Kesehatan
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Dinas Lingkungan Hidup
18	Dinas Kelautan
19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
20	Dinas Perhubungan
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
23	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
24	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
26	Satuan Polisi Pamong Praja
27	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
30	Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo
31	Kec. Burau
32	Kec. Wotu
33	Kec. Tomoni
34	Kec. Tomoni Timur
35	Kec. Mangkutana



36	Kec. Kalaena
37	Kec. Angkona
38	Kec. Malili
39	Kec. Wasuponda
40	Kec. Towuti
41	Kec. Nuha
42	Kelurahan Magani
43	Kelurahan Tomoni
44	Kelurahan Malili

Sumber : Bagian organisasi Setkab Luwu Timur

Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2022 dari golongan I sampai IV sebanyak 3.911, dengan laki-laki sebanyak 1.414 perempuan 2.495 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur 2022

Golongan	I	7
	II	382
	III	2.653
	IV	869
Jenis Kelamin	Laki-laki	1.414
	Perempuan	2.497
Eselon	II-A	1
	II-B	30
	III-A	53
	III-B	104
	IV-A	172
	IV-B	38
	Jumlah Eselon	398
	Non eselon	3.513
Pendidikan	SD	5
	SLTP	11
	SLTA	343
	D1-DIII	676
	S1	2.715
	S2	160
	S3	1
Fungsional Tertentu	Ahli Utama	1
	Ahli Madya	708
	Ahli Pertama	667
	Ahli Muda	1029
	Penyelia	171
	Mahir	195
	Pelaksana	147
	Pelaksana Pemula	0

Sumber : BKPSDM Luwu Timur, 2022

PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ini tersebar di beberapa unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah PNS Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2022 yang tersebar di beberapa OPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.8
Jumlah PNS Berdasarkan OPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		
		2020	2021	2022
1	SEKRETARIAT DAERAH	78	81	82
2	SEKRETARIAT DPRD	25	22	21
3	INSPEKTORAT	46	44	45
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	56	50	56
5	DINAS KESEHATAN	58	69	73
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	87	85	87
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	23	19	18
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	44	40	39
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	9	14
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23	20	19
11	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	26	27	25
12	DINAS PERIKANAN	27	30	24
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26	22	25
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20	20	18
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21	17	16
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17	17	19
17	DINAS PERHUBUNGAN	24	27	28
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	19	21	21
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	22	22	23
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18	21	19
21	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	24	23	21



22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	24	30	28
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	196	193	196
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24	26	26
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	44	34	27
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	11	24
27	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	27	28	27
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15	15	11
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9	11	12
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO	213	223	228
31	KEC. BURAU	24	22	23
32	KEC. WOTU	23	22	21
33	KEC. TOMONI	18	19	17
34	KEC. MANGKUTANA	22	18	18
35	KEC. TOMONI TIMUR	16	15	15
36	KEC. KALAENA	14	16	17
37	KEC. ANGKONA	18	17	19
38	KEC. MALILI	17	16	14
39	KEC. WASUPONDA	16	16	16
40	KEC. NUHA	15	16	15
41	KEC. TOWUTI	25	27	25
42	KEL. MAGANI	8	7	8
43	KEL. MALILI	6	5	7
44	KEL. TOMONI	8	10	11
45	PUSKESMAS BURAU	56	43	40
46	PUSKESMAS WOTU	59	55	60
47	PUSKESMAS TOMONI	55	60	57
48	PUSKESMAS MANGKUTANA	57	58	57
49	PUSKESMAS TOMONI TIMUR	40	43	42
50	PUSKESMAS KALAENA	37	37	38
51	PUSKESMAS ANGKONA	47	41	40
52	PUSKESMAS LAKAWALI KEC. MALILI	24	29	37
53	PUSKESMAS MALILI	72	74	76
54	PUSKESMAS LAMPPIA KEC. MALILI	36	35	33
55	PUSKESMAS WASUPONDA	44	47	48
56	PUSKESMAS PARUMPANAI KEC. WASUPONDA	12	17	19



57	PUSKESMAS NUHA	64	62	62
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15	15	11
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9	11	12
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO	213	223	228
31	KEC. BURAU	24	22	23
32	KEC. WOTU	23	22	21
33	KEC. TOMONI	18	19	17
34	KEC. MANGKUTANA	22	18	18
35	KEC. TOMONI TIMUR	16	15	15
36	KEC. KALAENA	14	16	17
37	KEC. ANGKONA	18	17	19
38	KEC. MALILI	17	16	14
39	KEC. WASUPONDA	16	16	16
40	KEC. NUHA	15	16	15
41	KEC. TOWUTI	25	27	25
42	KEL. MAGANI	8	7	8
43	KEL. MALILI	6	5	7
44	KEL. TOMONI	8	10	11
45	PUSKESMAS BURAU	56	43	40
46	PUSKESMAS WOTU	59	55	60
47	PUSKESMAS TOMONI	55	60	57
48	PUSKESMAS MANGKUTANA	57	58	57
49	PUSKESMAS TOMONI TIMUR	40	43	42
50	PUSKESMAS KALAENA	37	37	38
51	PUSKESMAS ANGKONA	47	41	40
52	PUSKESMAS LAKAWALI KEC. MALILI	24	29	37
53	PUSKESMAS MALILI	72	74	76
54	PUSKESMAS LAMPPIA KEC. MALILI	36	35	33
55	PUSKESMAS WASUPONDA	44	47	48
56	PUSKESMAS PARUMPANAI KEC. WASUPONDA	12	17	19
57	PUSKESMAS NUHA	64	62	62
37	KEC. ANGKONA	18	17	19
38	KEC. MALILI	17	16	14
39	KEC. WASUPONDA	16	16	16
40	KEC. NUHA	15	16	15
41	KEC. TOWUTI	25	27	25
42	KEL. MAGANI	8	7	8
43	KEL. MALILI	6	5	7
44	KEL. TOMONI	8	10	11
45	PUSKESMAS BURAU	56	43	40
46	PUSKESMAS WOTU	59	55	60
47	PUSKESMAS TOMONI	55	60	57



48	PUSKESMAS MANGKUTANA	57	58	57
49	PUSKESMAS TOMONI TIMUR	40	43	42
50	PUSKESMAS KALAENA	37	37	38
51	PUSKESMAS ANGKONA	47	41	40
52	PUSKESMAS LAKAWALI KEC. MALILI	24	29	37
53	PUSKESMAS MALILI	72	74	76
54	PUSKESMAS LAMPIA KEC. MALILI	36	35	33
55	PUSKESMAS WASUPONDA	44	47	48
56	PUSKESMAS PARUMPANAI KEC. WASUPONDA	12	17	19
57	PUSKESMAS NUHA	64	62	62
58	PUSKESMAS WAWONDULA KEC. TOWUTI	51	53	55
59	PUSKESMAS TIMAMPU KEC. TOWUTI	32	31	32
60	PUSKESMAS MAHALONA KEC. TOWUTI	23	21	22
61	PUSKESMAS BANTILANG KEC. TOWUTI	21	21	24
62	PUSKESMAS BONE PUTE	0	24	33
63	TAMAN KANAK KANAK (TK)	48	47	47
64	SEKOLAH DASAR (SD)	1093	1095	1061
65	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	550	559	530
58	PUSKESMAS WAWONDULA KEC. TOWUTI	51	53	55
59	PUSKESMAS TIMAMPU KEC. TOWUTI	32	31	32
60	PUSKESMAS MAHALONA KEC. TOWUTI	23	21	22
61	PUSKESMAS BANTILANG KEC. TOWUTI	21	21	24
62	PUSKESMAS BONE PUTE	0	24	33
63	TAMAN KANAK KANAK (TK)	48	47	47
64	SEKOLAH DASAR (SD)	1093	1095	1061
65	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	550	559	530
JUMLAH		3887	3935	3911

Klasifikasi PNS menurut usia berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, memperlihatkan bahwa usia 36 – 40 tahun merupakan usia yang paling banyak dari jumlah seluruh PNS yaitu mencapai 864 orang (22.1%). PNS dengan usia 20 – 25 sebanyak 362 orang (9,26%) merupakan PNS dengan usia yang paling sedikit. Klasifikasi PNS berdasarkan usia dan jenis kelamin tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini;



Tabel 1.9
Klasifikasi PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2022

No	Usia	Tahun								
		2020			2021			2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	20 - 25	3	1	4	5	9	14	7	18	25
2	26 - 30	30	75	105	45	109	154	55	124	179
3	31 - 35	85	263	348	94	291	385	98	301	399
4	36 - 40	220	632	852	222	640	862	223	641	864
5	41 - 45	281	276	828	288	542	830	289	542	831
6	46 - 50	281	353	634	281	353	634	279	352	631
7	51 - 55	282	347	629	280	343	623	277	343	620
8	56 - 60	236	206	442	218	203	421	186	176	362
9	61 - 65	28	17	45	9	3	12	0	0	0
Jumlah Total				3887			3935			3911

Sumber: BPKSDM Luwu Timur Tahun 2022

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, usia pensiun PNS bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan adalah berusia 58 tahun. usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya serta usia 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama. Dari tabel 1.9 tersebut diatas, terdapat pengurangan jumlah pegawai pada tahun 2022 sebanyak 24 orang karena sudah masuk masa pensiun.

Jumlah PPPK

ASN Kabupaten Luwu Timur dengan status PPPK sampai dengan tahun 2022 berjumlah 595 orang. Bertambah 482 orang jika dibandingkan pada tahun 2021 yang berjumlah 113 orang. Jumlah PPPK berdasarkan kualifikasi jabatan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1.10
Jumlah PPPK Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2022

No	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Se-derajat		SLTP/ Se-derajat		SD/ Se-derajat				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P
Tahun 2021																
1	Kesehatan					1	1							1	1	2
2	Guru				22	85								22	85	107
3	Teknis				3			1						3	1	4
Jumlah		0	0	25	85	1	1	0	1	0	0	0	0	26	87	113
Tahun 2022																
1	Guru			93	389									93	389	482
Jumlah		0	0	93	389	0	0	0	0	0	0	0	0	93	389	482

Sumber: BPKSDM Luwu Timur Tahun 2022



Pada tahun 2021, pengangkatan PPPK dhususkan menerima 3 jenis kualifikasi yaitu bidang kesehatan sebanyak 2 orang, guru sebanyak 107 orang dan teknis sebanyak 4 orang. Sementara pada tahun 2022 formasi penerimaan hanya terbuka untuk kualifikasi guru sebanyak 482 orang.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan target Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1,616,869,357,811,00 dan terealisasi sebesar Rp1.732.654.721.069,29 atau 107,16% yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah yang memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan daerah setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun rincian PAD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.11
Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	325,302,193,230	341.258.357.609,43	104,91
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	189,380,000,000	202.810.479.953,20	107,09
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,833,681,025	3,181,939,987,00	65,83
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23,740,807,304	23,740,807,304	100,00
4.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	107,347,704,901	111,525,130,365,23	103,89

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Dari tabel di atas terlihat bahwa total Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 sebesar Rp. 325,302,193,230,00 dengan realisasi sebesar Rp 341.258.357.609,43 atau 104,91% yang terdiri dari Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah dari anggaran Rp.189,380,000,000 dengan realisasi sebesar Rp 202.810.479.953,20 atau 107,09%, realisasi pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah diperoleh pada Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Daerah dari Anggaran Rp.4.833.681.025,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.181.939.987,00 atau 65,83%, Restribusi Daerah tidak tercapai optimal antara lain disebabkan



oleh tidak tercapainya target Restribusi Jasa umum khususnya pada target restribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dianggarkan sebesar Rp.23.740.807.304,00 terealisasi sebesar Rp.23.740.807.304,00 atau 100,00%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan sebesar Rp.107.347.704.901,00 terealisasi sebesar Rp 111,525,130,365,23 atau 103,89%,. Capaian realisasi yang lebih ini antara lain diperoleh dari pendapatan BLUD. Berdasarkan nilai realisasi tersebut diatas, maka kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total Penerimaan PAD yaitu, persentase tertinggi terdapat pada Pajak Daerah sebesar 59,43%, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 32,68%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 6,96% dan Hasil Retribusi Daerah sebesar 0,93% dari realisasi anggaran pendapatan asli daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Dana Transfer dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.2	Pendapatan Transfer	1,223,583,544,713.00	1,330,514,747,320,86	108,74
4.2.1	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1,021,000,629,629.00	1,108,810,602,294,00	108,6
4.2.1.1	Dana perimbangan	917,997,542,629.00	1,005,807,515,,294,00	109,57
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	197,842,828,926.00	309,861,621,281,00	156,62



4.2.1.1.2	Umum-Dana Dana Transfer Alokasi Umum (DAU)	502,553,133,000.00	501,023,438,250,00	99,7
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92,572,224,703.00	91,880.968,418,00	99,25
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	125,029,356,000.00	103,167,208,345,00	82,51
4.2.1.1.5	Dana Desa	103,003,087,000.00	103,003,087,000.00	100
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	202.582.915.084	221,704,145,026,00	109,44
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	187.835.890.084	206,876,727,007,00	110,14
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	14,747,025,000.00	14,827,418,019,86	100,55

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Dari tabel di atas Total Anggaran Dana Transfer Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1,223,583,544,713.00 dan terealisasi sebesar Rp1,330,514,747,320,86 atau 108,74%. Dana Transfer berupa Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp 197,842,828,926.00 terealisasi sebesar Rp 309,861,621,281,00 atau 156,62%, pelampauan target Dana Bagi Hasil diperoleh antara lain dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA). Sementara Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp 502,553,133,000.00 terealisasi sebesar Rp 501,023,438,250,00 atau 99,70%, dana alokasi khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp92,572,224,703.00 terealisasi sebesar Rp 91,880.968,418,00 atau 99,25%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp125,029,356,000.00 terealisasi sebesar Rp103,167,208,345,00 atau 82,51% dan Dana Desa dianggarkan sebesar Rp103,003,087,000.00 terealisasi sebesar Rp 103,003,087,000.00 atau 100,00%. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 202,582,915,084.00 dan terealisasi sebesar Rp 221,704,145,026,00 atau 109,44%, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak daerah dianggarkan Rp 187,835,890,084.00 dan terealisasi



sebesar Rp 206,876,727,007,00 atau 110,14 %. Pelampauan target pada pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor. dan bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp 14,747,025,000.00 terealisasi Rp 14,827,418,019,00 atau sebesar 100,55% yang antara lain merupakan pendapatan bantuan keuangan Umum dan Bantuan keuangan khusus dari provinsi Sulawesi Selatan

3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan dari hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.13

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
04.03	Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	67,983,619,868.00	60,881,616,139,00	89,55
04.03.01	Pendapatan Hibah	49,102,000,000.00	42,436,704,251,00	86,43
04.03.03	Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	18,881,619,868.00	18,444,911,888,00	97,69

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Dari tabel di atas, penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 67,983,619,868.00 terealisasi sebesar Rp60.881.616.139,00 atau 89,55% karena beberapa komponen penerimaan pendukungnya tak mencapai target yang ditetapkan. Pendapatan Hibah direncanakan sebesar Rp 49,102,000,000.00 terealisasi sebesar Rp 42.436.704.251,00 atau 86,43% dimana pendapatan hibah ini antara lain diperoleh dari Hibah listrik dan scrab PT.Vale Indonesia,Tbk. Dan Pendapatan Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan ditargetkan sebesar Rp 18,881,619,868.00 terealisasi sebesar Rp.18.444.911.888,00 atau 97,69% yang diperoleh dari pendapatan dana jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

a. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.724.113.886.050,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.666.267.854.429,42 atau mencapai 96,64%.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Anggaran



Belanja Operasi Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 1.101.225.155.728,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.060.208.662.323,49 atau 96,28% sebagaimana pada table berikut:

Tabel 1.14
Anggaran dan Realisasi Operasi Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1	Belanja Operasi	1,101,225,155,728,00	1.060.208.662.323,49	96,28%
5.1.1	Belanja Pegawai	495.837.789.291,00	486.820.782.784,00	98,18
5.1.3	Belanja Barang dan Jasa	506.276.098.170,00	486.677.113.079,43	96,13
5.1.4	Belanja Subsidi	200.000.000,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	90.579.422.767,00	80.641.627.360,06	89,03
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.531.845.500,00	6.069.139.100,00	92,92

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Belanja Berdasarkan tabel di atas, belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp495.837.789.291,00,00 terealisasi Rp486.820.782.784,00 atau 98,18%, Belanja pegawai ini antara lain meliputi Gaji dan Tunjangan ASN, DPRD, KDH/WKDH, Tambahan Penghasilan ASN.Sementara Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp506.276.098.170,00 terealisasi Rp486.677.113.079,43 atau 96,13. Realisasi belanja Barang dan jasa dipengaruhi oleh komponen Belanja antara lain belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang yang diserahkan ke pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa hadiah atau beasiswa. Belanja Subsidi dianggarkan Rp2.000.000.000,00 yang dipersiapkan untuk rencana operasional bandara Sorowako namun tidak terealisasi, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp90.579.422.767,00 terealisasi Rp80.641.627.360,06 atau 89,03%, Komponen belanja hibah ini antara lain hibah ke pengurus Rumah ibadah dan kelompok masyarakat. Dan untuk Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp6.531.845.500,00 terealisasi Rp6.069.139.100,00 atau 92,92%, dimana realisasi ini merupakan bagian dari belanja beasiswa kurang mampu yang menjadi program pemerintah daerah selama beberapa tahun.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur



Tahun Anggaran 2022, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp303.462.165.792,00 terealisasi sebesar Rp 289.744.487.264,93 atau 95,48% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.2	Belanja Modal	303.462.165.792,00	289.744.487.264,93	95,48
2.2.1	Belanja Modal Tanah	7.860.552.500,00	7.860.552.480,00	100
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.186.547.755,00	48.712.736.356,00	101,09
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.604.239.730,00	94.715.866.695,32	88,85
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	140.450.435.807,00	138.096.590.733,61	98,32
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap	360.390.000,00	358.741.000,00	99,54

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Berdasarkan tabel di atas, belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah yang dianggarkan sebesar Rp7.860.552.500,00,00 terealisasi Rp7.860.552.480,00 atau 100%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp48.186.547.755,00,00 terealisasi Rp48.712.736.356,00 atau 101,09%, pelampauan realisasi ini disebabkan oleh adanya pencatatan belanja dari Dana BOS dan BLUD yang reclass ke komponen belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada pelaporan keuangan. Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp106.604.239.730,00 terealisasi Rp 94.715.866.695,32 atau 88,85%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan Rp 140.450.435.807,00,00 terelisasi Rp 138.096.590.733,61 atau 98,32% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp 360.390.000,00,00 terealisasi Rp358.741.000,00 atau 99,54%. Untuk belanja Modal beberapa diantaranya masih belum merealisasikan belanja retensi atau pemeliharaan.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 707.600.000,00 atau 20,22%, belanja yang terealisasi tersebut dipergunakan untuk penanganan wabah corona virus disease (covid 19) sebesar



Rp376.600.000,- sesuai SK Bupati No.173/F-04/IV/Tahun 2022, dan direalisasikan pula bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebesar Rp331,000,000,- sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.3	Belanja Tak Terduga	3,500,000,000	707.600.000,00	20,22
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	707.600.000,00	20,22

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp 315.926.564.530,00 terealisasi sebesar Rp 315.607.104.841,00 atau 99,90%. Realisasi tersebut diperoleh dari realisasi komponen Belanja Bagi Hasil sebesar Rp18.735.918.471,00 (100%) dan Realisasi Komponen Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp296.871.186.370,00 atau 99,89% dari anggaran, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.4	BELANJA TRANSFER	315.926.564.530,00	315.607.104.841,00	99,90
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	18.735.937.530,00	18.735.918.471,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	297.190.627.000,00	296.871.186.370,00	99,89

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI).

b. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun Tahun-tahun Anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi Keuangan Daerah untuk menutupi selisih antara Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah. dengan rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 1.18
Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	113.847.103.327,00	113.847.103.327,37	100
6.1.1	Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	113.847.103.327	113.847.103.327,37	100
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.602.575.088,00	6.446.575.088,00	97,64
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.602.575.088,00	6.446.575.088,00	97,64
	Pembiayaan Netto	107.244.528.239,00	107.400.528.239,37	100,15
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan		185.516.697.885,23	

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 sebesar Rp185.516.697.885,23 yang terdiri dari :

- a. Saldo akhir Kas BUD sebesar Rp. 174.137.373.555,13
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran (Utang PFK) senilai Rp.9.543.090,00;
- c. Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp.0,00;
- d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah senilai Rp. 6.903.436.801,00;
- e. Kas di Bendahara FKTP/JKN senilai Rp. 398.365.098,10;
- f. Kas di Bendahara BOS senilai Rp. 67.979.341,00;
- g. Setara Kas (Rekening Deposito BLUD) senilai Rp4.000.000.000,00.

c. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 113.847.103.327,00 dengan realisasi sebesar Rp113.847.103.327,37 atau 100%. Jumlah Penerimaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

d. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 6.602.575.088,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.446.575.088,00 atau 97,64%. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran.



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan Daerah di maksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk maksud tersebut, perencanaan pembangunan daerah memuat hal-hal yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama, dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Timur lima tahun mendatang dalam kerangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Permasalahan pembangunan untuk prioritas dan sasaran dimaksudkan dengan permasalahan yang sifatnya makro pada level daerah. Indikator yang menjadi dasar penyingkapan masalah pada level dampak. Permasalahan ini akan mempengaruhi rumusan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan. Poin-poin permasalahan ini diuraikan dalam pokok masalah, masalah dan akar masalah.

1) Kemiskinan Dan Taraf Hidup Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur saat ini menempati peringkat keempat di Sulawesi Selatan (Kota dan Kabupaten) dengan nilai 72,80 (2019), 73,22 (2020) dan 73,34 (2021). Meskipun nilai IPM ini merupakan peringkat tertinggi di antara semua Kabupaten, namun tetap merupakan tantangan untuk mencapai tingkat kualitas manusia yang lebih tinggi. Masalah terkait peningkatan kualitas manusia adalah penguasaan pengetahuan yang diukur dengan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah; peluang berumur panjang yang diukur dengan angka harapan hidup; dan daya beli yang diukur dengan pengeluaran perkapita. Pada tahun 2021, Rata-Rata Lama Sekolah adalah 8,81 tahun, Harapan Lama Sekolah adalah 12,84 tahun,



Angka Harapan Hidup adalah 70,63 tahun dan Pengeluaran Perkapita sebesar Rp. 12.886 juta/orang/tahun. Meskipun IPM sudah di atas rata-rata Provinsi dan Nasional serta PDRB Perkapita ADHB Tahun 2021 yang mencapai 78,58 juta/orang/tahun yang tergolong cukup tinggi, namun belum berbanding lurus jika dihubungkan dengan tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator taraf hidup yang pada Tahun 2021 mencapai 6,94% (20,99 ribu orang) dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 371.947/kapita/bulan. Sementara itu salah satu ukuran yang menunjukkan apakah pendistribusian dari pendapatan merata secara nyata adalah Gini Rasio, dimana pada Tahun 2021 Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan menjadi 0,396. Permasalahan kemiskinan dan distribusi pendapatan memiliki keterkaitan erat, dimana semakin sejahteranya dari kondisi miskin maka akan mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk sehingga diharapkan pengentasan kemiskinan juga akan turut menurunkan gini rasio di daerah.

2). Pertumbuhan Perekonomian Daerah Yang Fluktuatif

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur selama periode lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan karena peranan terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, dimana pada tahun 2021 mencapai 43,99 persen. Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 16,26 triliun rupiah menjadi 16,03 triliun rupiah sehingga mengalami kontraksi sebesar -1,39 persen. Kondisi tersebut disebabkan oleh PDRB sektor pertambangan dan penggalian di tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar -7,81 persen. Namun jika nilai Pertumbuhan Ekonomi dihitung tanpa sektor pertambangan dan penggalian mengalami tren yang sangat positif yaitu mencapai 5,76 persen. Salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang cukup positif adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,91 persen. Ini berarti bahwa produktivitas sektor-sektor perekonomian khususnya Pertanian, belum terkelola dengan optimal. Aktivitas sektor pertanian dalam arti umum belum menghasilkan nilai tambah yang cukup untuk berkembangnya rantai pasok yang memberi nilai kepada pelaku yang lebih banyak begitu pula dalam arti penyerapan tenaga kerja dimana pada Tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur yang mengalami peningkatan menjadi 4,96 persen dengan jumlah penganggur sebanyak 8052 orang.

3). Belum Optimalnya Cakupan Dan Kualitas Infrastruktur Daerah

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan terus dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Namun demikian, upaya-upaya itu belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan infrastruktur daerah. Infrastruktur belum mampu memberi dukungan maksimal terhadap upaya menciptakan transportasi yang aman, efisien dan efektif. Permasalahan transportasi darat adalah tingginya



tingkat kerusakan jalan akibat belum optimalnya pemeliharaan dan peningkatan jalan serta masih belum optimalnya akses jalan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor pertanian dan pariwisata. Daya dukung sumber air baku untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat juga belum optimal yang disebabkan karena keterbatasan anggaran. Saluran irigasi belum mampu memenuhi kebutuhan air bagi kegiatan budidaya pertanian. Masih tersedia lahan potensial yang cukup untuk perluasan areal budidaya pertanian namun belum terlayani jaringan irigasi teknis. Selain itu ketersediaan air baku juga belum mampu mengatasi kebutuhan air bersih yang terus meningkat sejalan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan akan perumahan layak huni dan lingkungan permukiman yang berkualitas juga belum teratasi secara optimal. Pemenuhan kebutuhan hunian layak masih dihadapkan pada rendahnya tingkat keterjangkauan rumah layak bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah menetap pada rumah tidak layak huni dan sebagiannya tidak memiliki rumah. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat terus meningkat yang tidak diiringi dengan kemampuan memiliki rumah. Hal ini memberikan dampak pada penurunan kualitas rumah dan menciptakan rumah tidak layak huni baru. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana dasar memberikan dampak pada tidak berkurangnya lingkungan kumuh bahkan memungkinkan terciptanya lingkungan kumuh baru. Kinerja pelayanan air bersih/minum masih perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai target universal access. Demikian juga pada sektor sanitasi yang meliputi limbah domestik, sampah dan drainase. Prasarana pemukiman lain seperti jalan lingkungan, talud pengaman permukiman dari longsor dan abrasi serta ketersediaan listrik juga belum menunjukkan kinerja optimal sehingga memberi dampak pada penurunan kualitas lingkungan.

4). Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Memuaskan

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan Pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni accountability, transparency, predictability, dan participation. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional. Pada tahun 2021, Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 memperoleh Nilai 62,82 dengan Predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan Berdasarkan komponen yang dinilai, terlihat bahwa 2 komponen yang mengalami kenaikan dan 3 komponen yang nilainya tidak mengalami perubahan. Komponen yang mengalami peningkatan nilai adalah



Perencanaan Kinerja yang meningkat dari 17,04 di tahun 2020 menjadi 18,01 di tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja yang meningkat dari 15,22 di tahun 2020 menjadi 16,01 di tahun 2021. Sementara Komponen yang tidak mengalami perubahan nilai adalah Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,91, Evaluasi Internal dengan nilai 5,48 dan Capaian Kinerja dengan Nilai 11,41. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 memperoleh nilai 53,57 dengan predikat "CC" mengalami peningkatan dari Tahun 2020 dengan nilai 46,94 predikat "C". Sementara berdasarkan hasil penilaian baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,156 dan Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,938 serta Skor IEPK sebesar 2,538. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yang diantaranya adalah :

1. Manajemen Risiko Pemerintah Daerah belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;
2. Instansi Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan risiko kemitraan;
3. Sebagian besar Perangkat Daerah belum memiliki Risk Register terkait farud /pencegahan korupsi; dan
4. Belum dilakukan Reviu atas proses manajemen risiko oleh APIP. Pada aspek lain, penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) belum semuanya terpenuhi 100%. SPM berlaku untuk Pelayanan Dasar Urusan Wajib yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Ketertiban, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

5). Degradasi Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 mencapai 84,085 atau mengalami penurunan dari tahun 2020 yang mencapai 86,87. Penurunan IKLH Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dari tahun sebelumnya dipengaruhi oleh Nilai Indeks Kualitas Air yang mengalami penurunan dari 26,75 pada tahun 2020 menjadi 24,20 di tahun 2021. Walaupun pada tahun 2021 IKLH Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun Status IKLH Kabupaten Luwu Timur masih tergolong "Sangat Baik". Walaupun dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tetap harus mengantisipasi ancaman degradasi lingkungan.

6). Masih Adanya Potensi Gangguan Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib. Upaya itu dapat berupa deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli secara rutin, pengamanan, penanganan unjuk rasa dan penertiban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 TAHUN 2020. Upaya-upaya tersebut tentunya memerlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan TNI dan POLRI yang



didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing serta kewenangan kelembagaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai banyak keterbatasan dalam pelaksanaan tupoksinya. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari TNI dan Polri melalui kesepakatan Trantibmum agar dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam Program-Program Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif, aman dan tenteram. Termasuk memudahkan koordinasi dan komunikasi pada setiap kegiatan operasional terkait ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2021, konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 sebanyak 59 kasus yang terdiri dari Konflik Lahan sebanyak 3 kasus, Konflik Politik sebanyak 2 kasus, Konflik Suku sebanyak 2 kasus, Kriminal sebanyak 25 kasus dan Aksi Demo sebanyak 29 kasus. Tingkat kriminal dan aksi demonstrasi di Kabupaten Luwu Timur mendominasi jumlah konflik sosial yang terjadi, namun terjadi penurunan konflik dari tahun ke tahun. Untuk dapat meredam potensi konflik di Kabupaten Luwu Timur, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

7). Tantangan Untuk Merawat Nilai-Nilai Agama Dan Budaya ditengah Era Transformasi Digital yang semakin berkembang

Masyarakat Luwu Timur dikenal sebagai masyarakat yang beradab. Keberadaban ini bertumpu pada kesadaran terhadap pentingnya nilai-nilai agama dan budaya di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini perlu dilestarikan ditengah semakin berkembangnya era digitalisasi saat ini, tantangan tersebut perlu untuk segera disikapi dengan baik. Penguatan Nilai-nilai agama dan budaya tersebut tumbuh dan berkembang sejalan dengan keberagaman latar sosial masyarakat Luwu Timur. Daerah ini dihuni oleh berbagai pemeluk agama dan keyakinan. Juga mereka memiliki nilai-nilai budaya yang beragam. Perbedaan dan keberagaman dimaksud memiliki tantangan tersendiri, dan sekaligus menjadi potensi bagi terciptanya masyarakat yang beragam dalam kesatuan. Dalam konteks inilah, maka upaya yang berkesinambungan dalam merawat nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Luwu Timur memiliki makna yang strategis. Fakta menunjukkan bahwa ketika keberagaman nilai-nilai agama dan budaya tersebut dirawat dengan baik, maka keberagaman ini menjadi kekuatan didalam mengatasi berbagai macam problem pembangunan

Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah



mendesak sesuai kewenangan urusan Pemerintah Daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2022. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Menurunnya Angka Melek Huruf dari 95,50 persen di tahun 2020 menjadi 93,59 persen di tahun 2021;
- Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dari 95,99 persen di tahun 2020 menjadi 85,13 persen di tahun 2021;
- Menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dari 103,13 persen di tahun 2020 menjadi 99,41 persen di tahun 2021 dan SMP dari 103,56 persen di tahun 2020 menjadi 97,37 persen di tahun 2021;
- Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dari 95,95 persen di tahun 2020 menjadi 90,87 persen di tahun 2021 dan SMP dari 98,49 persen di tahun 2020 menjadi 71,00 persen di tahun 2021;
- Menurunnya Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs dari 95,76 persen di tahun 2020 menjadi 92,76 persen di tahun 2021;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan;
- Belum meratanya distribusi Guru dan ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran pada setiap Satuan Pendidikan
- Menurunnya persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV tingkat SD dan SMP.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- Meningkatnya Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup sebesar 9,56 persen pada tahun 2021;
- Meningkatnya Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup sebesar 7,35 persen pada tahun 2021;
- Masih terdapatnya jumlah kematian ibu pada tahun 2021 sebanyak 8 kasus (147,09/100.000 KH);
- Bertambahnya kejadian balita gizi buruk pada tahun 2021 sebanyak 5 orang;
- Belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten Luwu Timur;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang;

a. Pekerjaan Umum

- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik menurun dari 40,00 persen di tahun 2020 menjadi 39,18 persen di tahun 2021;
- Sebagian besar lebar jalan belum sesuai dengan standar jalan Kabupaten;
- Masih terdapat jembatan yang lebarnya kurang dari lebar jalan existing;
- Masih rendahnya Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik di tahun 2021 yang baru mencapai 54,00 persen;
- Masih rendahnya Persentase Penduduk Berakses Air Minum di tahun 2021 yang baru mencapai 58,70 persen;



- Besarnya cakupan layanan irigasi;
- Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku.

b. Penataan Ruang

- Masih rendahnya Ketaatan Terhadap RTRW di tahun 2021 yang baru mencapai 39,80 persen;
- Masih terbatasnya regulasi RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis;
- Belum jelasnya kebijakan insentif-desinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang;
- Belum optimalnya sistem informasi penataan ruang

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan;
- Menurunnya Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan dari 13,35 persen di tahun 2020 menjadi 12,50 persen di tahun 2021;
- Belum termanfaatkannya ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Masih terbatasnya prasarana dasar perumahan dan permukiman;
- Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Menurunnya cakupan petugas perlindungan masyarakat dari 9,12 persen di tahun 2020 menjadi 7,16 persen di tahun 2021;
- Menurunnya Cakupan pelayanan bencana kebakaran dari 91,18 persen di tahun 2020 menjadi 80,56 persen di tahun 2021;
- Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran;
- Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran;
- Belum optimalnya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
- Belum optimalnya kapasitas masyarakat yang dapat menyebabkan risiko bencana tinggi;
- Belum optimalnya peran fasilitasi dan koordinasi pelayanan penanggulangan bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Belum validnya data base Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga jumlah PPKS yang tertangani masih sangat terbatas;
- Belum termanfaatkannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam program penanggulangan kemiskinan oleh seluruh pihak;
- Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level



7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
- Rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga melemahkan daya saing pada dunia kerja;
- Masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja;
- Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
- Terbatasnya akses sumber daya pembangunan karena pendekatan pembangunan pemberdayaan perempuan masih mengabaikan isu kesetaraan dan keadilan;
- Belum maksimalnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan;
- Ketersediaan data terpilah terbatas dan data terpilah belum menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan;
- Masih adanya kekerasan terhadap ibu dan anak dalam rumah tangga (KDRT).

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras;
- Harga bahan pangan masih fluktuatif;
- Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- Belum teridentifikasinya seluruh tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Masih terjadinya perselisihan sengketa pertanahan milik Negara dan masyarakat;
- Sebagian besar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;
- Belum maksimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembuatan sertifikat tanah masyarakat.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- Masih terjadinya kerusakan lingkungan, berakibat pada peningkatan luasan lahan yang perlu dikonservasi;
- Peran serta sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;



- Lemahnya validitas informasi dan data base kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur;
- Belum sebandingnya jumlah kegiatan yang harus diawasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan;
- Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan;
- Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan persampahan sejak dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Akhir sampah;
- Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; reuse, reduce and recycle);
- Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan;
- Kondisi kualitas lingkungan khususnya air badan air di wilayah Kabupaten Luwu Timur masih belum dapat memenuhi baku mutu;
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku industri pengolahan terhadap dampak pencemaran lingkungan.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam perekaman biometrik KTP elektronik, penerbitan akta kematian dan penerbitan akta kelahiran;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan;
- Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- Masih lemahnya up-dating data profil desa/kelurahan sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PADes;
- Belum optimalnya BUMDes yang terbentuk;
- Masih rendahnya status Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur;
- Masih rendahnya pemahaman Aparatur Pemerintah desa dalam memahami regulasi.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk dari 1,99 di tahun 2020 menjadi 2,27 di tahun 2021;
- Total Fertility Rate (TFR) yang masih meningkat di tahun 2021 menjadi 2,79;
- Meningkatnya Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) dari 15,61 di tahun 2020 menjadi 16,73 di tahun 2021;



- Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB masih sangat rendah;
- Belum tersusunnya Dokumen Grand Desain Kependudukan Kabupaten Luwu Timur;
- Menurunnya Rasio Akseptor KB;
- Masih minimnya Regulasi Daerah terkait Pengendalian Penduduk.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- Masih minimnya penyediaan terminal, pelabuhan dan bandara sebagai pusat pergerakan manusia dan barang serta konektivitas antar daerah;
- Belum maksimalnya pemenuhan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas di jalan Kabupaten;
- Masih terbatasnya penyediaan sarana transportasi massal bagi masyarakat;
- Masih rendahnya Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pemenuhan kegiatan komunikasi dan informatika;
- Masih minimnya sumber daya manusia pengelolaan Informatika dan Telematika di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan E –Government;
- Masih minimnya akses internet bagi masyarakat pada ruang publik di Kabupaten Luwu Timur;
- Masih adanya blank spot internet di beberapa wilayah Kabupaten Luwu Timur.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

- Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas;
- Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri di Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan data peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan;
- Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM;
- Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- Masih minimnya regulasi yang mendukung peningkatan penanaman modal;
- Menurunnya Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- Kurangnya data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Instansi Pemerintah dan dunia usaha;



- Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- Rata-rata waktu penerbitan dokumen perizinan belum sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

- Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Belum tersedianya sarana kepemudaan sebagai wadah pengembangan potensi kepemudaan;
- Masih rendahnya minat olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- Masih perlunya peningkatan pembinaan masyarakat bidang olahraga.
- Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
- Keterbatasan SDM dan kapasitas pengelola data statistik;
- Belum terpusatnya penyediaan data statistik sektoral;
- Keterbatasan anggaran pengelolaan data statistik sektoral.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Keterbatasan SDM;
- Keterbatasan sarana dan prasarana;
- Keterbatasan anggaran.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- Belum optimalnya implementasi penguatan pewarisan nilai-nilai sejarah dan budaya luhur, hal ini dipengaruhi oleh faktor belum adanya petunjuk teknis;
- Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya ketersediaan sarana dan prasarana budaya;
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya pembinaan kapasitas tenaga pelatihan, pembinaan maupun pelaku budaya;
- Masih rendahnya daya saing dan semangat kompetisi dalam berkarya budaya, hal ini dipengaruhi oleh faktor minimnya pemahaman dan keterampilan dalam mengolah dan mengembangkan budaya.

21. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Menurunnya jumlah kunjungan perpustakaan karena kurangnya minat dan budaya baca masyarakat;
- Minimnya Inovasi di bidang perpustakaan;
- Masih belum optimalnya penyediaan fasilitas ruang perpustakaan di seluruh wilayah sebagai sasaran pembinaan;
- Masih terbatasnya tenaga pustakawan daerah

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Database informasi kearsipan belum optimal dilaksanakan;
- Keterbatasan SDM arsiparis;
- Pengelolaan administrasi kearsipan Perangkat Daerah belum optimal;



- Masih rendahnya pengetahuan tentang tata kearsipan pada aparatur sehingga penataan berkas/arsip belum tertib baik arsip aktif, in aktif maupun statis;
- Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada.

23. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Masih maraknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan;
- Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan;
- Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
- Belum optimalnya produksi olahan ikan;
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan.

24. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Promosi kepariwisataan belum dilakukan secara optimal, khususnya pada tingkat Nasional dan Internasional;
- Masyarakat sekitar obyek wisata belum berperan secara aktif dalam pengembangan obyek wisata setempat;
- Masih lemahnya akurasi data kepariwisataan secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata;
- Materi atau bahan pameran produk unggulan dari para pelaku jasa usaha pariwisata masih terbatas;
- Pengembangan sektor pariwisata belum berpadu sehingga pengembangannya cenderung stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan obyek wisata potensial seperti Danau Matano dan obyek wisata potensial lainnya.

25. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat padapenurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian;
- Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani;
- Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi;
- Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi;
- Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan;
- Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target;



- Penurunan kualitas sumberdaya lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dan pencemaran lingkungan menyebabkan penurunan produksi pertanian dan mutu produk pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air;
- Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi;
- Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/tengkulak;
- Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha tani;
- Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;
- Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar;
- Masih rendahnya daya saing produk perkebunan terhadap produk impor;
- Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi, informasi pasar, permodalan dan kemitraan;
- Kurang tersedianya benih unggul yang bermutu;
- Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- Keterbatasan akses permodalan bagi peternak;
- Masih banyaknya pemotongan ilegal di luar RPH;
- Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian;
- Kurangnya ketersediaan infrastruktur;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan, dan teknologi alsintan;
- Belum optimalnya infrastruktur Pertanian;
- Menurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan degradasi lahan;
- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis.

26. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah;
- Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi;
- Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki;
- Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan Ekspor dan Impor.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- Masih rendahnya produktifitas IKM;
- Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM;
- Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM;
- Masih rendahnya pendidikan dan ketrampilan pelaku IKM.
- Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
- Belum optimalnya aksesibilitas transportasi ke daerah transmigrasi;



- Masih minimnya dukungan infrastruktur penunjang pada wilayah transmigrasi;
- Belum sepenuhnya kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan oleh para pihak;
- Tingkat kompetensi calon transmigran belum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tujuan

28. Unsur Sekretariat Daerah

- Banyaknya program dan kegiatan yang terkait Kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan terkendala dengan payung hukum atau regulasi terkait;
- Masih kurangnya koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah, terkait program maupun kegiatan yang menjadi objek untuk menjadi bahan dalam menyusun rancangan kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
- Belum tertibnya administrasi data usul rancangan produk hukum daerah;
- Masih lambatnya penyelarasan dan penyesuaian produk hukum daerah yang ada dengan perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan tingkat pusat;
- Belum tersedianya alat yang efektif dan efisien untuk memantau dokumen rancangan produk hokum daerah yang sedang diproses;
- Masih lambatnya pembentukan produk hukum daerah;
- Belum optimalnya kinerja pegawai dalam penyelesaian pembentukan produk hukum daerah akibat terbatasnya SDM di Perangkat Daerah yang memiliki kompetensi penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pengelola JDIH;
- Pengawasan internal dalam pembentukan produk hukum daerah masih belum optimal;
- Masih lemahnya pengertian tentang bantuan hukum pada Perangkat Daerah dalam penanganan perkara gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dan Perdata;
- Masih lambannya pengolahan dan pelaporan data terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia pada Perangkat Daerah;
- Belum ada pustakawan yang mengelola arsip dan belum ada staf yang mengikuti pendidikan dan latihan khusus JDIH;
- Evaluasi kelembagaan belum diterapkan secara berkala;
- Pola tata hubungan kerja belum terkoordinasi antara sekretariat daerah dengan perangkat daerah;
- Kebijakan pelayanan publik belum diimplementasikan secara maksimal;
- Belum tersusunya peta proses bisnis (Probis);
- Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
- Rencana aksi delapan area perubahan pada reformasi birokrasi belum sepenuhnya optimal;



- Belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi lingkup pemerintah Kabupaten;
- Kematangan kelembagaan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan kualitas tata kelola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum optimal, dimulai dari tahap perencanaan anggaran, tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak;
- Penguatan regulasi terhadap sistem dan mekanisme pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkup Pemerintah Kabupaten belum terwujud sesuai standar;
- Ketersediaan SDM pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terkait kuantitas dan kualitas yang belum memadai di lingkungan pemerintah Kabupaten;
- Belum optimalnya capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD dan masih lambatnya pengumpulan data pendukung IKK LPPD dari tiap-tiap Perangkat Daerah;
- Kurangnya Kapasitas SDM & Tenaga Ahli dalam Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Belum optimalnya pengawasan internal dalam hal mengimplementasikan penyelenggaraan kerja sama;
- Kurangnya Kapasitas SDM & Tenaga Ahli dalam Penyelenggaraan Bina Wilayah.

29. Unsur Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- Masih terbatasnya SDM di Sekretariat DPRD terhadap penyusunan legal drafting;
- Masih Kurangnya pelayanan sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD khususnya di bidang informasi dan Teknologi.

30. Unsur Perencanaan

- Kurangnya SDM perencana;
- Masih kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;
- Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data perencanaan;
- Belum meratanya kapasitas SDM Perencana di level Perangkat Daerah.

31. Unsur Keuangan

- Kurangnya jumlah dan kualitas personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
- Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas;
- Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal;
- Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan obyek pajak belum optimal;
- Jumlah SDM yang mengelola pendapatan masih kurang;
- Ruang pelayanan pajak belum representative

32. Unsur Kepegawaian

- Keterbatasan SDM pelayanan kepegawaian;



- Berkurangnya jumlah pegawai setiap tahunnya karena pensiun;
- Keterbatasan rekrutmen CPNS setiap tahunnya.

33. Unsur Pendidikan Dan Pelatihan

- Database kediklatan yang belum memadai;
- Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya;
- Belum tersedianya data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat.

34. Unsur Penelitian Dan Pengembangan

- Belum optimalnya pengembangan penelitian untuk kepentingan pembangunan;
- Belum adanya keserasian pemanfaatan hasil-hasil penelitian daerah;
- Belum tersedianya pejabat fungsional khusus peneliti.

35. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

- Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas;
- Belum sepenuhnya dilakukan pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh Camat;
- Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Kecamatan dengan luas wilayah.

36. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

- Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Belum optimalnya pola koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi maupun dengan Instansi Vertikal;
- Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
- Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama

37. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

- Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal pemeriksa;
- Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal;
- Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten;
- Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik;
- Belum terpenuhinya 6 elemen Kapabilitas APIP di level 3

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi Pembangunan Daerah

Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini diharapkan berfungsi sebagai "medan magnet" bagi seluruh pemangku



kepentingan dalam berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Rumusan visi yang bersumber dan dijabarkan dari visi kepala daerah terpilih ini didasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang tidak hanya memperhatikan kondisi saat ini dan sebelumnya tetapi juga memperhatikan berbagai kecenderungan masa depan. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 berdasarkan rumusan visi kepala daerah terpilih adalah: **"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni "berkelanjutan", "lebih maju", serta "berlandaskan nilai agama dan budaya". Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada Tabel 1.16

Tabel 1.19
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Berkelanjutan	Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



	Lebih maju	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.
	Berlandaskan nilai agama dan budaya	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Rumusan visi ini memiliki keterkaitan erat dengan visi RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2005-2025 yakni "Kabupaten Luwu Timur yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya". Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter" dan visi RPJMN 2020-204 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

2. Misi Pembangunan Daerah

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi. Upaya umum tersebut memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang hendak dicapai. Rumusan misi ini membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Olehnya itu, rumusan misi RPJMD ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Adapun rumusan misi pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah sebagai berikut:



a) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum terkait peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara utuh. Upaya umum ini terutama berfokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik dalam makna kesejahteraan ekonomi maupun dalam makna kesejahteraan sosial. Selain itu, dalam misi ini juga terkandung upaya umum untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,

b) Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan ketahanan perekonomian daerah secara merata serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di dalamnya tercakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas sektorsektor perekonomian unggulan daerah serta hilirisasi atas produk-produk tersebut, dibarengi dengan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata pada seluruh wilayah.

c) Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan lingkungan hidup daerah, khususnya dengan memelihara kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

d) Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 akan didorong reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Tercakup didalamnya upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, baik yang merupakan pelayanan dasar berbasis SPM maupun pelayanan publik lainnya.

e) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketentraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban diarahkan untuk mewujudkan rasa aman dan damai dalam masyarakat

f) Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan Budaya

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah. Di dalam upaya ini, penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya ditempatkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tabel 1.20
Keterkaitan Pokok Visi dan Misi serta Penjelasan Misi RPJMD
Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

No.	Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Berkelanjutan	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh	dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum agar masyarakat Luwu Timur semakin meningkat kesejahteraan dan taraf hidupnya dengan ditandai oleh meningkatnya PDRB per kapita, menurunnya angka pengangguran, menurunnya rasio jumlah penduduk miskin, meningkatnya indeks pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya daya beli masyarakat
2		Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas	dimaksudkan sebagai upaya umum agar perekonomian Luwu Timur terus berkembang. Selain itu juga memiliki kapasitas daya saing yang berbasis pada pertanian olahan mendukung hilirisasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah, serta menguatkan struktur ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Perekonomian Luwu Timur tersebut diupayakan berkembang dengan rantai pasok yang luas Karena memiliki berbagai jaringan dalam konteks regional, nasional dan global
3.	Lebih Maju	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Luwu Timur didorong untuk menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini ditandai dengan upaya-upaya untuk terkelolanya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif, serta pengembangan kerjasama yang fungsional dan produktif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta dengan berbagai pihak. Misi ini juga



			mencakup upaya perluasan jangkauan dan intensitas layanan publik serta meningkatkan pendapatan asli daerah
4		Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas	dimaksudkan sebagai upaya umum dalam menyediakan infrastruktur wilayah pada berbagai sektor sehingga ketersediaannya lebih memadai dan terakses sampai pada daerah terisolasi. Misi ini juga mencakup upaya dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana. Misi ini termanifestasikan dalam bentuk meningkatnya indeks lingkungan hidup, terciptanya kepatuhan multipihak terhadap Rencana Tata ruang dan Rencana Wilayah (RTRW), serta peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas ketersediaan infrastruktur wilayah
5.	Berlandas nilai agama dan budaya	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketenteraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat seperti mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan
6.		Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya	dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan pembangunan di masa depan. Misi ini mengasumsikan bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lebih prospektif lagi bagi masa depan Luwu Timur ketika proses atau pelaksanaan pembangunan didasari dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan



			budaya tersebut menjadi sangat penting artinya. Ini telah ditunjukkan oleh sejarah perkembangan Luwu Timur di masa lalu yang masyarakatnya hidup dan berkembang dengan keberagaman yang kuat serta penghayatan dan praktik budaya yang tinggi. Nilai-nilai agama dan budaya ini juga relevan dalam konteks keberlanjutan pembangunan, karena dari keduanya para penyelenggara pembangunan dapat termotivasi untuk mengendalikan diri terhadap berbagai kemungkinan rusaknya tatanan keluarga, masyarakat, dan lingkungan fisik manusia
--	--	--	---

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengacu pada RPJMD Daerah dengan menekankan target Prioritas Pembangunan yang diarahkan pada pemantapan pencapaian Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026” LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA” dalam mewujudkan masyarakat yang semakin Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Program Prioritas yaitu program yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM. Program Prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi :

- Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Serta ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah.
- Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I.
- Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan Pemerintahan.



Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) 30 bagi tercapainya target Sasaran Pembangunan Daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi Prioritas Pembangunan Daerah, disesuaikan dengan keterbatasan anggaran dan kemendesakan identifikasi masalah dan korelasinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Suatu prioritas pembangunan di masa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, terkecuali hal yang sangat mendesak dan memiliki daya ungkit besar terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah dan berdampak luas bagi masyarakat yang tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*) selain itu pula dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional maupun Provinsi hal ini guna tercapainya harmonisasi antar perencanaan pembangunan.

Pembangunan pada Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Tahun Pertama RPJMD 2021-2026, fokus pembangunan diarahkan kepada penajaman pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPJMD. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Daerah berdasarkan RPJPD 2005-2025, RKPD Tahun 2022 telah disusun dengan mengintegrasikan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang saat ini sedang dalam Tahap proses Penyusunan Sehingga diharapkan dapat terwujud senergi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan. berdasarkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi yang merupakan kerangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arahan yang jelas yang akan dilaksanakan guna menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pembangunan memberikan arahan yang jelas kepada para pemangku kepentingan dan para stakeholdes dalam proses pelaksanaannya. Selain itu memberikan arahan pelaksanaan bagi setiap Urusan Pemerintahan Daerah baik Urusan Waib maupun Urusan Pilihan dalam mendukung Misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah yang dirumuskan secara spesifik, realistis dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2019 dan tahun berjalan 2020 serta perumusan permasalahan dan tantangan pembangunan yang mungkin dihadapi pada Tahun 2022 baik internal maupun eksternal, serta dengan memperhatikan kerangka pendanaan daerah dan capaian Kinerja Pembangunan Daerah, guna memaksimalkan pencapaian Tujuan dan sasaran dalam kerangka penajaman perwujudan pencapaian Visi Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026



Sesuai dengan Permendagri 86/2017, tujuan dalam RPJMD adalah kondisi yang akan dicapai atau sesuatu yang akan diubah selama periode RPJMD. Langkah-langkah perumusan tujuan meliputi: (1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; (2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (3) merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C. Sasaran dalam RPJMD adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Menurut Permendagri 86/2017, kriteria sasaran adalah: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan (4) memenuhi kriteria SMART-C. Langkah-langkah dalam merumuskan sasaran adalah: (1) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; (2) merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok tahapan RPJPD yang relevan; dan (3) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan pemahaman di atas maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran tujuan pada Misi-1 yakni "Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh" adalah: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran: (a) Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (b) Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (c) Meningkatnya kesetaraan gender
2. Penjabaran tujuan pada Misi-2 yakni "Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas" adalah: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dengan sasaran: (a) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah; (b) Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha.
3. Penjabaran tujuan pada Misi-3 yakni "Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas" adalah: Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan" dengan sasaran: (a) Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah; (b) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. Penjabaran tujuan pada Misi-4 yakni "Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik" adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dengan sasaran: (a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan; (b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;



5. Penjabaran tujuan dari Misi-5 yakni "Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat" adalah Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman dengan sasaran Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat,
6. Penjabaran tujuan dari Misi-6 yakni "Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya" adalah Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah dengan sasaran Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Untuk itu Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang merupakan implemetasi dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima (5) tahun. Program pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dipetakan dalam Matriks Program Pembangunan Daerah berdasarkan hasil pemetaan tersebut nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan berpedoman pada Permendagri 050-379 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)

Tujuan

Mewujudkan peningkatan dan pemerataan Kesejahteraan masyarakat (T1)

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S1)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program pengelolaan pendidikan
- 2 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- 3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman
- 4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 5 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
- 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 7 Program Pemberdayaan Sosial,
- 8 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial,



- 9 Program Pengendalian Penduduk
- 10 Program pembinaan keluarga berencana (KB),
- 11 Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS),
- 12 Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan,
- 13 Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan,
- 14 Program pengembangan kapasitas kepramukaan,
- 15 Program pembinaan perpustakaan.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program Penataan Desa,
- 2 Program Administrasi Pemerintahan Desa,
- 3 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi,
- 4 Program Pembangunan Kawasan Transmmigrasi,
- 5 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi,
- 6 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
- 7 Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa,
- 8 Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan kelurahan

Sasaran 3

Meningkatnya pemberdayaan gender (S3)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program Penanganan Warga negara migran korban tindak kekerasan,
- 2 Program rehabilitasi sosial,
- 3 Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
- 4 Program perlindungan perempuan,
- 5 Program pengelolaan system data dan gender dan anak,
- 6 Program pemenuhan hak anak (PHA),
- 7 Program perlindungan khusus anak,
- 8 Program peningkatan kualitas keluarga,

Misi 2 : Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)

Tujuan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)

Sasaran 4

Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan,
- 2 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat,
- 3 Program penanganan kerawanan pangan,
- 4 Program pengawasan keamanan pangan
- 5 Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi,
- 6 Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi,



- 7 Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi,
- 8 Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM),
- 9 Program pengelolaan perikanan tangkap,
- 10 Program pengelolaan perikanan budaya,
- 11 Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,
- 12 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,
- 13 Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata,
- 14 Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif,
- 15 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian,
- 16 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner,
- 17 Program perizinan usaha pertanian,
- 18 Program penyuluhan pertanian,
- 19 Program pengembangan ekspor,
- 20 Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,
- 21 Program standarisasi dan perlindungan konsumen,
- 22 Program perencanaan dan pembangunan industri,

Sasaran 5

Ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program perencanaan tenaga kerja,
- 2 Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja,
- 3 Program penempatan kerja
- 4 Program hubungan industrial,
- 5 Program pendidikan dan latihan perkoperasian,
- 6 Program pengembangan iklim penanaman modal,
- 7 Program promosi penanaman modal,
- 8 Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
- 9 Program pengembangan ekonomi kreatif melalui penempatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual,
- 10 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan,

Misi 3 : menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)

Tujuan

Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T4)

Sasaran 6

Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program pengelolaan sumber daya air,
- 2 Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum,
- 3 Program pengembangan system pengolahan persampahan regional,
- 4 Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air limbah,



- 5 Program pengelolaan dan pengembangan system drainase,
- 6 Program pengembangan permukiman,
- 7 Program penataan bangunan gedung,
- 8 Program penyelenggaraan jalan,
- 9 Program pengembangan jasa konstruksi,
- 10 Program penyelenggaraan penataan ruang,
- 11 Program penataan bangunan dan lingkungannya,
- 12 Program pengembangan perumahan,
- 13 Program kawasan permukiman,
- 14 Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh,
- 15 Program peningkatan sarana dan utilitas umum (psu),
- 16 Program pengelolaan tanah kosong,
- 17 Program penyelesaian sengketa tanah garapan,
- 18 Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan,
- 19 Program pengelolaan izin membuka tanah,
- 20 Program penatagunaan tanah,
- 21 Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ),
- 22 Program pengelolaan pelayaran,

Sasaran 7

Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program penanggulangan bencana,
- 2 Program penanganan bencana,
- 3 Program perencanaan lingkungan hidup,
- 4 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
- 5 Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati),
- 6 Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3),
- 7 Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH),
- 8 Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat,
- 9 Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat,
- 10 Program penanganan pengaduan lingkungan hidup,
- 11 Program pengelolaan persampahan,
- 12 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian,

Misi 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)

Tujuan

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)

Sasaran 8

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program pengelolaan aplikasi informatika



- 2 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi,
- 3 Program pengelolaan arsip,
- 4 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
- 5 Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah,
- 6 Program pengelolaan keuangan daerah,
- 7 Program pengelolaan barang milik daerah,
- 8 Program pengelolaan pendapatan daerah,
- 9 Program penyelenggaraan pengawasan,
- 10 Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Sasaran 9

Meningkatnya kualitas pelayanan public (S9)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2 Program pengelolaan taman makan pahlawan
- 3 Program pendaftaran penduduk
- 4 Program pencatatan sipil
- 5 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- 6 Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- 7 Program pelayanan izin usaha simpan pinjam,
- 8 Program pelayanan penanaman modal,
- 9 Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal,
- 10 Program penyelenggaraan statistik dan sektoral,
- 11 Program perlindungan dan penyelamatan arsip,
- 12 Program perizinan penggunaan arsip
- 13 Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota,
- 14 Program pengelolaan system informasi industry nasional
- 15 Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,
- 16 Program perekonomian dan pembangunan
- 17 Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd,
- 18 Program kepegawaian daerah
- 19 Program pengembangan sumber daya manusia
- 20 Program penelitian dan pengembangan daerah
- 21 Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
- 22 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Misi 5 : mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh masyarakat (M5)

Tujuan

Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman (T5)

Sasaran

Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum



- 2 Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamata non kebakaran,
- 3 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- 4 Program penguatan ideology Pancasila dan karakter kebangsaan
- 5 Program peningkata peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- 6 Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- 7 Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Misi 6 : Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis agama dan budaya (M6)

Tujuan

Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T11)

Sasaran

Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), Kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
- 2 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- 3 Program pemberdayaan kebudayaan
- 4 Program pengembangan kesenian tradisional
- 5 Program pembinaan sejarah
- 6 Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- 7 Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial, dan budaya

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Prioritas RPJMD Kabupaten Luwu timur Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah dirumuskan terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indicator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya.

Selain program prioritas yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan daerah, pada bab ini juga disajikan program- program operasional pada semua SKPD yang tupoksi semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi



urusan pemerintah Kabupaten. Indikasi rencana program pembangunan bagi SKPD yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal dengan indikatornya masing-masing, diharapkan akan mengarah pada pencapaian target SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dimaksud.

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 6 program, 18 kegiatan dan 80 sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
 - Penambahan Ruang Kelas Baru
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan
 - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Penambahan Ruang Kelas Baru
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Pembangunan perpustakaan sekolah
 - Pembangunan laboratorium
 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat laboratorium
 - Rehabilitasi Sedang/Berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa



- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Pengadaan Mebel PAUD
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - Pengelolaan Dana BOP PAUD
4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota



- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota
 - Pendaftaran objek diduga cagar budaya
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Pelindungan Cagar Budaya
 - Pengembangan cagar budaya

2 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 9 program, 32 kegiatan dan 105 sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - Pembangunan puskesmas
 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - Pengembangan Puskesmas
 - Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya
 - Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - Pengadaan Obat, Vaksin
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat



- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
 - Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat
 - Operasional Pelayanan Puskesmas
 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
 - Operasional pelayanan puskesmas

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
 - Operasional pelayanan puskesmas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya



4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
7. Peningkatan pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengembangan Rumah Sakit
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - Pengadaan alat/perangkat system informasi kesehatan dan jaringan internet

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 12 program, 26 kegiatan dan 96 sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD



- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan alat besar
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- 1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Tanggul Sungai



- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - Rehabilitasi Tanggul Sungai
 - Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - Normalisasi/Restorasi Sungai
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan Bendung Irigasi
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
 - Operasional Unit Pengelola Irigasi
 - Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM
 - Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
 - Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM
 - Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan
 - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1. Pengembangan Sistem dan Pegelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Penyediaan Sarana Persampahan
 - Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota



- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Outline Plan pada kawasan genangan
 - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota
 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan gedung, serta Implementasi SIMBG
 - Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Pembangunan Jalan
 - pelebaran Jalan Menuju Standar
 - Rehabilitasi Jalan



- Pembangunan Jembatan
- Pelebaran Jembatan
- Rehabilitasi Jembatan

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil dan Kecil)
 - Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
4. Pengawasan Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Bimbingan Teknis Tentang Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota
 - Sistem Informasi Penataan Ruang
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

4 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 10 program, 22 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan barang milik daerah SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian



PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GERAPAN

1. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota
 - Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

1. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong
 - Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

1. Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

1. Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

5 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 2 program, 11 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran



3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan aset dan tak berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penganangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Umum dan Ketertiban Umum
 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 2 program, 12 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan aset dan tak berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komonikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan rencana kontijensi
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kota/Kabupaten.
 - Aktivasi sistem komandi penanganan darurat bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
4. Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan Bencana
 - Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota

7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 2 program, 13 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan aset dan tak berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
 - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
3. Investigasi kejadian kebakaran
 - Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi



- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 14 program, 25 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik



- Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

1. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asa

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan permakanan
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota



PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup daerah kabupaten/kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah
 - Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah

9. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 10 program, 18 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitas kunjungan tamu
 - Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air , Udara dan Laut
 - Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota
2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
 - Pengelolaan ruang terbuka hijau

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

1. Penyimpanan sementara Limbah B3
 - Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota
 - Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH
 - Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak



Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Pengelolaan sampah
 - Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 - Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 6 program, 15 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
 - Evaluasi pelaksanaan fasilitasi / insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota
 - Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Strategi promosi penanaman modal
 - Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah/kabupaten/kota

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota



- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

11. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 7 program dan 20 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota



- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
- 5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif



12. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 15 program dan 26 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

1. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota



PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
 - Misi dagang bagi produk ekspor unggulan
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor



PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 5 program, 14 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DAK)
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (DAK)
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DAK)
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran/ SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi peraturan Perundang -undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan (DAK)
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu (DAK)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (APBD/DAK)
- 6. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DAK)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor APBD/DAK
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

- 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Kependudukan

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

- 1. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- 2. Penyelenggaraan Pencatatan sipil
 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil



PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROPIL KEPENDUDUKAN

1. Penyusunan Propil Kependudukan
 - Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota

14. Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja

Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 7 program dan 20 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
 - Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelayanan antar kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Perluasan Kesempatan Kerja
2. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - Pengawasan dan pengendalian LPTKS
3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pelayanan dan Penyediaan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja
4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
5. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan



- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
 - Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan Transmigrasi
 - Pelatihan transmigrasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

15. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - Pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil
 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha
 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota



2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 4 program, 16 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK),
 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
 - Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal
 - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Penyediaan dan Distribusi sarana KIE Program KKBPK
 - Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya



- Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Pembinaan Terpadu Kampung KB

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS) Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS),
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS),
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga),
 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK,
 - Advokasi dan Promosi IPK
 - Sosialisasi IPK
2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS),
 - Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

17. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 3 program, 19 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pembangunan Gedung Terminal
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
3. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala Kendaraan Bermotor
 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLA PELAYARAN

1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota



3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

18. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 5 program, 14 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Komunikasi dan Informatika)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel (Dinas Komunikasi dan Informatika)
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Layanan Hubungan Media
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Membangun Metadata Statistik Sektoral

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 4 program dan 11 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bagunan Lainnya

PROGRAM PENATAAN DESA

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 5 program dan 15 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan gedung kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lain
 - Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik
 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/ kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/ Kota
 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
 - Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - Sosialisasi budaya baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial



- Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota

PROGRAM PENGELOAAN ARSIP

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota
 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan nasional Tingkat kabupaten/ Kota
 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan daerah kabupaten/ Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN PENYELAMATAN ARSIP

1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - Pelaksanaan pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

21. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 10 program dan 25 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi



- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3. Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kota/ Kabupaten
 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Pengembangan Prasarana Pertanian



- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
- 2. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2. Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
 - Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia



2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan
 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
 - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota
 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

22. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 3 program dan 21 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
 - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
12. Penataan Organisasi
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi



- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
13. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi Keprotokolan
 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Administrasi Tata Pemerintahan
 - Penataan Administrasi Pemerintahan
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 - Fasilitasi kerja sama luar negeri

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pemantauan Kebijakan Sumber
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup



23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 2 program dan 18 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Pendalaman tugas DPRD
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
8. Fasilitasi Tugas DPRD



- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

24. Inspektorat Kabupaten

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 3 program, 10 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Administrasi Umum perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya



- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengawasan keuangan pemerintah daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Pengawasan Desa
 - Kerjasama Pengawasan Internal
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - Pengawasan dengan tujuan tertentu

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1. Pendampingan dan Asistensi
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan daerah
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi
 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 4 program dan 18 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota

- 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4 Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategi Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah



- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring an Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
- 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial



- Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
- 3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- 4 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan

26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Pengelolaan Dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait



3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran
 - Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
 - Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota,
 - Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan kerugian Daerah
 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah
 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat Mendesak
5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan standar harga
 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah
 - Inventarisasi barang milik daerah
 - Pengamanan barang milik daerah
 - Penilaian barang milik daerah
 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah



- Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

27. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat



- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - Penagihan Pajak Daerah

28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 3 program dan 13 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah
 - Penataan Usaha Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah



- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

- 1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pengelolaan Mutasi ASN
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
- 2 Pengembangan Kompetensi ASN
- Pengelolaan Assessment Center
 - Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- 3 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - Pembinaan Disiplin ASN



- Palayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
- Evaluasi Disiplin ASN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Penyelenggaraan Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional
 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan



dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

30. Kecamatan

Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur berjumlah 11 Kecamatan antara lain: Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan diKecamatan secara umum sama. Pada tahun 2022 Kecamatan melaksanakan 6 program dan 15 kegiatan dan. Adapun program, kegiatan dan sub kegaitan dimaksud adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa



- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Adapun rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran sebagai berikut:

A. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-



baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi

1. Pendidikan.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan kinerja yang cukup baik yang tergambar dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Propinsi. Namun ada beberapa indikator kunci yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu Timur, diantaranya adalah Kabupaten Luwu Timur memiliki level yang berbeda dengan Kota Palopo. Penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo memiliki harapan untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan Diploma I (13,00 tahun untuk Luwu Timur dan 15,10 tahun untuk Kota Palopo). Jika dilihat dari capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, maka selisih rata-rata lama sekolah antara Kota Palopo dengan Luwu Timur yaitu 2,17 tahun. Kota Palopo memiliki rata-rata lama sekolah selama 11,09 tahun, sementara di Kabupaten Luwu Timur memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8,92 tahun. Untuk pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Luwu Timur lebih rendah dibandingkan dengan Kota Palopo. Sementara itu rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Secara rata-rata, penduduk Kabupaten Luwu Timur usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 8,92 tahun masa sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,00 tahun atau setara dengan Diploma I. Standar hidup layak Kabupaten Luwu Timur yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah mencapai 13,058 juta per kapita per tahun.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan. APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut. APS usia 7-12 tahun (setara SD/Sederajat) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 berdasarkan data hasil olah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mencapai 99,82 persen. Artinya tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan SD di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup tinggi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan (2021 = 99,16 persen). APS usia 13-15 tahun (setara SMP/ sederajat) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 mencapai 96,93 persen, lebih rendah daripada usia SD/ sederajat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 13-15 tahun mengalami penurunan (2021 = 97,61 persen). APS usia 16-18 tahun (setara SMA/ sederajat) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 mencapai 70,11 persen. Angka ini lebih rendah lagi dibandingkan dengan APS usia 7-12 tahun dan APS usia 13-15 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 16-18 tahun ini juga mengalami peningkatan (2021 = 69,81 persen).

Selain menggunakan APS sebagai indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan, kita juga dapat menggunakan indikator Angka



Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

2. Kesehatan.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur dari tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh, diantaranya adalah Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2015-2017 cenderung stabil pada kisaran 69 tahun dan meningkat pada kisaran 70 tahun mulai tahun 2018 hingga kini Kondisi ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya AHH di Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu Angka kematian bayi, persentase bayi berusia 0-11 bulan yang diberi ASI selama 4-6 bulan, dan variabel persentase balita berusia 1-4 tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Pada faktor penanganan pada saat persalinan, masih terdapat persalinan yang dilakukan oleh bukan tenaga medis (dukun) sebesar 0,2%, hal ini menunjukkan kesadaran ibu hamil akan penanganan terhadap persalinan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan.

Jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Luwu Timur dalam tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 jumlah tenaga medis yang ada sebanyak 846 orang sedangkan jumlah penduduk Luwu Timur sebanyak 308.530. Permasalahan lain terkait dengan beberapa layanan rumah sakit yang belum terakreditasi serta kualitas layanan puskesmas yang belum sepenuhnya memenuhi standar.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum.

Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2022 hanya berkisar 70,58%, atau 1.333.371 Km dan masih ada sekitar 29,42% atau 555.902 Km jalan yang berada dalam kondisi kurang baik. Kondisi tersebut dipengaruhi pula oleh volume kendaraan yang semakin hari semakin meningkat. Masih terdapatnya beberapa wilayah di Kabupaten Luwu Timur belum dapat diakses sarana transportasi darat.

Untuk rasio perbandingan antara luas lahan budidaya dan panjang jaringan irigasi mengalami perbaikan, luas lahan budidaya di Kabupaten Luwu Timur semakin lebih baik dan data tahun 2022, ada 3.793,90 m luas kondisi irigasi (m)



yang berada dalam kondisi baik, sementara panjang jaringan irigasi yang ada pula mengalami penambahan menjadi 97.958,11 m (kondisi baik), sehingga rasio luas daerah irigasi yang telah dilayani oleh jaringan irigasi mencapai 55,89% pada tahun 2022.

b. Penataan Ruang.

Sepintas ada semacam konflik antara kepentingan memelihara wilayah ekologi dengan pembangunan ekonomi rakyatnya. Pelestarian wilayah ekologi yang optimal adalah dengan cara tidak mengganggu kawasan ini, khususnya kawasan lindung dan kawasan hutan. Sudah tidak proporsionalnya antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031. Masih terjadi inkonsistensi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah baik perseorangan maupun badan usaha. Permasalahan terkait konflik Tenurial Kawasan Hutan diharapkan dapat terselesaikan sampai tahun 2023.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah jumlah rumah yang memiliki sanitasi hingga pada tahun 2016 hanya berkisar 78%, masih terdapat 22% rumah yang tidak memiliki sanitasi, masalah lain adalah masih terdapat lebih kurang 39,06% penduduk yang dapat mengakses air bersih (Air Bersih Perpipaan), sehingga jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga telah mendapatkan air bersih sudah ada 37.142 orang.

5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Luwu Timur merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Jumlah kasus pelanggaran perda dan perkara di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 sebanyak 418 kasus, sedangkan untuk kejadian bencana yang sering terjadi di kabupaten luwu timur antara lain; Banjir, Putting Beliung, Tanah Longsor, Gempa Bumi, dan Kebakaran. Frekuensi kejadian yang paling sering terjadi adalah banjir dan kebakaran, dimana pada tahun 2022 bencana banjir terjadi sebanyak 6 kali, yang mengakibatkan korban sebanyak 59 orang,



sedangkan gempa bumi terjadi sebanyak 246 kali, cuaca ekstrim sebanyak 21 kali, tanah longsor sebanyak 6 kali dan orang hilang/tenggelam sebanyak 6 kali,

Sementara itu untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan kejadiannya hampir merata pada semua kecamatan, berdasarkan data yang ada kejadian kebakaran pada tahun 2022 sebanyak 18 kali, dengan frekuensi terbesar pada Kecamatan Malili. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Luwu Timur yang hampir sebagian besar merupakan kawasan hutan sehingga potensi ini sangat mempengaruhi selain itu juga dipengaruhi oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuka lahan.

6. Sosial.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masih perlu untuk lebih dioptimalkan lagi, Berbagai upaya pembangunan kesejahteraan sosial selama ini telah dilakukan untuk dapat menuntaskan masalah kesejahteraan sosial. Namun upaya tersebut menghadapi tantangan balik dari berbagai faktor yang mengakibatkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial cenderung meningkat. Salah satu hal yang menjadi kendala, yakni terbatasnya sarana dan prasarana bagi fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Berdasarkan data yang ada jumlah PMKS di kabupaten luwu timur pada tahun 2015 terdiri atas 5 kategori yang terdiri dari; orang terlantar sejumlah 2 orang, orang gila 8 orang, penyakit masyarakat 0, koeban bencana 83 orang, keluarga sangat miskin sebanyak 2.231 keluarga; selanjutnya jumlah penduduk miskin kabupaten luwu timur tahun 2016 sebesar 21.080 jiwa. Kondisi demikian perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam penanganannya.

B. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman & Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;



7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:29PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kabupaten Luwu Timur 2021-2026

C. Kebijakan Umum Daerah

Arah Kebijakan Umum Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengacu pada RPJMD Daerah dengan menekankan target Prioritas Pembangunan yang diarahkan pada pemantapan pencapaian Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026” **LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”** dalam mewujudkan masyarakat yang semakin Maju, Mandiri dan Sejahtera. Program Prioritas yaitu program yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM. Program Prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi :

- Prioritas I* : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Serta ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah.
- Prioritas II* : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas.
- Prioritas III* : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan Pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target Sasaran Pembangunan Daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat



internal maupun eksternal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi Prioritas Pembangunan Daerah, disesuaikan dengan keterbatasan anggaran dan kemendesakan identifikasi masalah dan korelasinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Suatu prioritas pembangunan di masa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, terkecuali hal yang sangat mendesak dan memiliki daya ungkit besar terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah dan berdampak luas bagi masyarakat yang tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*) selain itu pula dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional maupun Provinsi hal ini guna tercapainya harmonisasi antar perencanaan pembangunan

Berdasarkan Tema, Tujuan, Sasaran serta Arah umum kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM.

Tahap Pembangunan di tahun kedua ini ditujukan untuk mencapai Berkelanjutan, Lebih Maju dan Berlandaskan nilai agama dan budaya Kabupaten Luwu Timur hingga tahun 2026. Guna mewujudkan Prioritas Pembangunan tersebut maka ditetapkan 6 Misi yang saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan visi daerah yaitu:

Misi 1

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tujuan:

Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sasaran:

- Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing,
- Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan
- Meningkatnya Pemberdayaan Gender

Misi 2

Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas.

Tujuan:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan

Sasaran:

- Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah
- ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha

Misi 3

Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

Tujuan:

Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah



Sasaran:

- a. Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah
- b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup

Misi 4

Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tujuan:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Sasaran:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Misi 5

Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.

Tujuan yakni Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman

Sasaran yaitu Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Misi 6

Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Tujuan yaitu mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya

Sasaran yaitu meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan

d. (SPM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

e. Kebijakan Umum Anggaran

Arah Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Penyusunan belanja daerah di Tahun 2022 tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dari input yang direncanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman



pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya serta untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang bersifat mendasar dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2022 disusun dan dihitung dengan dasar dan asumsi sebagai berikut :

- a. Skenario Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 1,5 – 2,50% dengan asumsi Pertama, pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi akan kembali mengalami Pertumbuhan Pasca imbas dari situasi Ekonomi Global yaitu Pandemi covid 19 Kedua, diharapkan kondisi pemulihan ekonomi dunia yang sudah semakin stabil, dan semakin meningkatnya kinerja sektor pertanian dengan meminimalisir faktor struktural yang dapat menghambat pergerakan pada sektor ini (benih, pupuk, sarana produksi pertanian) dan perubahan pola iklim serta cuaca; Melalui kebijakan meningkatkan arus investasi di daerah yang berkeadilan; perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi; kemudahan ijin usaha; penciptaan iklim usaha yang



kondusif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan penerapan teknologi tepat guna.

- b. Demikian halnya dengan Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kinerja semakin membaik dari tahun ke tahun, 6,98 % pada tahun 2019 menjadi 6,85 % pada tahun 2020, perkembangan angka kemiskinan di kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada kisaran 7 persen, berdasarkan hal tersebut untuk Tahun 2022 angka kemiskinan di proyeksikan dapat mencapai 6,84-6,64 % yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan intervensi program/kegiatan sektoral berdimensi kewilayahan, mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas tingkat kemiskinan tinggi (polaquickwin). Peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga melalui:
- Perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan kelembagaan dan sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin, lanjut usia, PMKS termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal yang mencakup pendidikan, kesehatan, hunian layak, air bersih, sanitasi, penyediaan bantuan dan jaminan sosial serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan;
 - Peningkatan kerjasama yang melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
 - Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan;
 - Peningkatan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan Pemberdayaan masyarakat Sekitar hutan;
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan calon tenaga kerja melalui penyusunan standar bakulembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi bagi calon naker ,peningkatan jumlah, kapasitas asesor kompetensi dan revitalisasi BLK;
 - Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi;
 - Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dan Penguatan Hubungan Industrial
- c. Pembangunan pendidikan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan termasuk bagi warga miskin, PMKS termasuk penyandang disabilitas, peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, perluasan fasilitasi anak usia sekolah dan berkebutuhan khusus yang belum tertangani serta anak putus sekolah melalui lembaga non formal,



- pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja, memperkuat peran swasta dalam penyediaan layanan pendidikan menengah, peningkatan budaya baca masyarakat serta pembangunan mental dan karakter anak didik;
- d. Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan masyarakat miskin, pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbaikan gizi masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran swasta serta masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, peningkatan mutu tenaga kesehatan dengan pelatihan, sertifikasi dan penguatan kompetensi dan optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, peningkatan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- e. Peningkatan kemampuan inovasi dan penerapan Iptek guna mendukung peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan interaksi dan pemanfaatan sumberdaya perguruan tinggi, lembaga penelitian, praktisi dan dunia usaha; pengembangan klaster inovasi dan pengetahuan sebagai centre of excellence;
- f. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana, fokus pada:
- Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui pelibatan serta peran aktif masyarakat;
 - Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan Kelembagaan masyarakat dan Penegakan hukum;
 - Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya,
 - Peningkatan konservasi sungai, dan danau untuk meningkatkan ketersediaan dan Keberlangsungan sumber daya air;
 - Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan produktif;
 - Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan masyarakat;
 - Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan. Penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.
- g. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusifitas wilayah, fokus pada:
- Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan kelembagaan;
 - Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik, optimalisasi layanan



- terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi, Optimalisasi Pencapaian SPM;
- Pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;
 - Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju- government;
- h. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,30–3,80% pada Tahun 2022 melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi penyerapan tenaga kerja disektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi, perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan, penguatan hubungan industrial serta perlindungan terhadap tenaga kerja melalui skema BPJS Ketenagakerjaan;
- i. Mengurangi disparitas infrastruktur antar wilayah, peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan jaringan irigasi, prasarana sumberdaya air, pelabuhan, pengembangan moda transportasi, sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan antar wilayah;
- j. Pembangunan Pertanian dalam arti luas guna mendukung kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui program Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, teknologi, akses pasar, serta pengendalian alih fungsi dalam mendukung program nasional lahan pangan berkelanjutan;
- k. Pengembangan kawasan pesisir dan sentra perikanan melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar perikanan, penegakan hukum terkait unregulated and unreported fishing; dukungan pengaturan penangkapan di kawasan overfishing, rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan.
- l. Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga sesuai kewenangan Kabupaten;
- m. Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan sebagai upaya pemantapan kesiapan dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- n. Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan Pemulihan Perekonomian Daerah dimasa pandemi covid 19 melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM, perlindungan terhadap produk dalam negeri, pembinaan dan pemberdayaan KUMKM-IKM, sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja, mendayagunakan program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia



- usaha, membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyerderhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi, serta dukungan infrastruktur;
- o. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan seluruh stakeholder dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan public sebagai mekanisme check and balances;
- p. Dalam rangka pengelolaan pembangunan perdesaan perlu diperhatikan:
- Dukungan pembangunan perdesaaan melalui kebijakan bantuan keuangan Khusus kepada pemerintah desa guna terwujudnya kemandirian desa
 - Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten yaitu rencana pembangunan menengah maupun tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa harus sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
 - Pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan skala lokal desa kepada Desa;
 - Pelaksanaan program sektoral yang masuk kedesa harus terinformasi dan terintegrasi dengan rencana pembangunan desa;
 - Pembangunan perdesaaan berbasis kearifan lokal perdesaan dan difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang prioritas dan mendesak untuk diselesaikan pada skala desa.
- q. Akselerasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur;
- r. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas belanja langsung berbasis kinerja dengan mengedepankan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik produktif yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- s. Pengusulan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 harus mencerminkan kinerja yang terukur terhadap pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah dan berbasis Sistem Informasi Perencanaan pembangunan (SIPD).

f. Kebijakan Belanja Pemenuhan kebutuhan Wajib dan Mengikat

Kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan Wajib dan mengikat berpedoman kepada Permendagri 13 Tahun 2006 sesuai amanat pasal 106 sebagai berikut:



- a. Pemenuhan kebutuhan belanja mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa
- b. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga

g. Kebijakan Belanja Pemenuhan kebutuhan Program Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi RPJMD 2021-2026 pemenuhan kebutuhan belanja Program Prioritas dimaksud kebijakannya diarahkan pada:

1. Melaksanakan Program Prioritas (KP1) guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD 2021-2026. Sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2022 yang mana difokuskan pada 5 (lima) Prioritas Utama yaitu:
 - a. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pengurangan Kemiskinan
 - b. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Akselerasi Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas, Industri dan Jasa Produktif serta Pengembangan Pariwisata;
 - c. Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar berkualitas yang mendukung Penguatan Konektifitas;
 - d. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas;
 - e. Pengembangan Kawasan Strategis Daerah serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Mengedapankan program-program dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan penciptaan lapangan kerja.
3. Melaksanakan program-program dalam rangka mendukung kebijakan Nasional Indonesia Kerja dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tercipta sinergi pembangunan dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan Nasional.
4. mengakomodir program-program pembangunan berdasarkan Aspirasi Masyarakat dalam musrenbang.
5. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari hasil rumusan penelaahan permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan



kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

h. Kebijakan Belanja Pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- f. Sosial.

i. Kebijakan Belanja Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK fisik dan Non Fisik)

1. Pengalokasian dana alokasi khusus Non Fisik berpedoman Petunjuk Tehnis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan Pasal 12 Ayat 7 (tujuh) undang-undang nomor 14 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik terdiri dari:
 - a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
 - b. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).
 - c. Tunjangan Profesi guru
 - d. Tambahan penghasilan guru
 - e. Tunjangan khusus guru (TKG PNSD)
 - f. Bantuan operasional kesehatan (BOK) dan Bantuan operasional keluarga berencana (BOKB)
 - g. Dana pelayanan administrasi kependudukan (PAK)
2. Dana Alokasi Fisik Adalah Dana yang Dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang merupakan kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional, yang dianggarkan dalam APBD setelah terbitnya Rincian Alokasi DAK Fisik Oleh Kementerian Keuangan RI. Pengalokasian Dana Alokasi khusus Fisik berpedoman Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan rincian penggunaan mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 dan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Terkait, yang terdiri dari DAK Fisik Reguler, Penugasan dan Afirmasi. Meliputi:
 - a. DAK Reguler meliputi bidang : Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Pertanian, Kelautan Perikanan, sentra Industri Kecil Dan Menengah dan Pariwisata,



-
- b. DAK Penugasan meliputi bidang : Pendidikan Sekolah Menengah Kejuaruan, Kesehatan Rumah sakit rujukan/Pratama, Air Minum, Sanitasi, Jalan, Pasar, Irigasi dan Energi Skala Kecil.
 - c. DAK Afirmasi meliputi Bidang : Perumahan dan Pemukiman, transportasi dan Kesehatan
 3. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/ subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, yaitu untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya.
 - a. Untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
 - b. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada kegiatan yang sama DAK Nonfisik dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional.

Adapun capaian kinerja makro penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 sebagai berikut.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dilihat perkembangan kesejahteraan penduduk di wilayah dari tahun ke tahun dan keterbandingan dengan wilayah lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan salah satu ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena menggambarkan kualitas penduduk berupa hidup sehat dan berumur panjang, intelektualitas berupa kemampuan memiliki ilmu pengetahuan dan standar hidup layak.

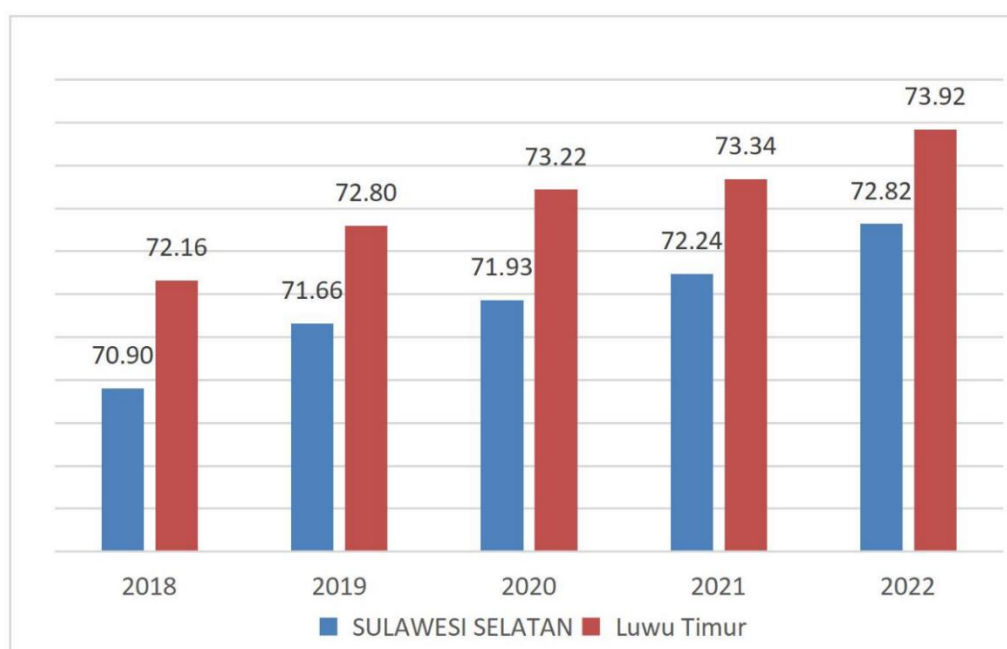
IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990. Komponen IPM yang digunakan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan PDB per kapita. Pada tahun 1991 terjadi penyempurnaan komponen IPM yang digunakan, yaitu AHH, AMH, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan PDB per kapita. Pada tahun 1995 terjadi penyempurnaan kembali terhadap komponen yang digunakan, yaitu AHH, AMH, kombinasi APK, dan PBD per kapita. Pada tahun 2010 UNDP melakukan perubahan terhadap metodologi yang digunakan yaitu AHH, RLS, HLS dan PNB per Kapita serta penghitungan agregasi indeks menggunakan rata-rata geometrik. Kemudian pada tahun 2011 dan 2014 penyempurnaan metodologi yaitu mengganti tahun dasar PNB dari 2005 menjadi 2011 serta merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Data yang digunakan untuk keperluan penyusunan IPM Kabupaten Luwu Timur sebagian besar menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) semesteran untuk mengumpulkan data kependudukan meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial budaya, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dan sosial ekonomi lainnya yang terdapat dalam kuesioner Kor dan Modul.



Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga 2022. IPM Kabupaten Luwu Timur meningkat dari 72,16 pada tahun 2018, menjadi 72,80 pada tahun 2019 dan terus meningkat menjadi 73,22 pada tahun 2020. Pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 adalah sebesar 73,34 dan terakhir pada tahun 2022 adalah sebesar 73,82. Selama periode 2018-2022, IPM Kabupaten Luwu Timur rata-rata tumbuh sebesar 0,79 persen per tahun. Angka tersebut lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya (2020-2021) yang hanya sebesar 0,17 persen. Pada tahun 2015, pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Luwu Timur berada pada tingkat level “Tinggi” yaitu pencapaian IPM 70 ke atas sampai kurang dari 80 menurut kriteria UNDP. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Grafik 2.1
Perkembangan IPM Kab Luwu Timur Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur, Indeks Pembangunan Manusia, Publikasi 31 Desember 2022

Berdasarkan hasil penghitungan IPM menggunakan metode baru, angka IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sebesar 73,92, menempati peringkat 4 di Provinsi Sulawesi Selatan, sama dari tahun sebelumnya. Pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2017 sudah berstatus tinggi. Selama periode 2018-2022 angka IPM Kabupaten Luwu Timur selalu setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Selain itu, juga selalu berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk jajaran kabupaten/kota di wilayah luwu raya, IPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 berada pada posisi kedua setelah Kota Palopo. Sejak periode 2010 hingga 2022 capaian IPM tertinggi di wilayah luwu raya dicapai oleh Kota

Palopo. Pada tahun 2022 IPM Kota Palopo mencapai 78,91, kemudian pada posisi kedua adalah Kabupaten Luwu Timur dengan capaian sebesar 73,92 dan posisi ketiga di wilayah luwu raya adalah Kabupaten Luwu dengan capaian IPM sebesar 71,36. Adapun perkembangan Indeks Pembangunan se-Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Menurut
Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Prov/Kab/Kota	Indek Pembangunan Manusia (IPM)				
	2018	2019	2020	2021	2022
SULAWESI SELATAN	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82
Selayar	66,04	66,91	67,38	67,76	68,35
Bulukumba	67,70	68,28	68,99	69,62	70,34
Bantaeng	67,76	68,30	68,73	68,99	69,69
Jeneponto	63,33	64,00	64,26	64,56	65,13
Takalar	66,07	66,94	67,31	67,72	68,31
Gowa	68,87	69,66	70,14	70,29	70,99
Sinjai	66,24	67,05	67,60	67,75	68,33
Maros	68,94	69,50	69,86	70,41	71,00
Pangkajene Kepulauan	67,71	68,29	68,72	69,21	69,79
Barru	70,05	70,60	71,00	71,13	71,53
Bone	65,04	65,67	66,06	66,40	67,01
Soppeng	67,60	68,26	68,67	68,99	69,70
Wajo	68,57	69,05	69,15	69,62	70,26
Sidenreng Rappang	70,60	71,05	71,21	71,54	72,06
Pinrang	70,62	71,12	71,26	71,45	71,97
Enrekang	72,15	72,66	72,76	72,91	73,39
Luwu	69,60	70,39	70,51	70,85	71,36
Tana Toraja	67,66	68,25	68,75	69,49	69,88
Luwu Utara	68,79	69,46	69,57	70,02	70,51
Luwu Timur	72,16	72,80	73,22	73,34	73,92
Toraja Utara	68,49	69,23	69,33	69,75	70,36
Kota Makassar	81,73	82,25	82,25	82,66	83,12
Kota Pare Pare	77,19	77,62	77,86	78,21	78,54
Kota Palopo	77,30	77,98	78,06	78,38	78,91

Sumber: BPS –Indeks Pembangunan Manusia, Tahun 2022

2.1.2 Angka Kemiskinan

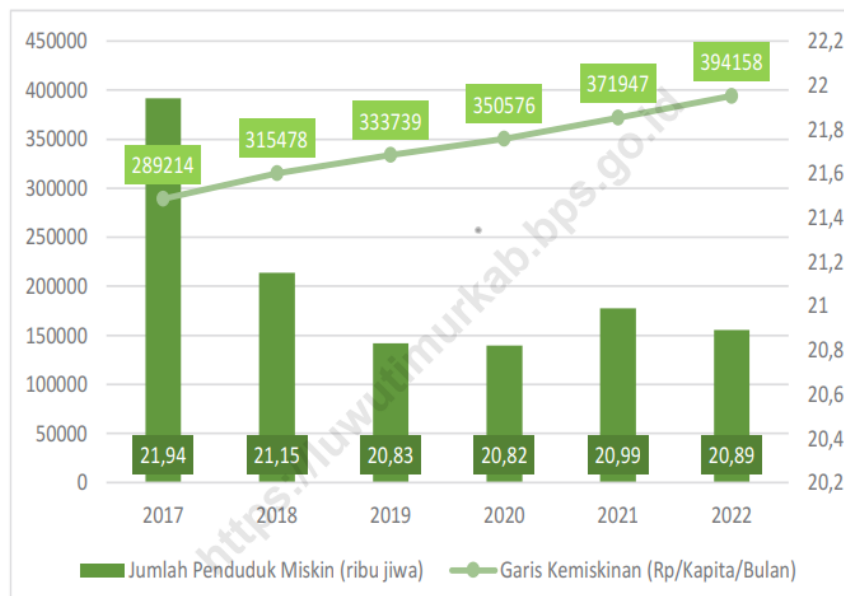
Jumlah penduduk miskin di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 777,44 ribu jiwa. Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 mencapai 20,89 ribu jiwa. Angka ini juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin kabupaten/kota lainnya,

Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat 10 persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi Selatan.

PERUBAHAN GARIS KEMISKINAN 2017 – 2022

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama tahun 2017 – 2022, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sekitar Rp 289.214 perkapita/bulan dan di tahun tersebut Garis Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 4,21 persen. Selanjutnya di tahun 2018 Garis Kemiskinan menjadi Rp 315.478,- perkapita/bulan dengan peningkatan sebesar 9,08 persen. Pada tahun 2018 persentase peningkatan Garis Kemiskinan adalah yang paling besar sejak tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2019, Garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur menjadi Rp 333.739,- perkapita/bulan, kemudian di tahun 2020 Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur naik 5,04 persen menjadi Rp 350.576,- perkapita/bulan, pada tahun 2021, Garis Kemiskinan naik 6,10 persen menjadi Rp 371.947,- perkapita/bulan, dan terakhir pada tahun 2022, garis kemiskinan turun menjadi Rp.394.158 rupiah/kapita/bulan.

Grafik 2.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur,
Tahun 2017-2022



Sumber: BPS – Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2023

Berdasarkan hasil tabel, dapat dipaparkan bahwa Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022, dengan garis kemiskinan 394.158 rupiah/kapita/bulan, terdapat 20,89 ribu atau 6,81 persen penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur. Angka ini turun jika dibandingkan tahun 2021 sebanyak 20,99 ribu atau 6,94 persen penduduk miskin.

2.1.3 Angka Pengangguran

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang



bekerja di pasar ketenagakerjaan dan dunia usaha. Sektor ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan selain itu dapat mengatasi permasalahan pengangguran. Salah satu sasaran utama pembangunan ketenagakerjaan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang dapat memasuki pasar kerja. Angkatan Kerja di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 161.470 jiwa dan 154.240 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir (95,52 persen).

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Lapangan Pekerjaan Utama ¹ <i>Main Industry</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	47 139	20 105	67 244
2	25 194	4 156	29 350
3,4,5	26 577	31 069	57 646
Jumlah/Total	98 910	55 330	154 240

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2023

Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Luwu Timur utamanya terdata Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022 sebanyak 7.230 orang. Perbandingan pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan dibandingkan laki-laki, tercatat pada tahun 2022 sebanyak 4.304 laki-laki dan 2.926 perempuan pencari kerja.

Tabel 2.3
Data Pengangguran dan Pencari Kerja di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>	103 214	58 256	161 470
1. Bekerja/ <i>Working</i>	98 910	55 330	154 240
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	4 304	2 926	7 230
Bukan Angkatan Kerja/ <i>Not Economically Active</i>	14 210	50 125	64 335
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	5 654	6 906	12 560



2. Mengurus Rumah Tangga/ Housekeeping	5 469	40 724	46 193
3. Lainnya/ Others	3 087	2 495	5 582
Jumlah/Total	117 424	108 381	225 805

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2023

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami penurunan dari 162.182 orang pada tahun 2021 kemudian, turun sebanyak 712 orang pada tahun 2022. Penduduk usia kerja mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Luwu Timur. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 71,51 persen atau 161.470 orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 154.240 ribu orang penduduk bekerja dan 7.230 orang pengangguran.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang termasuk Angkatan Kerja, TPAK dan TPT di Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2018-2022

No	Kegiatan Utama	2018	2019	2020	2021	2022
11	Angkatan Kerja :	144.010	137.236	157.509	162.182	161.470
	• Bekerja (<i>ribu jiwa</i>)	147.765	138.234	150.480	154.130	154.240
	• Pengangguran Terbuka (<i>ribu jiwa</i>)	3.145	5.502	7.029	8.052	7.230
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	71,99	67,48	72,36	73,14	71,51
3	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	2.030	3.810	4.460	4.960	4.480

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2022

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun menjadi 71,51 persen dibandingkan tahun 2019 (72,36 persen). Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik yang menjadi penduduk bekerja maupun sebagai pengangguran.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian kabupaten luwu timur dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Pertanian

Pada tahun 2022, produksi tanaman sayuran terbesar yang dihasilkan adalah tanaman kangkung dengan produksi 3.089 kw dari luas panen sebesar 152 hektar. Sedangkan produksi tanaman buah-buahan terbesar adalah buah semangka sebesar 2.239 kuintal. Komoditas Perkebunan Rakyat unggulan di Kabupaten Luwu Timur adalah Kelapa Sawit. Pada tahun 2022, kecamatan



Angkona merupakan penghasil Kelapa Sawit terbanyak yang mencapai 25.205,31 ton dari luas area 2.447,50 hektar

b. Pertambangan dan Penggalian

Produksi Nikel Mate PT Vale Tbk tahun 2022 sebesar 60.090 metrik ton, jumlah ini menurun 8,10% dibanding tahun 2021. Produksi tertinggi terjadi pada triwulan 3 sebanyak 17.513 metrik ton

c. Perdagangan

Tahun 2022, di Kabupaten Luwu Timur terdapat 12.348 sarana perdagangan yang terdiri dari 5.715 kios, 3.891 toko, 2.703 warung dan 39 pasar. Pada tahun 2022 lalu lintas bongkar muat penumpang dan barang di Pelabuhan Timampu mengalami peningkatan cukup signifikan. Total bongkar muat penumpang tahun 2022 turun 80,30 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut)

d. Energi

Jumlah pelanggan PDAM pada tahun 2022 mencapai 18.474 pelanggan, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 17.439 pelanggan. Jumlah pelanggan PLN pada tahun 2022 mencapai 76.599 pelanggan, meningkat bila dibanding dengan tahun 2021 yang mencapai 75.006 pelanggan

e. Pariwisata

Pada tahun 2022, terdapat 101 rumah makan/restoran di Luwu Timur. Kecamatan dengan jumlah rumah makan/restoran terbanyak adalah Kecamatan Malili dan Nuha sebanyak 25 rumah makan/restoran. Sementara itu pada tahun 2022, jumlah akomodasi hotel yang ada di Kabupaten Luwu Timur mencapai 35 buah. Kecamatan Nuha memiliki jumlah akomodasi hotel terbanyak yaitu 12 akomodasi. Selanjutnya kecamatan Malili dengan jumlah akomodasi hotel sebanyak 11 akomodasi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 sebesar 3,07%, tahun 2018 sebesar 3,39%, tahun 2019 sebesar 1,17%, dan tahun 2020 sebesar 1,46%, akan tetapi ditahun 2021, Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan Pertumbuhan ekonomi sebesar -1,39% dan ditahun 2022, pertumbuhan ekonomi, mengalami kenaikan sebesar 1,99 persen. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur di dominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sehingga hal ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur berjalan secara optimal. Terkhusus pada produktivitas sektor-sektor perekonomian yang umumnya berbasis sumber daya alam, baik tambang maupun non tambang, terkelola dengan baik.

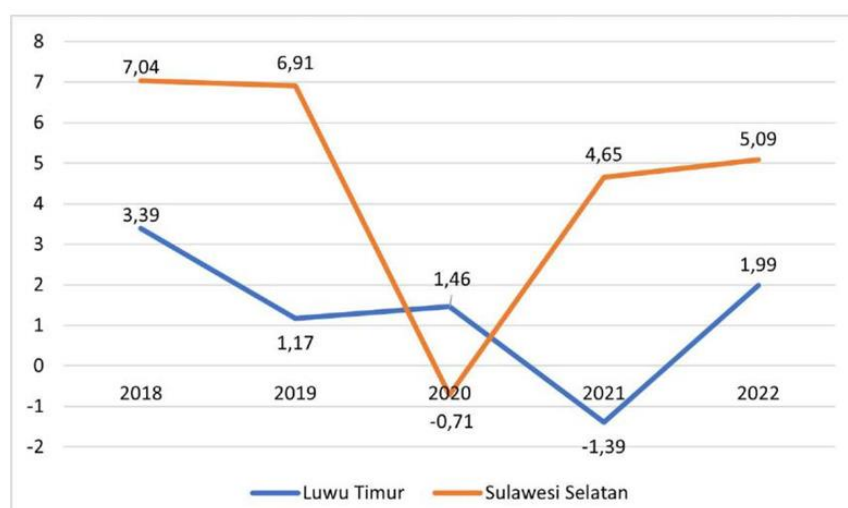
Tabel 2.5
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Luwu Timur 2018-2022

No	Tahun	Laju Pertumbuhan (%)
1	2018	3,39
2	2019	1,17
3	2020	1,46
4	2021	-1,39
5	2022	1,99

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2023

Laju pertumbuhan PDRB 2022 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 5,09%, nilai ini sebanding dengan laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur yang mengalami peningkatan sebesar 1,99%.

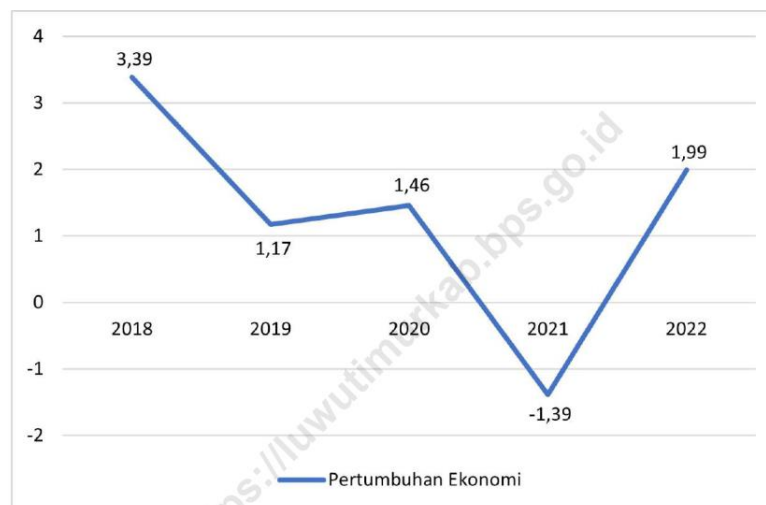
Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan (%) Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2023



Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2023

f. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada waktu tertentu. Penyusunan PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan. Yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Untuk Penyajian Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur, menyajikan data Pendapatan Domestik Bruto menurut lapangan usaha.

g. PDB menurut lapangan usaha

Mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.



Tabel 2.6
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	3 150,53	3 183,97	3 175,95	3 308,98	3 248,22
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	8 681,49	8 447,71	8 587,77	7 916,77	8 048,74
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	455,67	521,87	507,75	541,15	581,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	9,63	10,03	10,52	11,17	11,79
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,14	1,21	1,32	1,47	1,63
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1 279,37	1 403,98	1 448,20	1 559,00	1 598,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	606,13	669,82	662,57	707,10	762,50
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	100,79	111,86	97,39	103,94	118,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	25,59	27,79	24,23	24,80	27,53
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	266,31	294,89	328,12	353,19	379,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	134,02	141,69	147,33	154,80	158,51
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	274,47	295,87	313,48	331,40	351,83
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,07	7,82	7,15	7,42	7,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	330,23	348,46	345,81	366,50	377,25
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	296,29	317,69	337,64	356,56	367,14



Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	201,79	219,43	245,15	268,62	288,51
R,S,T ,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	17,26	18,86	16,54	17,62	18,91
Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product		15 837,80	16 022,95	16 256,90	16 030,50	16 349,57

Sumber: Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka tahun 2023

Tabel 2.7
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kab. Luwu Timur Tahun 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	4 941,17	5 005,81	5 157,68	5 906,03	6 217,58
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	9 741,53	9 502,35	9 677,50	10 387,74	14 214,24
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	691,96	801,19	790,88	862,98	958,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	9,72	10,22	10,60	11,35	12,09
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,34	1,47	1,62	1,85	2,06
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1 885,66	2 192,08	2 269,46	2 544,55	2 752,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	775,84	882,67	883,23	961,72	1 077,26
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	146,26	164,43	147,15	167,57	205,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	41,41	46,13	41,37	42,48	48,86
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	288,24	325,47	362,77	390,48	423,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	189,93	210,78	221,04	235,31	255,26
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	465,33	509,27	542,98	574,09	629,84
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	10,76	12,10	11,27	11,94	13,28



O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	517,75	566,44	573,81	613,94	636,87
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	409,50	454,55	486,91	515,92	540,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	251,51	280,44	325,95	359,29	391,02
R,S,T ,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	25,99	28,84	25,57	27,28	29,98
Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product		20 393,89	20 994,22	21 529,81	23 614,52	28 407,91

Sumber: Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka tahun 2023

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2018	2019	2020	2021 ^x	2022 ^{xx}
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	6,61	1,06	-0,25	4,19	-1,84
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,16	-2,69	1,66	-7,81	1,67
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,75	14,53	-2,71	6,58	7,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,93	4,14	4,92	6,10	5,57
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8,34	5,88	9,34	11,76	10,27
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,63	9,74	3,15	7,65	2,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	10,31	10,51	-1,08	6,72	7,83
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	10,25	10,99	-12,94	6,73	14,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	11,76	8,56	-12,78	2,34	11,01



	Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>					
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	10,37	10,73	11,27	7,64	7,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	6,32	5,72	3,98	5,08	2,40
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,88	7,80	5,95	5,72	6,17
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	10,50	10,51	-8,52	3,79	7,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	12,28	5,52	-0,76	5,98	2,93
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	8,66	7,22	6,28	5,60	2,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,50	8,74	11,72	9,58	7,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	11,42	9,28	-12,32	6,54	7,32
	Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Product	3,39	1,17	1,46	-1,39	1,99

Sumber: Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2022, angka PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 28,41 triliun rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 50,04 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 meningkat. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16,35 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi percepatan ekonomi sebesar 1,99 persen.

2.1.5 Pendapatan Perkapita

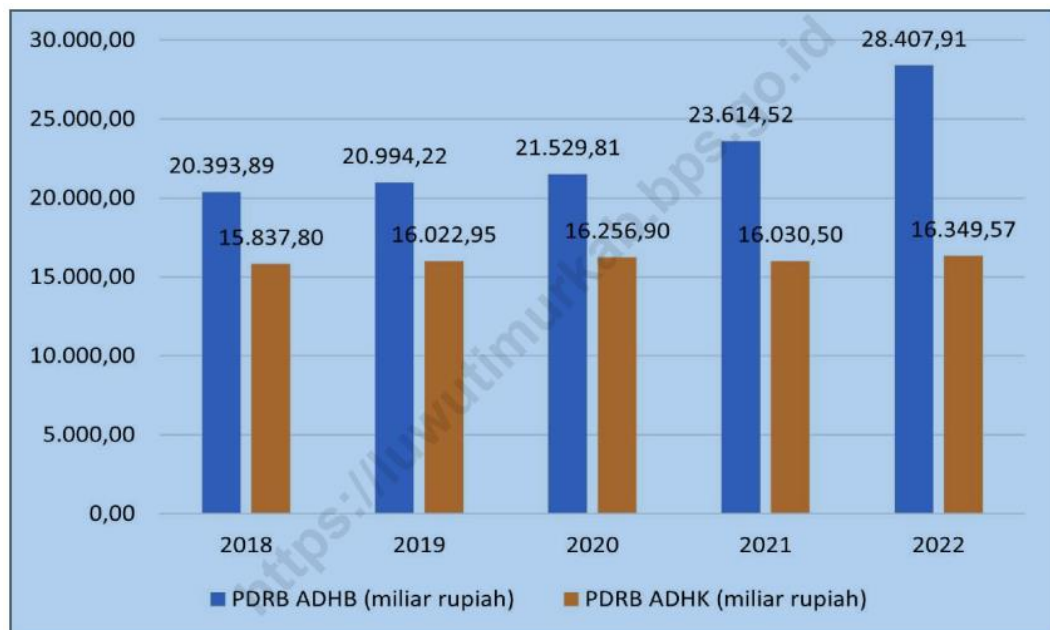
Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah PDRB perkapita. Indikator ini merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh setiap penduduk sebagai akibat dari adanya aktivitas produksi. Meskipun indikator ini belum bisa menggambarkan pendapatan perkapita penduduk suatu wilayah, namun kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonominya dapat diukur dengan tingkat pendapatan riil masyarakat perkapita. PDRB perkapita dihasilkan dari PDRB suatu



daerah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah tersebut. Bila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk, maka PDRB perkapita akan naik, namun sebaliknya bila pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, maka PDRB perkapita akan turun.

Diagram 2.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur (juta rupiah), 2018– 2022



Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.9

PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2022

Kategori	T a h u n				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	20.393,89	20.994,22	21.529,81	23.614,52	28.407,91
Jumlah Penduduk	293,822	300.078	296.741	300.511	305.521
PDRB Perkapita	71.224.07	71.340.00	72.850.00	78.580.00	92.980.00

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka tahun 2023

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Salah satu indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dicapai suatu wilayah harus dibarengi dengan pemerataan pembangunan khususnya pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan secara adil dan merata.



Gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Kondisi gini rasio Luwu Timur Tahun 2022 adalah 0,394. Capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga hal tersebut mengindikasikan kesenjangan di Kabupaten Luwu Timur masih lebih lebar dibandingkan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil perhitungan dari data Susenas 2020 hingga tahun 2021, gini rasio penduduk Kabupaten Luwu Timur sudah mencapai 0,396. Berdasarkan klasifikasi tingkat kesenjangan, distribusi pendapatan di Kabupaten Luwu Timur secara umum termasuk dalam kategori kesenjangan sedang. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur di Tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami ketimpangan tetapi masih dalam ketimpangan kategori sedang.

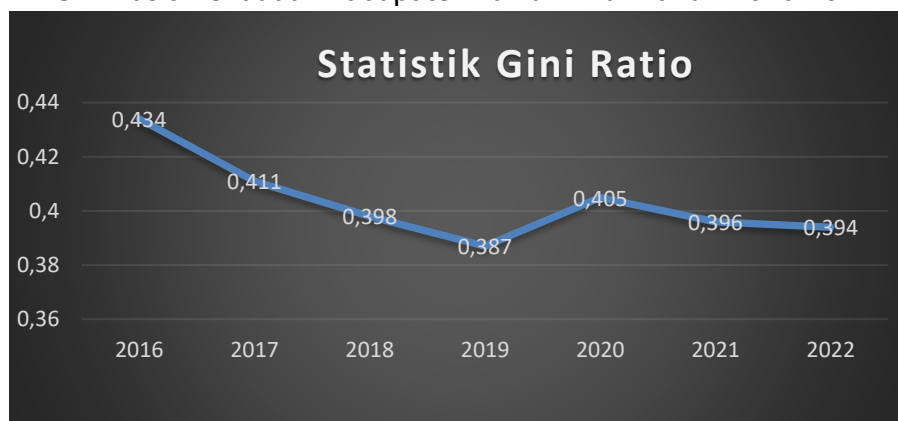
Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 jika diukur dengan menggunakan kriteria Bank Dunia termasuk ke dalam kategori ketimpangan sedang. Ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang terjadi diduga dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan penduduk antar wilayah di Kabupaten Luwu Timur. Beberapa wilayah/kecamatan di Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi sumber daya alam yang punya nilai tinggi seperti kecamatan Nuha yang merupakan lokasi pertambangan nikel.

Hal ini juga dapat lebih dijelaskan dari disparitas tingkat produktifitas antar sektor ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Sektor ekonomi yang memiliki tingkat produktifitas cukup rendah adalah sektor perdagangan/reparsi/hotel/rumah makan. Sektor ekonomi berikutnya dengan tingkat produktifitas yang rendah yaitu sektor jasa-jasa dan sektor pertanian dan sektor lainnya (sektor pertambangan, konstruksi, listrik, air, real estate, dan lain-lain) memiliki tingkat produktifitas yang cukup tinggi. Distribusi pendapatan yang masuk dalam kategori sedang ini merupakan peringatan dini bagi pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar bisa mengantisipasi kesenjangan distribusi pendapatan yang ada di kalangan masyarakat. Angka kesenjangan yang terjadi sekalipun masih dalam klasifikasi sedang, dalam jangka panjang dapat melebar dan penyebab terjadinya kecemburuan sosial diantara masyarakat, yang pada akhirnya menjadi pemicu munculnya kerawanan serta konflik sosial di masyarakat.

Walaupun Gini ratio Kabupaten Luwu Timur berada pada kategori sedang, akan tetapi dengan hasil Gini ratio sebesar 0,394 sudah mengindikasikan bahwa selama periode tersebut, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran pendudukan dan ini memberikan hasil penurunan jika dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya (2021) sebesar 0,396.

Sebagai ukuran tingkat pemerataan atau kesenjangan, rasio dapat memberikan gambaran mengenai tingkat dan status kesenjangan pendapatan suatu wilayah. Menurut *Michael Todaro*, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, bahwa nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Grafik 2.5
Gini Rasio Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2022



Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Tabel 2.10
Rincian Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Gini Ratio Tahun 2017-2021		
No	Tahun	Laju Ketimpangan Pendapatan
1	2016	0,434
2	2017	0,411
3	2018	0,398
4	2019	0,387
5	2020	0,405
6	2021	0,396
7	2022	0,394

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Tabel 2.11
Capaian kinerja makro menggunakan Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,34	73.92	0,791
2	Angka Kemiskinan	6,94	6,81	-1,873
3	Angka Pengangguran	4.960	4480	-9,677
4	Pertumbuhan Ekonomi	16.030.50	16.349.57	1,99
5	Pendapatan Per Kapita	23.614,52	28.407,91	20,298
6	Ketimpangan Pendapatan	0,396	0.394	-0,505



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun capaian kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kab. Luwu Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut:

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Hasil

Berikut ini adalah capaian kinerja keluaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menjadi kewenangannya tahun 2022 berdasarkan urusan.

1) Urusan Pendidikan

Tabel 2.12
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerintahan	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	167		
2		Jumlah peserta didik PAUD(Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasarpeserta didik dari Pemerintah Daerah	6606		
3		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	6606		
4		Jumlah minimal Kebutuhan pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	0		
5		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	714		
6		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1)bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi gurupendidikan anak usia dini	109		
7		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikandan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formalatau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- formal dari lembaga pemerintah	149		S1 =149 Sertifikasi – 41 dan cakep=46
8		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	187		
9		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5322		



10		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3976		
11		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	31.904		
12		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12.709		
13		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	579		
14		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	319		
15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1827		
16		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	801		
17		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	185		
18		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	52		
19		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	497		
20		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	243		
21		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	785		S1=785 Sertifikasi=725
22		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	721		S1=721 Sertifikasi=394
23		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	171		S1=171 Sertifikasi=152
24		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	50		S1=50 Sertifikasi=41
25		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0		
26		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0		
27		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	187		
28		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar	5322		



		yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
29		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3976		
30		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	31.904		
31		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12.790		
32		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	579		
33		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	319		
34		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1827		
35		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	801		
36		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	185		
37		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	52		
38		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	497		
39		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	243		
40		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	785		
41		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	721		
42		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	171		
43		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	50		
44		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	-		
45		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	-		
46		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	7		
47		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	-		



48		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	-		
49		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	-		
50		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	111		
51		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	104		
52		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	8		S1=8 Sertifikasi=5
53		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8		

Tabel 2.13
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome / Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi PAUD dalam	56,62%	Disdik	
2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	96,68%	Disdik	
3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	86,05%	Disdik	
4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,84%	Disdik	

2) Urusan Kesehatan

Tabel 2.14
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	DINKES	2 YAITU = RS I LAGALIGO DAN RS AWAL BROS SOROWAKO
2		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	DINKES	2 YAITU = RS I LAGALIGO



					(PARIPURNA) DAN RS AWAL BROS SOROWAKO (UTAMA)
3		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis barang/ Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	4 Tenaga per Puskesmas	DINKES	
4		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	4 Tenaga per Puskesmas	DINKES	
5		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis barang/Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	4 Jenis tenaga	DINKES	
6		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8 Jenis barang/Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	5 Jenis tenaga	DINKES	
7		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	7 Jenis tenaga	DINKES	
8		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis barang/Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Jenis tenaga	DINKES	
9		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis barang/ Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Jenis Tenaga	DINKES	
10		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis barang/ Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Jenis Tenaga	DINKES	
11		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis barang/ Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Jenis Tenaga	DINKES	
12		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis barang/ Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Jenis Tenaga		
13		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis barang/Alat	DINKES	



		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Jenis Tenaga	DINKES	
14		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis barang/Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Jenis Tenaga (85) + 2 = (87) Untuk PKM Nuha dan Mangkuta na masing masing tambahan 1 orang Apoteker	DINKES	

Tabel 2.15
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{223}{306.082} = 0,0007$ $\frac{86}{306.938} = 0,0002$ $\text{TOTAL TT} = \frac{309}{306.938} = 0,0010$	Dinkes	TT RS I LAGALIGO = 223 RS SOROWAKO = 86 TOTAL TT = 309
2	Dinas Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{2}{2 \text{ kali } 100} = 100$	Dinkes	2 YAITU = RS I LAGALIGO (PARIPURNA) DAN RS AWAL BROS SOROWAKO (UTAMA)
3	Dinas Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,81	Dinkes	$\frac{5217}{5621} \times 100 = 92,81$
4	Dinas Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,90	Dinkes	$\frac{5250}{5255} \times 100 = 99,90$
5	Dinas Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,21	Dinkes	$\frac{5157}{5251} \times 100 = 98,21$



6	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	93,34	Dinkes	$\frac{27.602}{29.570} \times 100$ =93,34
7	Dinas Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,74	Dinkes	$\frac{17.167}{17.930} \times 100$ =95,74
8	Dinas Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (usia produktif)	67,15	Dinkes	$\frac{131.368}{195.641} \times 100$ =67,15
9	Dinas Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80,29	Dinkes	$\frac{15.331}{19.094} \times 100$ =80,29
10	Dinas Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65,56	Dinkes	$\frac{37.580}{57.319} \times 100$ =65,56
11	Dinas Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinkes	$\frac{5031}{5031} \times 100$ = 100
12	Dinas Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	64,95	Dinkes	$\frac{454}{699} \times 100$ = 64,95
13	Dinas Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinkes	$\frac{409}{409} \times 100$ =100
14	Dinas Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Dinkes	$\frac{5014}{5014} \times 100$ =100

3) Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2.16
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerin tahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat



2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
4		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/kota (m)		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten /kota		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten /kota		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/ kota		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
8		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten /kota (ha)		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
9		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
10		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
11		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat



12		Rencana Tata Pengaturan air dan tatapengairan/ Rencana Pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
13		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
14		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota		PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
15		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	66,95%		
16		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	71,23%		
17		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	72,41%		
18		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 dok	Review RISPAM Tahun 2021	
19		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	0	Surat Pernyataan	
20		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1	PDAM	
21		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Surat Pernyataan	
22		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	Surat Pernyataan	
23		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	74,929 Rumah	STMB (JSP & JSSP)	
24		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	360 rumah	Cipta Karya	



25		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	75,289 Rumah	Dinkes, Cipta Karya	
26		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0 Rumah	Surat Pernyataan	
27		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0 Rumah	Surat Pernyataan	
28		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	75.289	Dinkes, Cipta Karya	
29		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	100 %	Cipta Karya	
30		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	100 %	Cipta Karya	
31		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	100 %	Cipta Karya	
32		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	96,31%	Cipta Karya	
33		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	20%	Cipta Karya	
34		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0%	Cipta Karya	
35		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100%	Cipta Karya	
36		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0%	Cipta karya	
37		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	100%	Surat Pernyataan	
38		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	320%	Target:25 IMB Realisasi:80 IMB	
39		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	100%	Perda No.15/2020 Tentang Bangunan Gedung	



40		Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli bangunan/Gedung	1 dok	Keputusan bupati luwu timur nomor 309/D-05/X/Tahun 2022	
41		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	SP	
42		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	SP	
43		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	4 Gedung		Realisasi tahun 2022
44		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	1 gedung		pemeliharaan bangunan gedung
45		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1889,273%	SK Bupati no. 187/VIII Tahun 2016	Tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan Jalan Desa
46		Panjang jalan yang dibangun	46,47 km		Realisasi tahun 2022
47		Panjang jembatan yg dibangun	90,60 M		Realisasi tahun 2022
48		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	46,47 Km	Data Evaluasi Kinerja	Realisasi tahun 2022
		Aspal	8,131 km		
		Beton	5,679 km		
		Kerikil	32,66 km		
49		Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan	12,80 M		Realisasi tahun 2022
50		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	2,50 km		Realisasi tahun 2022
51		Panjang jembatan yang direhabilitasi	42,00 km		Realisasi tahun 2022
52		Panjang jalan yang dipelihara	2,50 Km		
53		Panjang jembatan yang dipelihara	42,00 M		



54		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	100%		
55		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	192 orang	Daftar hadir yang menerima sertifikat tahun 2022	Kegiatan tahun 2022
56		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	50 orang	Daftar hadir yang menerima sertifikat tahun 2022	Kegiatan tahun 2022
57		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1 SK	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 376/D-05/XII/Tahun 2021	Tentang pembentukan tium Pembina Jasa Kontruksi Kabupaten Luwu Timur
58		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	860 Potensi pasar apbd		
59		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	64 Potensi pasar apbd		
60		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	2 potensi pasar APBN		PT Vale dan PT CLM
61		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	924 potensi pasar	Paket	
62		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1 informasi personil	Keputusan Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi	Tentang Penunjukan Personil Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa



					Konstruksi
63		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	192 Org	Daftar hadir yang mengikuti pelatihan tahun 2022	Kegiatan tahun 2022
64		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	50 org	Daftar hadir yang mengikuti pelatihan tahun 2022	Kegiatan tahun 2022
65		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	50 org	Daftar hadir yang mengikuti pelatihan tahun 2022	Kegiatan tahun 2022
66		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	43 org	Daftar Badan Usaha Dinas PUPR	Dilaksanakan tahun 2022
67		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	0	Rekomendasi IUJK 0 Karena sejak bulan juli tahun 2021 terakhir diterbitkan di dinas pupr
68		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan Ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	237 data ketidaksesuaian	Data dinas pupr	Data hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis klasifikasi kegiatan jasa konstruksi yang menjadi kewenangannya pengawasannya sama
69		Tersedianya data dan informasi kecelakaan	100% informasi	Kab luwu timur	Tidak ada kecelakaan



		konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	kecelakan konstruksi		kontruksi
70		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	237 hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis	Data dinas pupr	Data pengawasan dengan klasifikasi segmentasi pasar sama
71		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	329 Badan Usaha	Daftar Badan Usaha Dinas PUPR	Daftar Rekomendasi SIUJK Tahun 2013 s/d 2021
72		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0 TDUP	Surat Pernyataan	Belum ada
73		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	205 Badan Usaha	Daftar Badan Usaha Dinas PUPR	Daftar Rekomendasi SIUJK Tahun 2013 s/d 2021
74		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	43 Badan Usaha	Daftar Badan Usaha Dinas PUPR	Dilaksanakan tahun 2022
75		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	0	Rekomendasi SIUJK 0 karena sejak bulan juli tahun 2021 terakhir diterbitkan di dinas pupr
76		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	237 hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis	Data dinas pupr	Data hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis klasifikasi kegiatan jasa konstruksi yang menjadi kewenangannya sama
77		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100%	Kab luwu timur	Tidak ada kecelakaan konstruksi
78		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi,	237 hasil pengawasan	Data dinas pupr	Jumlah pengawasan kualifikasi



		layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ketidakses uaian jenis		uaha dengan segmentasi pasar jasa kontruksi sama dengan kewenangan pengawasannya sama
--	--	--	------------------------	--	---

Tabel 2.17
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerin tahan	IKK Outcome /Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100%		Sungai/Pantai/Rawa bukan kewenangan Kab.tetapi kewenangan Pemerintah Pusat
2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, nerosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	100%		Sungai/Pantai/Rawa bukan kewenangan Kab.tetapi kewenangan Pemerintah Pusat
3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	55,89 %	Data dasar prasarana irigasi Kab. Tahun 2020	
4		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	60,94 %	Data Evaluasi Kinerja	
5		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,31 %	Data Evaluasi Kinerja	
6		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	90,71%		
7		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	70,56%	Data dasar prasarana jalan Kabupaten	
8		Rasio tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	38,42 %	Data Bidang Jasa Konstruksi	
9		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	Data Bidang Jasa Konstruksi	Tanpa kecelakaan



4) Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 2.18
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	-	-	belum diidentifikasi jumlah rumahnya karena data yang tersedia hanya luasan potensi kebencanaan
2		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	DPKPP	
3		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	DPKPP	
4		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPKPP	
5		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DPKPP	
6		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPKPP	
7		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DPKPP	
8		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	DPKPP	
9		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DPKPP	
10		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPKPP	
11		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/ atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPKPP	
12		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPKPP	
13		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPKPP	
14		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPKPP	



No	Urusan pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
15		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DPKPP	
16		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	95 Ha	SK Bupati tentang Kawasan Kumuh pada bid. Sarpras DPKPP	Tersebar untuk 12 kawasan permukiman kumuh
17		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1.843 unit	Bid. Perumahan DPKPP	BSPS 623 Unit (tersebar di 31 desa), BSBK/BKK 1220 Unit (122 Desa)
18		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2,57 Ha	Bid. Sarpras	
19		Jumlah rumah di kab/kota	65.153 Unit	Bid. Perumahan	
20		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	7187 rumah	Bid. Perumahan	BSPS (160 rumah) tahun 2021.
21		Jumlah rumah tidak layak huni	7.134	Bid. perumahan	
22		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Bid. perumahan	tidak ada data
23		Rasio rumah dan KK	0,6917	Bid. perumahan	
24		Jumlah rumah pembangunan baru	1,145	Bid. perumahan	Jumlah unit rumah pada rekomendasi PBG yang ditebitkan Dinas PUPR Bid. Cipta Karya
25		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	3 perumahan	DPKPPP 2022	2 perumahan nelayan dan 1 perumahan PNS/ASN
26		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	-	-	Kewenangan Dinas PUPR, Bid. Cipta Karya
27		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-	Bid. Sarpras	
28		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	-	Bid. Sarpras	Kewenangan Dinas PUPR, Bid. Cipta Karya
29		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	-	Bid. Sarpras	Kewenangan Dinas PUPR, Bid. Cipta Karya
30		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	16.040 rumah	Bid. Sarpras	
31		Jumlah pengembang yang	0	Surat	tidak ada



No	Urusan pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
		tersertifikasi		Pernyataan	data
32		Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Surat Pernyataan	tidak ada data
33		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Surat Pernyataan	tidak ada data

Tabel 2.19
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Bid. Perumahan	Surat Pernyataan (tidak ada SK Penetapan status bencana alam yang terjadi selama rentang waktu tahun 2022
2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	Bid. Perumahan	Surat pernyataan (Tidak ada masyarakat terdampak program pemerintah kabupaten selama rentang waktu tahun anggaran 2022
3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	2,705%	Bid. Sarpras DPKPP	2,57 Ha yang ditangani tahun 2022
4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	10,95%	Bid. Perumahan	BSPS Tahun 2022 (623)
5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1,925%		1254 perumahan yang sudah dilengkapi psu

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.20
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	418	Bidang tribum tranmas	Daftar pelanggaran/ gangguan Trantibum tahun 2022
2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	128	Bidang linmas	SK Satlinmas atau Rekapitulasi Jumlah Satlinmas Desa/ Kelurahan
3		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	32	Bidang Gakda	Daftar Perda/Perkada yang ditegakkan
4		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	Sekretariat PPNS	Fotocopy SK PPNS
5		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	10 SOP	Bagian SDM dan Sarpas	Dokumen SOP Tahun 2022
6		Tersedianya sarana prasarana minimal	23,99%	Pengurus Barang Satpol PP	Daftar Sarpras Minimal sesuai Permendagri 17/2019
7		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%		
8		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	92.16%		Pelaksanaan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE0 Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 262 orang, Pusdalops BPBD 6002 Org, Papan himbauan informasi bencana di 9 kecamatan 234.687 org dan rambu evakuasi di 8 desa di kec malili 26.578 org, workshop mitigasi bencana sebanyak 124 org dan pelaksanaan mitigasi bencana desa nuha dan matano (2525 org) dan pelaksanaan mitigasi bencana sosialisasi di 17 desa di kec towuti 41.135 org dengan akumulasi secara keseluruhan sebesar 278.347 org dibagi jumlah penduduk kab luwu timur tahun 2020 sebanyak 302.039 org
9		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%		Dokumen rencana penanggulangan bencana
10		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%		Dokumen renkon(rencana kontijensi)



11		Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	0,03%		Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) BPBD Kab Luwu Timur sebanyak 40 org, sekolah lapang gempa bumi 50 org
12		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,16%		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sebanyak 90 org, bmkgoest to school sebanyak 300 org, simulasi gempa bumi 100 org
13		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%		Alat WRS InaTues (Indonesia Tsunami Early Warning System) adalah system peringatan dini gempa bumi yang berpotensi tsunami secara realtime dan dalam kurun waktu dari 5 menit dapat menjangkau seluruh wilayah di indonesia, alat deteksi gempa bumi local sesar matano di 3 lokasi yaitu desa matompi, desa kalpataru dan desa atue serta alat deteksi banjir sungai kalaena di desa pertasi kencana kecamatan kalaena
14		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0,007%		Keterbatasan anggaran
15		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%		Penanganan KLB Covid-19
16		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%		Tiidak adanya bencana alam yang terjadi dalam skala besar dan membutuhkan Keputusan Bupati tentang penetapan status keadaan darurat bencana
17		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%		Jumlah asn dan upah jasa bpbd tahun 2022 sebanyak 40 org
18		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	607 korban bencana	Jumlah korban bencana januari s.d. desember 2022 sebanyak 607 jiwa (313 laki-laki dan 294 perempuan)
19		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi	145 kali	Dinas Damkar dan Penyelamatan	



		darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/ kota			
20		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	9 posko di kecamatan + 1 mako (kantor dinas damkar dan penyelamatan	dinas damkar dan penyelamatan	
21		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada	dinas damkar dan penyelamatan	Dari 11 kecamatan di kab luwu timur baru 9 kecamatan yang memiliki pos sektor damkar beserta personil dan sarpras
22		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/ desa	Tidak ada	dinas damkar dan penyelamatan	Posko damkar masih wilayah kecamatan
23		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	ada	dinas damkar dan penyelamatan	
24		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	51 orang	dinas damkar dan penyelamatan	Pejabat/staf: 13 orang Anggota damkar:145 orang
25		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	110 orang	dinas damkar dan penyelamatan	
26		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	6 jenis kegiatan	dinas damkar dan penyelamatan	1. Diklat damkar I 2. Diklat water rescue 3. Sekolah lapang gempa bumi 4. Diklat BST KLM & SKK 60 mil 5. Pelatihan selam dasar I 6. Pelatihan bantuan hidup dasar (BHD)



Tabel 2.21
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerin tahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Bidang Tribumas	Laporan/ temuan/ gangguan/pelangan ggaran trantibum dapat tertangani/ diselesaikan keseluruhan
2)		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100%	Bidang Penegakan Perda	6 perda/ perkara yang memiliki kasus tahun 2022 dari total 32 perda yang memuat sanksi
3)		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	92,16%		Pelaksanaan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE0 Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 262 orang, Pusdalops BPBD 6002 Org, Papan himbauan informasi bencana di 9 kecamatan 234.687 org dan rambu evakuasi di 8 desa di kec malili 26.578 org, wokrshop mitigasi bencana sebanyak 124 org dan pelaksanaan mitigasi bencana desa nuha dan matano (2525 org) dan pelaksanaan mitigasi bencana sosialisasi di 17 desa di kec towuti 41.135 org dengan akumulasi secara keseluruhan sebesar 278.347 org dibagi jumlah penduduk kab luwu timur tahun 2020 sebanyak



					302.039 org
4)		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Jumlah Penduduk tahun 2020 yang menjadi indikator	Alat WRS InaTwes (Indonesia Tsunami Early Warning System) adalah system peringatan dini gempa bumi yang berpotensi tsunami secara realtime dan dalam kurun waktu dari 5 menit dapat menjangkau seluruh wilayah di indonesia, alat deteksi gempa bumi local sesar matano di 3 lokasi yaitu desa matompi, desa kalpataru dan desa atue serta alat deteksi banjir sungai kalaena di desa pertasi kencana kecamatan kalaena
5)		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	607 korban bencana tahun 2022	Jumlah korban bencana januari s.d. desember 2022 sebanyak 607 jiwa (313 laki-laki dan 294 perempuan)
6		Persentase pelayanan penyelamatan evakuasi kebakaran dan korban	81,57%	dinas damkar dan penyelamatan	1. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran dalam tingkat waktu tanggap = 62 kejadian kebakaran 2. Jumlah total kejadian kebakaran tahun 2022: 76 kejadian kebakaran
7		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.	8,76 menit	Dinas Damkar & Penyelamat	1. Jumlah total waktu tanggap 666 menit 2. Jumlah kejadian kebakaran



					tahun 2022: 76 kejadian kebakaran.
--	--	--	--	--	------------------------------------

6) Urusan Sosial

Tabel 2.22
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	Dinsos	SIK-NG
2		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	115 Orang	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	SK Bansos dan daftar peserta pelatihan bagi anak di UPTD PPSBR Maros
3		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	-	Belum ada
4		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	105 Orang	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	SK Bansos dan daftar peserta pelatihan bagi anak di UPTD PPSBR Maros
5		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 Unit	Dinsos P3A	Mitsubishi Triton
6		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	105 Orang	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	SK Bansos (Penerima Jaminan Hidup)
7		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	-	Belum ada
8		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	105 orang	-	SK Bansos (Penerima Jaminan Hidup)
9		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	60 Orang	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	Daftar penerima alat bantu
10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	-	Tidak ada
11		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	30 paket	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa)



12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	30	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa)
13		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	-	Tidak ada
14		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	12 Orang	Dinsos P3A	SK TSKS (Tenaga kesejahteraan Sosial)
15		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	10 Orang	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	Daftar Peserta pelatihan di UPTD PPSBR Maros
16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	2 kali	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar (ODGJ)
17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	10 orang	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	Daftar Fasilitasi NIK, Akta kelahiran dan KIA
18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	10 orang	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	Daftar Peserta pelatihan di UPTD PPSBR Maros
19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	42 orang	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	Daftar layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga
20		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	42 orang	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga
21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	32 orang	Bidang Rehabdya sos-Dinsos	Daftar ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa yang dirujuk ke RS)
22		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	299 orang	Bidang Linjamsos Dinsos	Daftar Korban Bencana
23		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	299 Orang	Bidang Linjamsos	Daftar Korban



				Dinsos	Bencana
24		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	6 buah	Bidang Linjamsos Dinsos	Daftar Korban Bencana
25		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	18 paket	Bidang Linjamsos Dinsos	Daftar Korban Bencana
26		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	299 orang	Bidang Linjamsos Dinsos	Daftar Korban Bencana
27		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	12 orang	Dinsos P3A	SK TKSK (Tenaga kesejahteraan sosial)

Tabel 2.23
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	Dinsos	Capaian akhir sampai dengan tahun 2022 sebanyak 105 orang
2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinsos	Jumlah korban bencana alam 299 jiwa

7) Urusan Tenaga Kerja

Tabel 2.24
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	-		Dokumen perencanaan tenaga kerja lutim masih dalam proses penyusunan dokumen
2		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	-		
3		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	153		Jumlah perusahaan terdaftar pada tahun 2022 yaitu 153 perusahaan
4		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi kluster	33,33%		1 program PBK dengan kualifikasi kluster dari total 3 program pada urusan tenaga kerja



5		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	42,85%		Jumlah instruktur bersertifikat 12 orang dan jumlah instruktur total 28 orang
6		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	6,22%		Jumlah instruktur 28 orang dan jumlah peserta pelatihan 450 orang
7		Persentase LPK yang terakreditasi	28,57%		Jumlah LPK yang terakreditasi 2 LPK dan jumlah LPK terdaftar 7 LPK
8		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%		Jumlah LPK terdaftar sebanyak 7 LPK
9		Jumlah penganggur yang dilatih	146		146 orang yang lulus pelatihan bersertifikat
10		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%		
11		Persentase penyerapan lulusan Lulusan bersertifikat kompetensi	23,97%		Sebanyak 35 orang telah bekerja dari 146 orang yang dilatih
12		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	80		Sebanyak 80 orang CPMI/CTKI yang diberikan bimbingan dan penyuluhan
13		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	1		Sub kegiatan penyuluhan
14		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	58,16%		89 perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas dari 153 perusahaan
15		Data tingkat produktivitas total	Rp.153.102.405		
16		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	24,18%		Jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan sebanyak 37 perusahaan dari total 153 perusahaan
17		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	5,23%		Jumlah perusahaan memiliki PKB sebanyak 8 perusahaan dari total 153 perusahaan
18		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang	37 SP-SB dan 1 SP Luar		



		tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Perusahaan		
19		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	58,16%		89 perusahaan menyusun struktur skala upah dari total 153 perusahaan
20		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%		Sebanyak 153 perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS
21		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	6%		Sebanyak 10 perusahaan yang berselisih dari total 153 perusahaan yang terdaftar
22		Jumlah mogok kerja	4		
23		Jumlah penutupan perusahaan	0		Tidak ada penutupan perusahaan pada tahun 2022
24		Jumlah perselisihan kepentingan	4		
25		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		Tidak ada perselisihan antar serikat pekerja tahun 2022
26		Jumlah perselisihan PHK	13		
27		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	19		
28		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	32		
29		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 LKS Tripartit		
30		Persentase perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	44,44%		4 kasus yang diselesaikan secara PB dari total 9 kasus yang ditangani oleh mediator
31		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	94		
32		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	9469		
33		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	2 BKK		
34		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/ kota	0		
35		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2		



36		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	8		
37		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	7,826		
38		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0		
39		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	53		
40		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	53		
41		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan	0		
42		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	7		
43		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0		
44		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1		LTSA berkedudukan di kota pare-pare untuk wilayah kerja Indonesia timur

Tabel 2.25
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1)		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-		Dokumen perencanaan tenaga kerja lutim masih dalam proses penyusunan dokumen
2)		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	13,83%		Jumlah tenaga kerja bersertifikat 2862 orang. Jumlah tenaga kerja terdaftar 20.688 orang
3)		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	18,42%	BPS Luwu	Nilai PDRB dan tenaga kerja



				Timur tahun 2022	
4)		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	29,41%		Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak sebanyak 45 perusahaan dari 153 perusahaan
5)		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	15,57%		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 1474 orang dan jumlah pencari kerja terdaftar 9469 orang

8) Urusan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 2.26
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	41 SKPD	Bidang PPPA-Dinsos	Daftar lembaga pemerintah
2		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	63 Kegiatan	Bidang PPA	Daftar Kegiatan
3		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2 Media massa	UPTD PPA	Ekspose demokrasi dan pena lutim
4		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Unit	Dinsos P3A	SK UPTD
5		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	UPTD P2TP2A	56 orang
6		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	UPTD PPA	
7		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/ kota (APBD kab/kota)	1 Unit		P2TP2A
8		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	44 Lembaga	Bidang PPPA-Dinsos	Daftar Nama Lembaga di TTD Kadis
9		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	95 Orang		Daftar Nama Kader
10		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	44 Lembaga		Daftar Nama Lembaga di TTD Kadis



11		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 Lembaga		PKK dan DWP
12		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Program		Foto Copy RKA
13		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1 unit		UPTD P2TP2A
14		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Bidang PPPA-Dinsos	

Tabel 2.27
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	46,14 %	Bidang PPA Dinsos	ARG = 50.906.039.057 APBD = 1.724.113.886.050
2		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 %	Bidang PPA Dinsos	56 Kasus Kekerasan fisik pada anak yang ditangani 56 Kasus Laporan yang masuk
3		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	47,496 %	Bidang PPA Dinsos	Jumlah kasus perempuan = 71 Jumlah perempuan di kabupaten = 149.487 orang

9) Urusan Pangan

Tabel 2.28
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dokumentasi terlampir
2		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	- Gapoktan Maramba Desa Maramba, Kec. Wotu - Gapoktan Maju Lancar Desa Purwosari, Kec. Tomoni Timur



				Pangan	- Gapoktan Cahaya Tani Desa Benteng Kec. Burau - Gapoktan Cinta Alam Desa Kalatiri Kec. Burau - Gapoktan Setia Jaya Desa Wonorejo Kec. Mangkutana
3		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	100%		Surat Pernyataan
4		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1. Bansos P2L 5 KWT (Tahap Pengembang) yang bersumber anggaran dari dana DAK Non Fisik: - KWT Terong Desa Sumber Makmur, Kec. Kalaena - KWT Wanasari Desa Pepuro Barat Kec. Wotu - KWT Bunga Sari Desa Mabonta Kec. Burau - KWT Mekar Sari Desa Puncak Indah, Kec. Malili - KWT Andi Jemma Farm Desa Soroako Kec. Nuha 2. Bansos P2L KWT (Tahap Penumbuhan) yang bersumber anggaran dari dana DAK Non Fisik yaitu: - KWT Panca Sejahtera desa Pancakarsa Kec. Mangkutana - KWT Harapan Baru Desa Ujung Baru Kec. Tomoni - KWT Tabur Benih II Desa Purwosari Kec. Tomoni Timur - KWT Paku Desa Matano Kec. Nuha (DAK Non Fisik)
5		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ada 4 desa masuk dalam prioritas 2 (daerah sangat rentan rawan pangan) dimana desa rentan rawan pangan yaitu: - Desa Tarabbi Kec. Malili - Desa Matano Kec. Nuha - Desa Balambano Kec. Wasuponda - Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana Dokumen Laporan penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan.
6		Tertanganinya kerawanan pangan	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan	- Gapoktan Maramba Desa Maramba, Kec. Wotu - Gapoktan Maju Lancar Desa Purwosari, Kec.



				an Pangan	Tomoni Timur - Gapoktan Cahaya Tani Desa Benteng Kec. Burau - Gapoktan Cinta Alam Desa Kalatiri Kec. Burau - Gapoktan Setia Jaya Desa Wonorejo Kec. Mangkutana
					Bansos P2L 5 KWT (KWT Terong Desa Sumber Makmur, Kec. Kalaena, KWT Wanasari Desa Pepuro Barat Kec. Wotu, KWT Bunga Sari Desa Mabonta Kec. Burau, KWT Mekar Sari Desa Puncak Indah, Kec. Malili dan KWT Andi Jemma Farm Desa Soroako Kec. Nuha
7		Tersalurkannya adangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Stok yang digudang cadangan pangan pemerintah sampai tahun 2021 adalah 10.004 kg, tidak disalurkan karena tidak ada bencana alam
8		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Terdapat 12 sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Beras, Buah dan Sayur.

Tabel 2.29
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	10,28%	DKP2 dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan	

10) Urusan Pertanahan

Tabel 2.30
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	3	DPKPP	
2		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0		Surat Pernyataan



3		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0		Surat Pernyataan
4		Dokumen Izin membuka tanah	0		Surat Pernyataan
5		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0		Surat Pernyataan

Tabel 2.31
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0		Surat Pernyataan
2		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	87,901		Jumlah penetapan tanah untuk fasum = 3.342.096 m2
3		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%		Luas tanah yg telah dimanfaatkan 168.103.9 M2
4		Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%		53.168.510 M2
5		Tersedianya tanah untuk masyarakat	-		Surat Pernyataan (Perbup Bupati 11 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu)
6		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	DPKPP	5 Kasus sengketa tanah

11) Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1		Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	66,52 (Sedang)	DLH Luwu Timur	Dokumen IKLH Tahun 2022
2		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota :	71,52%	DLH Luwu Timur (Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pertamanan	• Jumlah armada pengangkut sampah • Data sebaran container • Neraca pengelolaan sampah tahun 2021-2022 • Laporan capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2022 • Data jumlah petugas kebersihan berdasarkan jabatan • Data nama petugas kebersihan dan luasan kerja • Foto TPA Ussu • Peta jalur pengangkutan sampah
3		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	DLH Luwu Timur (Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan	- Rekap persetujuan lingkungan tahun 2022 Rekap izin PPLH Tahun 2022
4		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	14,28%	DLH Luwu Timur (Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan	- Daftar pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup Kab Luwu Timur - SK fungsional pengawas lingkungan hidup a.n.rini wahyuni, s.si dan furkhan



					hidayat, s.si
5		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota 1 Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	0%	DLH Luwu Timur (Bidang Pencemaran dan kerusakan Lingkungan)	PERDA Kabupaten Luwu Timur nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
6		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0%	DLH Luwu Timur (Bidang Pencemaran dan kerusakan Lingkungan)	-
7		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100%	DLH Luwu Timur (Bidang Pencemaran dan kerusakan Lingkungan)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mendapat pelatihan tahun 2022
8		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	DLH Luwu Timur (Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan)	Laporan/ aduan yang masuk

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	79,71 (Baik)	DLH Luwu Timur	Dokumen IKLH Tahun 2022
2		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	71,52%	DLH Luwu Timur (Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Pertamanan)	- Jumlah armada pengangkut sampah - Data sebaran container - Neraca pengelolaan sampah tahun 2021-2022 - Laporan capaian



					pengurangan dan penanganan sampah tahun 2022 • Data jumlah petugas kebersihan berdasarkan jabatan • Data nama petugas kebersihan dan luasan kerja • Foto TPA Ussu • Peta jalur pengangkutan sampah
3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0%	DLH Luwu Timur (Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan	Rekap daftar pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengawasan dan pembinaan

12) Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Penerbitan Akta Perkawinan	100%	DIKDUKC APIL	
2		Penerbitan akta perceraian	100%		
3		Penerbitan akta kematian	100%		
4		Penyajian data kependudukan	100%		

Tabel 2.35
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerinahan	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Perekaman KTP-el	97,17%	DUKCA PIL	
2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	39,86%		
3		Kepemilikan akta kelahiran	94,83%		
4		Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	53,85%		



13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tabel 2.36
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerin Tahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	37 Desa	Bidang Pengembangan SDM dan SDA DPMD	
2		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	100%	Bidang Pengembangan SDM dan SDA DPMD	
3		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	74 %	Laporan Akhir Kegiatan	
4		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	19%	Bidang Kelembagaan Desa Pemberdayaan Masyarakat DPMD	
5		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	37 Desa	Bidang Pengembangan SDM dan SDA DPMD	
6		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	100%	Bidang Kelembagaan Desa Pemberdayaan Masyarakat DPMD	
7		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	94%	Bidang Kelembagaan Desa Pemberdayaan Masyarakat DPMD	
8		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	19%	Bidang Kelembagaan Desa Pemberdayaan Masyarakat DPMD	

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	Laporan bidang Penataan Desa	Capaian Kinerja untuk presenta



					se desa tertinggi al pada triwulan II Tahun 2022 telah mencapai 100%, yang berarti kab luwu timur dengan desa tertinggi al tidak ada lagi. Dimana 6 desa tertinggi al yang menjadi target telah berubah status menjadi desa berkembang
2		Persentase peningkatan status desa mandiri	11,24%	Laporan bidang Penataan Desa	

14) Urusan Statistik

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Tersedianya buku profil daerah			Belum ada
2		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	2	Rumantik.bps.go.id	Bukti dukung terlampir
3		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2	Rumantik.bps.go.id	Bukti dukung terlampir
4		Jumlah survey statistik sektoral yang endapat rekomendasi BPS	1	Rumantik.bps.go.id	Bukti dukung terlampir
5		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1	Rumantik.bps.go.id	Bukti dukung terlampir



6		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	Indah.bps.go.id	Bukti dukung terlampir
7		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100%	Indah.bps.go.id	Bukti dukung terlampir

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	BPS	Bukti dukung terlampir
2		Persentase OPD yang Menggunakan Data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	BPS	Bukti dukung terlampir

15) Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 2.40
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada		Tidak diperdakan
2		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20 Tahun	Susenas Tahun 2019	
3		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	35,14%	Susenas Tahun 2019	
4		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100%	Survei SKAP	
5		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	159 (terdiri dari 127 PPKBD, 11 Kecamatan dan 21 Faskes)	Laporan statistik Rutin form dalap dan Pelkon (DPPKB) Tahun 2022	
6		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Laporan statistik rutin form dalapn dan pelkon (DPPKB)	
7		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35,63%	Pendataan Keluarga 2022 (DPPKB)	
8		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK	Ada	DPPKB (SK DWG)	



		yang efektif			
9		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	82,70%	Laporan statistik rutin form dalapn dan pelkon (DPPKB)	
10		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	52,49%	Laporan statistik rutin form dalapn dan pelkon (DPPKB)	Kecamatan Nuha
11		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	95,04%	Laporan statistik rutin form dalapn dan pelkon (DPPKB)	

Tabel 2.41
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	P2KB	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,79%	Susenas 2019	
2		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	62,86%	Pendataan Keluarga 2022 (DPPKB)	
3		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	18,43%	Pendataan Keluarga 2021 Tabel 15 (DPPKB)	

16) Urusan Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.42
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
2		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
3		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	YA	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir



4		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	40%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
5		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yg sesuai standar	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
6		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
7		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
8		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
9		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
10		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
11		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
12		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
13		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
14		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
15		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi Inovasi yang mendukung smart city	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
16		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir



17		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
18		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
19		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
20		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi(STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir

Tabel 2.43
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir
3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Kominfo SP	Bukti dukung terlampir

17) Urusan Perhubungan

Tabel 2.44
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100%	Dinas Perhubungan	
2		Terlaksananya pelayanan uji berkala	95,07%	Dinas Perhubungan	Telah ditetapkan 2 tarif lintas penyeberangan terhadap 2 lintas penyeberangan dala kab lutim
3		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten,	100%	Dinas Perhubungan	



		serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi			
4		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%	Dinas Perhubungan	

Tabel 2.45
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Rasio konektivitas Kabupaten Kota	0,58	Dinas Perhubungan	
2		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,73	Dinas Perhubungan	

18) Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	26 Orang	DISPARM UDORA	
2.		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	-	DISPARM UDORA	
3.		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	30 orang	DISPARM UDORA	-
4.		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	35 Okp	Tidak ada juknis di pusat	
5.		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	83	DISPARM UDORA	
6.		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	3	DISPARM UDORA	

Tabel 2.47
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	26 Orang	DISPARM UDORA	
2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	35 OKP (Orang)	DISPARM UDORA	
3		Peningkatan Prestasi Olahraga	155 Medali	DISPARM UDORA	

19) Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerintahan	IKK Output/keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
----	---------------------	---------------------	-----------------	-------------	-----



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,68%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		
3		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	20,34%		
4		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	33,33%		
5		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,72%		
6		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		
7		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%		
8		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0,58%		
9		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,39%		
10		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,58%		
11		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,16%		
12		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	79,06%		
13		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,90%		



14		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2,11%		
15		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	5,20%	Bidang UKM	
16		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1,13%		
17		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	1,34%		
18		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,25%		
19		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,70%		
20		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	2,02%		

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	31,39%	Bidang Koperasi	54 Koperasi 172 Koperasi
2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,11%	Bidang Ukm	93 Wirausaha dan 4400 UMKM

20) Urusan Penanaman Modal

Tabel 2.50
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan pemerintahan	IKK Output/keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Dinas PMPTSP	Surat Pernyataan
2		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas PMPTSP	Surat Pernyataan
3		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	100%	PMPTSP	
4		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	Dinas PMPTSP	Surat Pernyataan
5		Kegiatan pameran penanaman modal	100%	Dinas PMPTSP	
6		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	Dinas PMPTSP	Surat Pernyataan
7		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	6	Dinas PMPTSP	Surat Pernyataan



					taan
8		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	19	Dinas PMPTSP	
9		Laporan realisasi penanaman modal	100%	Dinas PMPTSP	
10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	12	Dinas PMPTSP	
11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	100%	Dinas PMPTSP	
12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	100%	Dinas PMPTSP	

Tabel 2.51
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-1,91	Dinas PMPTSP	

21) Urusan Persandian

Tabel 2.52
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outpu/ keluaran	Capaian kinerja	Sumbe r data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Urusan Persandia n	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal ibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	-	Dinas Kominfo	Kegiatan tidak dilaksanakan
2		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100 %	Dinas Kominfo	
3		Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	-		Kegiatan tidak dilaksanakan
4		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100 % (2 titik)	Dinas Kominfo	



Tabel 2.53
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	57%	Dinas Kominfo (Indeks KAMI)	

22) Urusan Kebudayaan

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kebudayaan

No	Urusan	IKK Output/Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	25		- 25 Sanggar Seni
2		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	6		- 3 WBTB - 3 Cagar Budaya
3		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	6		- 3 WBTB - 3 Cagar Budaya
4		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	25		- 25 Sanggar Seni
5		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	3		- Kapal Jepang - Goa Andomu - Benteng Wotu
6		Perlindungan cagar budaya kabupaten/ kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	4		- Kapal Jepang - Goa Andomu - Benteng Wotu - Makam Rahampuú
7		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		Surat Pernyataan
8		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	4		- Kapal Jepang - Goa Andomu - Benteng Wotu - Makam Rahampuú



9		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	4		- Kapal Jepang - Goa Andomu - Benteng Wotu - Makam Rahampuú
10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-		-
11		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	-		-
12		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-		-
13		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	9		SK TIM AHLI CAGAR
14		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	7		SK TIM AHLI CAGAR
15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	7		SK TIM AHLI CAGAR
16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-		Surat Pernyataan
17		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	1		Sertifikat Pamong Budaya
18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-		Surat Pernyataan
19		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	-		Surat Pernyataan

Tabel 2.55
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Terlestarikannya cagar budaya	4	Disdikbud	Kapal Jepang Goa Andomu Pulau Empat Makam Rahampuú

23) Urusan Perpustakaan

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintah	IKK Output/ keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



1		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,776	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2		Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,545	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,003	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
4		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1,037	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
5		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	0,642	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
6		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
7		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
8		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Tabel 2.57
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
1)		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	48,24 (sedang)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Draf kajian kegemaran membaca masyarakat kabupaten luwu timur
2)		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Draf kajian IPLM kabupaten luwu timur

24) Urusan Kearsipan

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daftar Arsip terlampir (Penyimpanan di Filing Cabinet)



2		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daftar Arsip terlampir (Penyimpanan dalam dos)
3		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	18,17%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daftar Arsip terlampir (Penyimpanan di Depo)
4		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
5		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daftar Arsip terlampir (berita acara pemusnahan)
6		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
7		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	3.866	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daftar Arsip terlampir (Penyimpanan di Depo)
8		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yg sesuai NSPK	2.486	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daftar arsip terlampir
9		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
10		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Tabel 2.59
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urutan pemerintahan	IKK Outcome/hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
1		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	29,54%		
2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	13,92%		



25) Urusan Kelautan Dan Perikanan

Tabel 2.60
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Output/Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	158	Statistik Perikanan	
2		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	71%	Data Aset Dinas Perikanan	
3		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	60 Rekomendasi	Data Dinas Perikanan	Izin Usaha Perikanan (IUP) di Keluarkan oleh Dinas DPM & PTSP yang dikeluarkan dinas perikanan rekomendasi
4		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	514 orang (49 Kelompok)	Data Dinas Perikanan	
5		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	254.037 Ekor	Data Dinas Perikanan	

Tabel 2.61
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	101,06%	Statistik Perikanan	

26) Urusan Pariwisata

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah entitas pengelolaan destinasi	61		
2		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	101		
3		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	23		
4		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Tidak Ada		



5		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Tidak Ada		
6		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Tidak Ada		
7		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Tidak Ada	Disparmudora	
8		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Tidak Ada	Disparmudora	
9		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Tidak ada	Disparmudora	
10		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Tidak ada	Disparmudora	

Tabel 2.63
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-	DISPARMU DORA	Surat Pernyataan
2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota	713.6%		
3		Tingkat Hunian akomodasi	864 Kamar		
4		Kotribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp.11.651.310.941,20		Nilai hasil Pajak Hotel dan restoran
5		Kotribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-		Belum dibuat Perda

27) Urusan Pertanian

Tabel 2.64
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	95,55%	Dinas Pertanian	Terdapat 34 Hand Traktor, 3 Cultivator, 2 Combine, 2 RMU, 2 Bed Dryer dan terdapat alsin yang tidak dapat di hibahkan 1 RMU, 1 Bed Dryer di karenakan kelompok tersebut tidak ingin melanjutkan proses (SK Hibah terlampir).



2		Prasaran pertanian yang digunakan	98%	Dinas Pertanian	SK Hibah Nomor 308/D-16/X/Tahun 2022 terlampir dan terdapat dua kelompok yang tidak dapat di kerjakan dikarenakan kesalahan nomenklatur yaitu poktan kewalia desa tabarano, kecamatan wasuponda dan pokta usaha makmur desa kalaena kiri kecamatan kalaena
3		Penerbitan izin usaha pertanian	-	-	Dinas Pertanian hanya memfailitasi rekoemndasi izin usaha
4		Persentase prasarana yang digunakan	95%	Dinas Pertanian	
5		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	-	-	Dinas Pertanian hanya memfailitasi rekoemndasi izin usaha
6		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	-	-	Tidak ada bencana alam

Tabel 2.65
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,09%	Dinas Pertanian	
2		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1,11%	Dinas Pertanian	

28) Urusan Perdagangan

Tabel 2.66
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : • Pusat perbelanjaan • Toko swalayan	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab Luwu Timur	
2		Persentase penerbitan TDG	100%	Dinas Penanaman	



				Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab Luwu Timur	
3		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab Luwu Timur	
4		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : • Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri • Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri • Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab Luwu Timur	
5		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	-	Kementerian Perdagangan RI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab Luwu Timur	Wewenang Pemeriksaan dan pengawasan di Kementerian perdagangan
6		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	-	Dinas Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan	Bukan menjadi wewenang koperasi, usaha kecil dan menengah dan perindustrian kab luwu timur
7		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian	Terdapat 7 sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang telah dilakukan yaitu pada pasar taripa, pasar wanasari, pasar wonorejo, pasar wawondula, pasar malili, pasar parumpanai, dan gedung SRG Mangkutana
8		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	6,94%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian	
9		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	70,62%	Dinas pertanian, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil	Data terlampir



				Menengah dan perindustrian	
10		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	67,74%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian	Data terlampir
11		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian	

Tabel 2.67
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab Luwu Timur	Surat Pernyataan (belum ada permohonan izin yang diterbitkan)
2		Persentase kinerja pupuk	98,24%	Dinas pertanian, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian	Data terlampir
3		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	67,74%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian	Data terlampir

29) Urusan Perindustrian

Tabel 2.68
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tidak ada permohonan, belum ada izin yang diterbitkan



2		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100%	Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian	
3		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	-	- Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian - Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu (OSS)	
4		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tidak ada permohonan, belum ada izin yang diterbitkan
5		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	1,89%	- Website SIINAS - Dinas perdagangan koperasi ukm dan perindustrian	

Tabel 2.69
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	9,47%	Dinas perdagangan koperasi ukm dan perindustrian	
2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50%	Perda RPIK	
3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	- Dinas perdagangan koperasi ukm dan perindustrian - DPMPTSP	Surat Pernyataan (tidak ada izin usaha industri/IUI, yang dikeluarkan ditahun 2022



4		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	DPMPTSP	Surat Pernyataan (tidak ada permohonan, belum ada izin yang dikeluarkan)
5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	-	DPMPTSP	Tidak ada permohonan, belum ada izin yang diterbitkan
6		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	115%	Dinas perdagangan koperasi ukm dan perindustrian	

30) Urusan Transmigrasi

Tabel 2.70
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bidang Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1 Kawasan (SKPC.SP.1. Koromolai)	SK Penetapan Kawasan	
2		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 Kawasan (SKPC.SP.1. Koromolai)	SK Penetapan Kawasan	
3		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1 Kawasan (SKPC.SP.1. Koromolai)	SK Penetapan Kawasan	

31) Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Tabel 2.71
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan pemerintahan	IKK Output/ keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Daya	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	-	Bagian Pemerintahan	(Surat Pernyataan) Tidak terdapat pemanfaatan panas bumi di kabupaten luwu timur

Tabel 2.72
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Daya	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perusahaan pemanfaatan panas	-	Bagian Pemerintahan	Surat Pernyataan) Tidak terdapat pemanfaatan panas bumi di



		bumi yang memiliki ijin di kab/kota			kabupaten luwu timur
--	--	--	--	--	----------------------

32) Urusan Kehutanan

Tabel 2.73
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output / Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya dokumen rencana Pengelolaan Tahura	-	Dinas Kehutanan Pemprov Sulsel	Merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	-		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	-		
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	-		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.74
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,628	BKAD	Nilai Unaudited
		Rasio PAD	19,56%	Badan Pendapatan Daerah	Nilai PAD Sebelum diaudit oleh BPK RI
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,031	Insektorat Kab Luwu timur	Hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi. Sulawesi Selatan
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektora t Kabupaten	Level 3
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	58,426	BKAD	Nilai Unaudited
		Opini Laporan Keuangan	100%	BKAD	9 Kali WTP dan 1 Kali WDP
2	PENGADAAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Tidak terdapat kontrak konstruksi dengan nilai diatas 50 Milyar Rupiah yang



					anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	65,73%	SIRUP, LPSE, E-Katalog dan Toko Daring	Data diolah berdasarkan Tahun Anggaran 2022
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	45,45%	SIRUP, LPSE, E-Katalog dan Toko Daring	Data diolah berdasarkan Tahun Anggaran 2022
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	61,89%	E-Katalog	Data diolah berdasarkan Tahun Anggaran 2021 dan 2022
3	KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Pendidikan SMA kebawah 357 dan Pendidikan SMA keatas 970, jadi Total 1327)	396,484%	Buku Induk	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) -	30,37%	Buku Induk	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	46,11%	Buku Induk	
4	MANAJEMEN KEUANGAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	39,88%	BKAD	Nilai Unaudited
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	104,91%	Badan Pendapatan Daerah	Nilai PAD Sebelum diaudit oleh BPK RI
		Assets Management	100	BKAD	
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,273%	BKAD	Nilai Unaudited
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	96.645%	BKAD	Melalui Website http://bpkd.luwutimurkab.go.id/
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	BKAD	Melalui Website http://bpkd.luwutimurkab.go.id/



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah laporan akhir yang memuat pertanggungjawaban kinerja yang dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur atas pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2022 dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan pencapaian tahun pertama RPJMD Periode 2021-2026. Dalam penyusunan LAKIP ini dimulai dari pengumpulan data dan pemilahan data dari setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang disatukan dan diperiksa ulang secara seksama, sehingga menghasilkan suatu ikhtisar mengenai hasil capaian kinerja seluruh perangkat daerah yang menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pencapaian sasaran kinerja diperoleh dengan membandingkan target yang ditetapkan setiap tahun dengan realisasi target pada indikator sasaran kinerja. Ada 2 (dua) cara yang digunakan dalam membandingkan yaitu, pertama apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, yang kedua apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, telah menetapkan 11(sebelas) sasaran dengan 23(dua puluh tiga) indikator kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.



TABEL 2.75
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Strategis			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	1.	Indeks Pembangunan Manusia	73,80	73,92	100,16
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan berkelanjutan	2.	Indeks Desa Membangun	Maju	Berkembang	0,7031
3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	89,94	90,34	100,44
4	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	1,83	-1,84	-100,55
5	Ketersediaan lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha	5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,30	4,48	74%
6	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	6.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74,89	58,21	77,73
7	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	87,55	79,71	91,05 %
		8.	Indeks Resiko Bencana	202 (tinggi)	176.14 (tinggi)	115 %



8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	9.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A	A**	-
		10	Nilai SAKIP Daerah	BB	B	-
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	11.	IKM Pelayanan SPM	82,42	91,65	111,20%
		12.	IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	82,21	87,80	106,80%
10	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	13	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	76,72	64,88	84,57%
11	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan	14.	Cakupan Penerapan Nilai Agama dan Masyarakat	95	71,9	75,68%
		15.	Cakupan Penerapan Nilai Budaya dan Masyarakat	95	53,79	56,62%



2.3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

A. Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Hingga Akhir Tahun 2022 yang merupakan Tahun Pertama Revisi RPJMD 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan visi misi dan tujuan melalui 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam IKU Tahun 2022-2026. Selanjutnya ditetapkan 15 Sektor dan Program Prioritas dengan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2022. Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

Misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh" dengan tujuan "Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat ". Untuk mencapai misi 1, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang didukung secara terpadu oleh urusan Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial.

Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA YANG BERDAYA SAING* " dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,80	73,92	100,16
Rata-Rata Capaian Kinerja			100,16%		

A. Indikator Kinerja *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara memperoleh nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

RUMUS			
$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}(\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3}(\text{indeks rata rata lama sekolah})$ $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak Indeks $X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)min}}{X_{(i)maks} - X_{(i)min}}$ Dimana: $X_{(i)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$ $X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$ Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM			
Indikator Komponen IPM (=X(i))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ^{a)}	300.000 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ditargetkan sebesar 73,80, adapun realisasi kinerja dari target berada pada angka 73,92 dengan capaian kinerja 100,16%. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian IPM Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2022 meningkat 0,79 persen jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan yaitu untuk memperoleh akses akan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

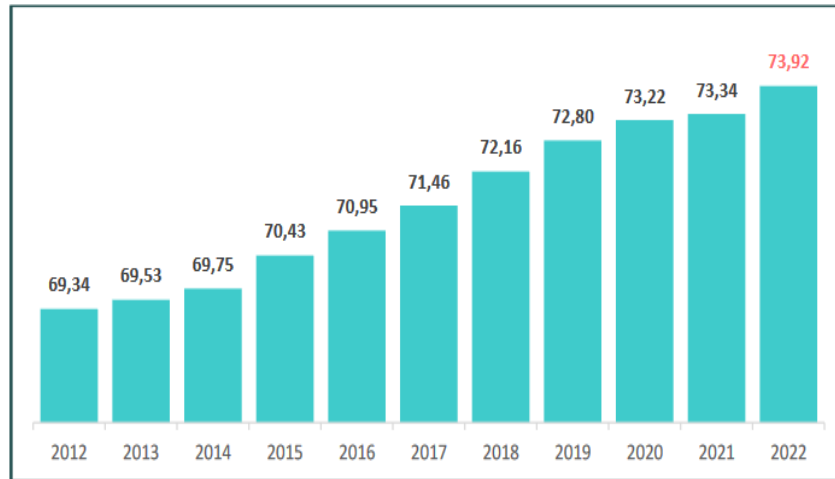
IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dengan kemudian melakukan revisi pada metode penghitungan di tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pencapaian pembangunan dalam jangka panjang, tetapi pada perkembangannya dapat menjadi rujukan untuk jangka pendek dan menengah. Sebagai indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, ada dua aspek yang biasa diperhatikan dalam menilai IPM, yaitu kecepatan dan status pencapaian IPM.

Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur mengalami kemajuan selama periode 2012 hingga 2022. IPM Kabupaten Luwu Timur meningkat dari 69,34 pada tahun 2012, menjadi 70,95 pada tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 73,34 pada tahun 2021. Pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 adalah sebesar 73,92. Selama periode 2012-2022, IPM Kabupaten Luwu Timur rata-rata tumbuh sebesar 0,66 persen per tahun.

Selama 2012-2022 IPM Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Pada tahun 2012, pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Luwu Timur berada pada tingkat pembangunan manusia level "sedang" menurut kriteria UNDP. Kemudian sejak tahun 2015, status pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Luwu Timur sudah meningkat pada level

“tinggi” yaitu pencapaian IPM 70 ke atas sampai kurang dari 80. Adapun grafik pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur periode 2012 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Gambar Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur
Periode 2012-2022**



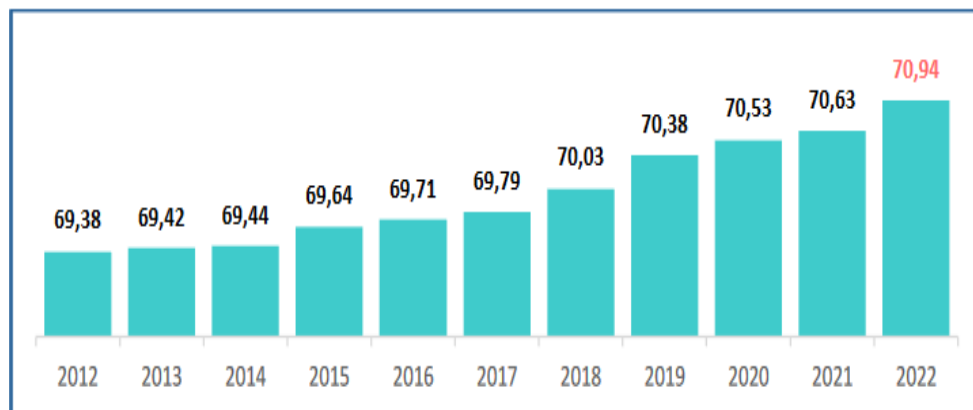
(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur didorong oleh peningkatan pada semua indikator pembentuk yaitu :

A. Angka Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022, Kabupaten Luwu Timur telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,56 tahun. Selama periode tersebut, Umur Harapan Hidup secara rata- rata tumbuh sebesar 0,22 persen per tahun. Pada tahun 2012, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Luwu Timur hanya sebesar 69,38 tahun, dan pada tahun 2022 telah mencapai 70,94 tahun. Adapun perkembangan angka harapan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Gambar Angka Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Luwu Timur
2012-2022**



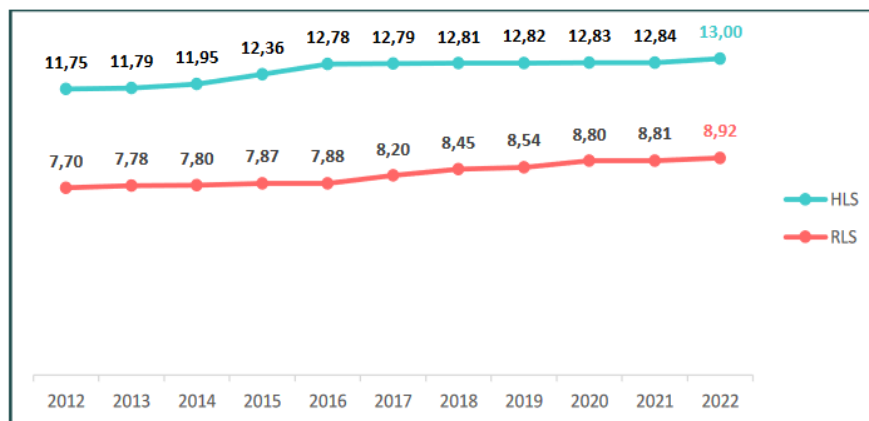
(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)



B. Angka Rata-Rata lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun uang dihabiskan oleh penduduk berusia 15-24 tahun untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Perhitungan lama sekolah untuk mereka yang tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan tamat SMA adalah 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Untuk indeks pendidikan, pada tahun 2022 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur sebesar 8,92 Tahun. Data ini menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah / tahun mengalami peningkatan 0,11 tahun atau tumbuh 1,25 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021. Selama periode 2012 hingga 2022 Rata-rata Lama Sekolah bertambah 1,22 tahun. Adapun perkembangan capaian angka rata-rata lam sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

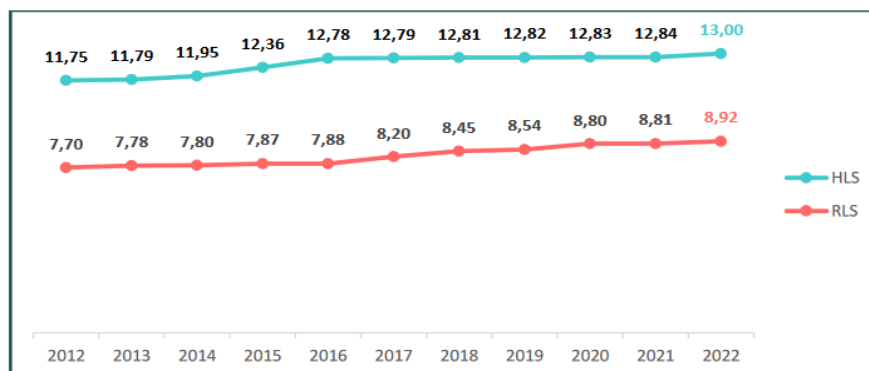
Grafik Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Periode 2012-2022



(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)

C. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 sebesar 13,00 tahun. Data ini menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah / tahun meningkat 0,16 tahun atau tumbuh 1,25 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021. Selama periode 2012 hingga 2022 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur telah meningkat sebesar 1,25 tahun.

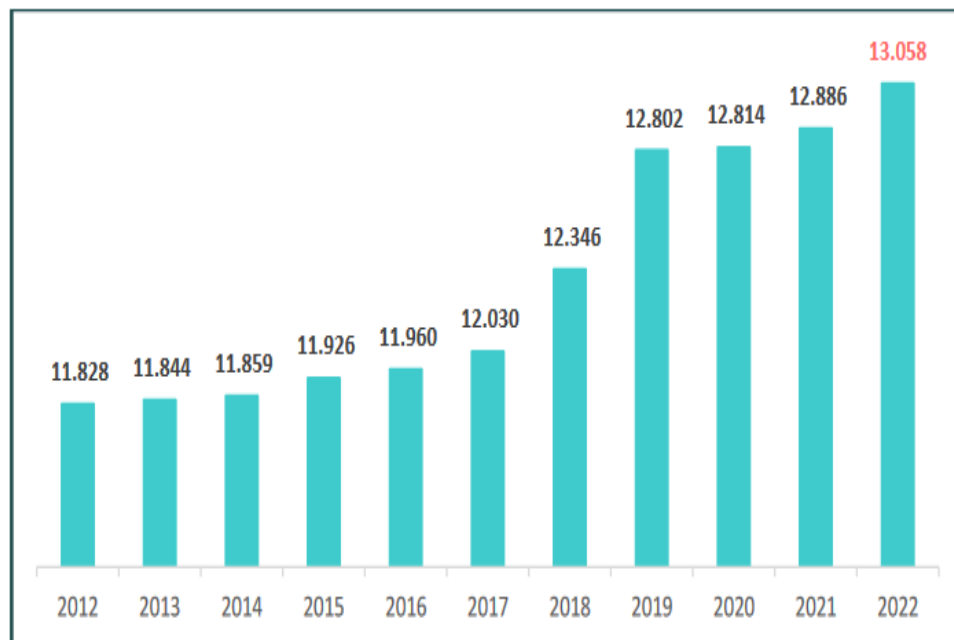


(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)

D. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun

Salah satu faktor pendorong pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengeluaran per kapita per tahun, dimana Kabupaten Luwu Timur memperoleh pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan Rp.13,058.000. Data ini menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah) Kabupaten Luwu Timur meningkat 172 ribu (tumbuh 1,33 persen) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Luwu Timur mencapai 13,058 juta rupiah pertahun. Selama sepuluh tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat rata-rata meningkat sebesar 1,04 persen per tahun. Adapun perkembangan pengeluaran per kapita per tahun Kabupaten Luwu Timur 2012-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

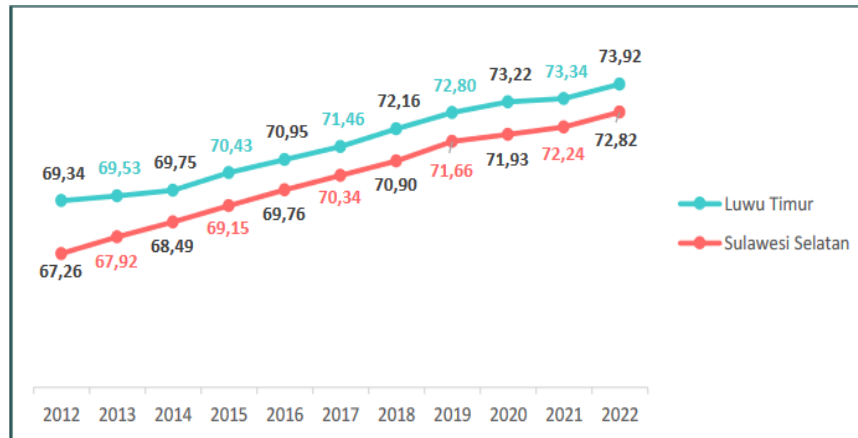
Gambar Pengeluaran Per Kapita Per Tahun di Kabupaten Luwu Timur, 2012-2022 (Rp 000)



(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022)

Selama 2012-2022, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPM Kabupaten Luwu Timur yang lebih tinggi dari rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Luwu Timur sudah mencapai 73,92 diatas rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 72,82. Tingginya pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur tidak lepas dari pencapaian komponen indikator pembentuk IPM, diantaranya Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari besaran pengeluaran per kapita per tahun.

Gambar Perbandingan IPM Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan 2012-2022



(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)

**Perbandingan IPM Kab. Luwu Timur & Prov. SulSel
Menurut Komponen Tahun 2022**

Komponen	Satuan	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,94	70,97
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,00	13,53
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,92	8,63
Pengeluaran per Kapita	Ribu Rupiah	13.058	11.430
IPM	-	73,92	72,82
Selisih IPM (dibanding 2021)	-	0,12	0,58

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Untuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan realisasi indikator kinerja tahun pertama yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026, sehingga tidak ada target kinerja dan pengukuran capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	2018	72,16	-
		2019	72,80	-
		2020	73,22	-
		2021	73,13	-
		2022	73,92	100,16%



- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi	Tar get	Realis asi
	Indeks Pembangunan Manusia	73,80	73,92	74,10	-	74,40	-	74,70	-	75,00	-

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja Kinerja Tahun 2022 dengan dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 merupakan pencapaian tertinggi ke 4(empat) untuk seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kota Makassar 83,12 %, kemudian Kota Palopo 78,91% dan Kota Pare-Pare 78,54, sedangkan untuk Kabupaten Luwu Timur berada di posisi keempat (tertinggi) untuk Kabupaten di Sulawesi Selatan dengan IPM 73,92 %. Untuk diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai ukuran kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yang mencakup umur panjang, sehat pengetahuan serta kehidupan yang layak.

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Peningkatan angka harapan hidup :
 - Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan kematian bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan seperti peningkatan pelayanan puskesmas PONED, Audit Maternal dan Perinatal (AMP), Perbaikan gizi, pemberian vitamin dan tablet FE pada remaja putri;
 - Meningkatkan upaya pencegahan kematian bayi dan balita dengan imunisasi, pencegahan stunting, pencegahan penyakit menular;
 - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui program UHC (universal Heath coverate);
 - Memperbaiki status gizi keluarga;
 - Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga sehat;
 - Perbaikan kesehatan lingkungan;
 - Peningkatan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - Optimalisasi promosi kesehatan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
 - ketersediaan obat dan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan.
- Peningkatan angka rata-rata lama sekolah setiap tahun
- Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah



- pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah) Kabupaten Luwu Timur yang mengalami peningkatan tahun 2022.

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan :**

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat:
 - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;
 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
 - Pengadaan Obat, Vaksin;
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;



- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus;
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
- Operasional Pelayanan Puskesmas;
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindaklanjuti Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman:
 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan:
 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota:
 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan.



- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
- Program Pengelolaan Pendidikan:
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar :
 - Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sekolah;
 - Pengadaan Mebel Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa;
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar Rp271.717.904.904 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.277.386.568.011 atau 102,09% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini sebesar - 2,09%. Artinya daya serap penggunaan anggaran yang cukup tinggi dan diikuti dengan realisasi kinerja yang tercapai secara signifikan bahkan melebihi target.

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DESA YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN* " dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Desa Membangun	Status	Maju	Berkembang	0,7031
Rata-Rata Capaian Kinerja			0,7031		



- Indikator Kinerja **"Indeks Desa Membangun"**
Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh status Indeks Desa Membangun adalah :

$$IDM = 1/3 (IS \times IE \times IL)$$

Keterangan:

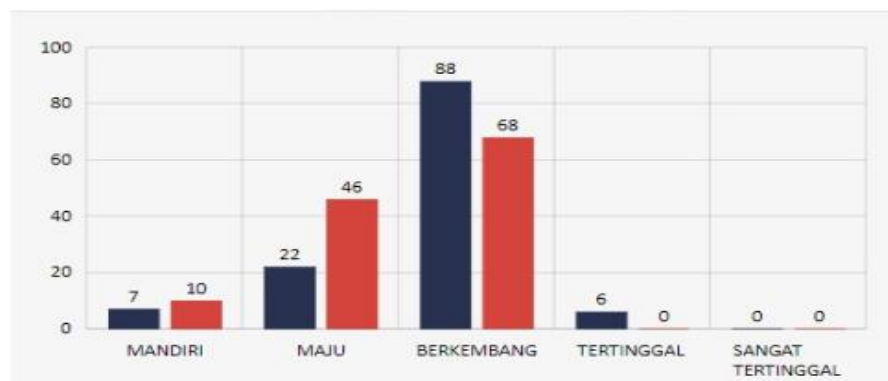
IS: Indeks Sosial

IE: Indeks Ekonomi

IL: Indeks Lingkungan

. Untuk indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dengan target status desa yaitu maju dengan realisasi kinerja desa dengan status berkembang, hal ini menunjukkan bahwa secara umum target yang ditetapkan pada tahun 2022 tidak tercapai dengan melihat capaian realisasi. Namun jika dilihat tabel perkembangan desa menurut status menunjukkan bahwa terjadi peningkatan masing-masing status desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik Capaian Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022



(sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat da Desa Tahun 2023)

Tabel Perbandingan Status IDM Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022

	2021		2022	
MANDIRI	7	5.69%	10	8.06%
MAJU	22	17.89%	46	37.10%
BERKEMBANG	88	71.54%	68	54.84%
TERTINGGAL	6	4.88%	0	0.00%
SANGAT TERTINGGAL	0	0.00%	0	0.00%

(sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat da Desa Tahun 2023)



Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

**TABEL PERUBAHAN STATUS DESA IDM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	Kode Desa	Nama Desa	Nama Kec	Status Desa	Nilai IDM Tahun 2022
1	7324012001	MALEKU	MANGKUTANA	BERKEMBANG	0,6889
2	7324012002	WONOREJO	MANGKUTANA	MAJU	0,7319
3	7324012003	MARGOLEMBO	MANGKUTANA	BERKEMBANG	0,6421
4	7324012004	TEROMU	MANGKUTANA	BERKEMBANG	0,7059
5	7324012007	MANGGALA	MANGKUTANA	BERKEMBANG	0,5992
6	7324012009	KASINTUWU	MANGKUTANA	BERKEMBANG	0,6629
7	7324012011	BALAI KEMBANG	MANGKUTANA	MAJU	0,7511
8	7324012013	PANCA KARSA	MANGKUTANA	BERKEMBANG	0,6802
9	7324012014	SINDU AGUNG	MANGKUTANA	MAJU	0,7213
10	7324012015	WONOREJO TIMUR	MANGKUTANA	MANDIRI	0,8746
11	7324012016	KORONCIA	MANGKUTANA	BERKEMBANG	0,6273
12	7324022001	NUHA	NUHA	BERKEMBANG	0,621
13	7324022003	NIKKEL	NUHA	MAJU	0,8083
14	7324022005	MATANO	NUHA	BERKEMBANG	0,6471
15	7324022009	SOROWAKO	NUHA	MANDIRI	0,8419
16	7324032001	LOEHA	TOWUTI	BERKEMBANG	0,6589
17	7324032002	MAHALONA	TOWUTI	BERKEMBANG	0,657
18	7324032003	TIMAMPU	TOWUTI	MAJU	0,7151



19	7324032004	WAWONDULA	TOWUTI	MANDIRI	0,8237
20	7324032005	LANGKEA RAYA	TOWUTI	MANDIRI	0,8217
21	7324032006	TOKALIMBO	TOWUTI	BERKEMBANG	0,6514
22	7324032007	BARUGA TWT	TOWUTI	MAJU	0,8081
23	7324032008	PEKALOA	TOWUTI	MAJU	0,7267
24	7324032009	LIOKA	TOWUTI	BERKEMBANG	0,6706
25	7324032010	ASULI	TOWUTI	BERKEMBANG	0,7011
26	7324032011	BANTILANG	TOWUTI	BERKEMBANG	0,6143
27	7324032012	MASIKU	TOWUTI	BERKEMBANG	0,6125
28	7324032013	RANTE ANGIN	TOWUTI	BERKEMBANG	0,617
29	7324032014	MATOMPI	TOWUTI	MAJU	0,7079
30	7324032015	TOLE	TOWUTI	BERKEMBANG	0,67
31	7324032016	LIBUKAN MANDIRI	TOWUTI	MAJU	0,7317
32	7324032017	KALOSI	TOWUTI	BERKEMBANG	0,6521
33	7324032018	BUANGIN	TOWUTI	BERKEMBANG	0,6702
34	7324042001	HARAPAN	MALILI	MAJU	0,7283
35	7324042002	LASKAP	MALILI	MAJU	0,7398
36	7324042004	MANURUNG	MALILI	MAJU	0,7448
37	7324042005	WEWANGRIU	MALILI	MAJU	0,7595
38	7324042006	BARUGA MLL	MALILI	MANDIRI	0,8725
39	7324042007	LAKAWALI	MALILI	MANDIRI	0,9032
40	7324042008	USSU	MALILI	BERKEMBANG	0,7067
41	7324042009	TARABBI	MALILI	BERKEMBANG	0,6202
42	7324042010	BALANTANG	MALILI	MANDIRI	0,8175
43	7324042011	ATUE	MALILI	BERKEMBANG	0,6744
44	7324042012	PONGKERU	MALILI	MAJU	0,7541
45	7324042013	PUNCAK INDAH	MALILI	MANDIRI	0,9197
46	7324042014	PASI-PASI	MALILI	BERKEMBANG	0,6924
47	7324042015	LAKAWALI PANTAI	MALILI	MAJU	0,8149
48	7324052001	TAWAKUA	ANGKONA	BERKEMBANG	0,6444
49	7324052002	TAMPINNA	ANGKONA	MAJU	0,7213
50	7324052003	SOLO	ANGKONA	MAJU	0,7414
51	7324052004	TARIPA	ANGKONA	MAJU	0,7219
52	7324052005	MANTADULU	ANGKONA	BERKEMBANG	0,6108
53	7324052006	BALIREJO	ANGKONA	MAJU	0,7781
54	7324052007	MALIOWO	ANGKONA	BERKEMBANG	0,6608
55	7324052008	LAMAETO	ANGKONA	MAJU	0,7483
56	7324052009	WATANGPANUA	ANGKONA	MAJU	0,7852
57	7324052010	WANASARI	ANGKONA	MAJU	0,7802
58	7324062001	LAMPENAI	WOTU	MAJU	0,7138
59	7324062002	TARENGGE	WOTU	MAJU	0,7489



60	7324062003	MARAMBA	WOTU	BERKEMBANG	0,6448
61	7324062004	CENDANA HIJAU	WOTU	MAJU	0,7357
62	7324062005	BAWALIPU	WOTU	MANDIRI	0,8713
63	7324062006	KALAENA	WOTU	BERKEMBANG	0,619
64	7324062007	LERA	WOTU	MAJU	0,7576
65	7324062008	KANAWATU	WOTU	BERKEMBANG	0,6779
66	7324062009	BAHARI	WOTU	BERKEMBANG	0,6311
67	7324062010	KARAMBUA	WOTU	BERKEMBANG	0,6486
68	7324062011	PEPURO BARAT	WOTU	BERKEMBANG	0,7003
69	7324062012	BALO-BALO	WOTU	BERKEMBANG	0,6962
70	7324062013	RINJANI	WOTU	BERKEMBANG	0,6124
71	7324062014	TARENGGE TIMUR	WOTU	BERKEMBANG	0,6146
72	7324062015	MADANI	WOTU	BERKEMBANG	0,6586
73	7324062016	TABAROGGE	WOTU	BERKEMBANG	0,6363
74	7324072001	BURAU	BURAU	MAJU	0,7394
75	7324072002	JALAJJA	BURAU	MAJU	0,7544
76	7324072003	LEWONU	BURAU	BERKEMBANG	0,6368
77	7324072004	LAMBARESE	BURAU	BERKEMBANG	0,6867
78	7324072005	LAUWO	BURAU	BERKEMBANG	0,6294
79	7324072006	BONE PUTE	BURAU	MAJU	0,7194
80	7324072007	LUMBEWE	BURAU	BERKEMBANG	0,6389
81	7324072008	MABONTA	BURAU	BERKEMBANG	0,6705
82	7324072009	LARO	BURAU	BERKEMBANG	0,6311
83	7324072010	BENTENG	BURAU	BERKEMBANG	0,6514
84	7324072011	BATU PUTIH	BURAU	BERKEMBANG	0,6084
85	7324072012	LANOSI	BURAU	BERKEMBANG	0,6327
86	7324072013	LAGEGO	BURAU	MAJU	0,7522
87	7324072014	CENDANA	BURAU	BERKEMBANG	0,6389
88	7324072015	BURAU PANTAI	BURAU	BERKEMBANG	0,6051
89	7324072016	ASANA	BURAU	BERKEMBANG	0,6314
90	7324072017	KALATIRI	BURAU	BERKEMBANG	0,6354
91	7324072018	LAMBARA HARAPAN	BURAU	BERKEMBANG	0,7038
92	7324082001	BAYONDO	TOMONI	MAJU	0,7173
93	7324082002	MULYASRI	TOMONI	MAJU	0,7338
94	7324082007	LESTARI	TOMONI	MAJU	0,7373
95	7324082008	KALPATARU	TOMONI	BERKEMBANG	0,6365
96	7324082011	TADULAKO	TOMONI	BERKEMBANG	0,6127
97	7324082012	BERINGIN JAYA	TOMONI	MAJU	0,7632
98	7324082015	BANGUN JAYA	TOMONI	MAJU	0,7424
99	7324082016	MANDIRI	TOMONI	MANDIRI	0,8532
100	7324082017	SUMBER ALAM	TOMONI	BERKEMBANG	0,6441



101	7324082018	UJUNG BARU	TOMONI	BERKEMBANG	0,6267
102	7324082019	BANGUN KARYA	TOMONI	BERKEMBANG	0,6721
103	7324082020	RANTE MARIO	TOMONI	BERKEMBANG	0,6233
104	7324092001	KERTORAHARJO	TOMONI TIMUR	MAJU	0,741
105	7324092002	CENDANA HITAM	TOMONI TIMUR	MAJU	0,7078
106	7324092003	PURWOSARI	TOMONI TIMUR	MAJU	0,7078
107	7324092004	PATTENGKO	TOMONI TIMUR	BERKEMBANG	0,6981
108	7324092005	MANUNGGAL	TOMONI TIMUR	MAJU	0,7144
109	7324092006	MARGOMULYO	TOMONI TIMUR	BERKEMBANG	0,6776
110	7324092007	ALAM BUANA	TOMONI TIMUR	BERKEMBANG	0,6643
111	7324092008	CENDANA HITAM TIMUR	TOMONI TIMUR	BERKEMBANG	0,6681
112	7324102001	KALAENA KIRI	KALAENA	MAJU	0,7413
113	7324102002	SUMBER AGUNG	KALAENA	MAJU	0,769
114	7324102003	PERTASI KENCANA	KALAENA	BERKEMBANG	0,6483
115	7324102004	NON BLOK	KALAENA	BERKEMBANG	0,6443
116	7324102005	ARGOMULYO	KALAENA	BERKEMBANG	0,6767
117	7324102006	SUMBER MAKMUR	KALAENA	MAJU	0,7559
118	7324102007	MEKAR SARI	KALAENA	BERKEMBANG	0,6573
119	7324112001	LEDU LEDU	WASUPONDA	MAJU	0,7714
120	7324112002	KAWATA	WASUPONDA	BERKEMBANG	0,6494
121	7324112003	TABARANO	WASUPONDA	MAJU	0,7575
122	7324112004	WASUPONDA	WASUPONDA	MAJU	0,7832
123	7324112005	PARUMPANAI	WASUPONDA	BERKEMBANG	0,6703
124	7324112006	BALAMBANO	WASUPONDA	BERKEMBANG	0,6963

(Sumber Data : Dinas PMD Kab. Luwu Timur Tahun 2023)

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Persentase Indeks Desa Membangun Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga tidak ada capaian realisasi target pada tahun-tahun sebelumnya).

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Desa Membangun (IDM)	Maju	2020	-	-
		2021	Berkembang	0,6727
		2022	Berkembang	0,7031



❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (Untuk Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026).

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Desa Membangun	Maju	Berkembang	Maju	-	Maju	-	Maju	-	Maju	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa yang Merata dan berkelanjutan adalah :**

- Penetapan target kinerja yang tidak relevan sehingga tidak dapat diukur dengan baik;
- Target yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai dengan kondisi perkembangan status desa yang ada saat ini.

❖ **Alternative/Solusi yang akan dilakukan :**

- Menetapkan target yang relevan dan terukur;
- Target yang ditetapkan disesuaikan dengan kondisi status desa yang diperoleh saat ini sehingga memudahkan mengukur perencanaan target kedepan yang bisa untuk dicapai.
- Mendukung program/kegiatan yang akan dilaksanakan di desa dalam rangka pencapaian status IDM Kabupaten Luwu Timur menjadi Maju.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- Program Penataan Desa
 - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa



- Fasilitas Penyusunan Profil Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Program Pemberdayaan Sosial
 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar Rp. 2.191.194.285 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp2.147.020.444 atau 97,98 dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,02%. Artinya realisasi anggaran terserap dengan baik namun realisasi kinerja tidak dapat dicapai sehingga penggunaan anggaran yang tidak efektif dan tepat sasaran.

Sasaran Strategis 3

Meningkatkan Pemberdayaan Gender

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN GENDER* " dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	89,94	90,34	100,44
Rata-Rata Capaian Kinerja			100,44%		

Indikator Kinerja "*Indeks Pemberdayaan Gender*"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) adalah :

$$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}}$$

Untuk Indikator *Indeks Pemberdayaan Gender* pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 89,94 dan realisasi capaian kinerja sebesar 90,34 dengan persentase



capaian sebesar 100,44%, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan untuk pemberdayaan gender.

Indikator ini merupakan capaian tahun pertama sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan IKU Kabupaten 2022-2026, sehingga tidak ada perbandingan capaian target dan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya. Adapun tabel capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL CAPAIAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER
TAHUN 2020-2022**

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2020 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾
Kepulauan Selayar	91,63	91,50	91,73
Bulukumba	96,29	95,80	95,95
Bantaeng	95,78	95,76	95,35
Jeneponto	91,46	91,60	92,00
Takalar	87,56	87,45	87,66
Gowa	87,17	87,37	87,83
Sinjai	98,02	97,81	98,13
Maros	89,23	89,20	89,46
Pangkajene dan Kepulauan	89,85	89,97	90,61
Barru	95,52	95,51	95,64
Bone	92,89	92,71	93,34
Soppeng	97,26	97,25	97,06
Wajo	90,25	90,44	90,33
Sindereng Rappang	92,06	92,20	92,57
Pinrang	95,16	95,11	95,36
Enrekang	97,41	97,40	97,91
Luwu	92,16	92,58	92,79
Tana Toraja	87,97	88,46	88,48
Luwu Utara	89,20	89,44	90,00
Luwu Timur	89,71	89,80	90,34
Toraja Utara	86,83	86,80	87,32
Makassar	94,47	94,44	94,52
Parepare	96,88	96,73	96,76
Palopo	97,32	97,31	97,58
Sulawesi Selatan	92,86	92,85	93,14

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Cakupan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja Cakupan Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator baru tahun pertama



pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga tidak ada capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya).

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Cakupan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	2020	89,71	-
		2021	89,80	-
		2022	90,34	-

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (Untuk Indikator Kinerja Cakupan Indeks Pemberdayaan Gender (IDM) merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026.

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si
1	Cakupan Indeks Pemberdayaan Gender- (IPG)	89,94	90,34	90,00	-	90,05	-	91,18	-	92,15	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada pencapaian sasaran:**

- ✓ Peran aktif perempuan di bidang politik dan ekonomi.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan :**

- ✓ Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur lebih optimal. Di bentuknya Tim Pokja Pengarusutamaan Gender juga berperan penting dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimulai dari Perencanaan, Penyediaan Anggaran, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;



- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar Rp.253.988.665 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.252.152.240 atau 99,28% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 0,17%. Realisasi penggunaan anggaran yang tinggi dengan realisasi kinerja yang rendah dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran yang disediakan pada indikator ini tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Misi Kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas"**. Untuk mencapai misi 2, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman Modal & PTSP.

Sasaran Strategis 4

Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH* " dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	1,83	-1,84	- 100,55%
Rata-Rata Capaian Kinerja			-100,55%		

A. Indikator Kinerja "Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase cakupan kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan adalah :

$$\frac{\text{Pertumbuhan PDRB sector unggulan (n) x 100\%}}{\text{Pertumbuhan PDRB sector unggulan (n-1)}}$$

Untuk indikator kinerja *cakupan pertumbuhan PDRB Sektor unggulan* pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 1,83% dan realisasi sebesar -1,84% dengan persentase capaian kinerja sebesar -100,55%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2022 tidak tercapai atau adanya kegagalan capaian kinerja pada indikator ini. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 2021 sebesar 4,19, artinya terjadi penurunan kinerja tahun 2022 yang sangat drastis. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan menurut lapangan usaha diukur berdasarkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) sektor unggulan dapat dilihat pada tabel angka A dibawah ini :

Tabe Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur 2018-2022

Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021 ^a	2022 ^a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	6,61	1,06	-0,25	4,19	-1,84
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,16	-2,69	1,66	-7,81	1,67
C Industri Pengolahan/Manufacturing	5,75	-14,53	-2,71	6,58	7,50
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	5,93	4,14	4,92	6,10	5,57
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	8,34	5,88	9,34	11,76	10,27
F Konstruksi/Construction	7,63	9,74	3,15	7,65	2,56
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	10,31	10,51	-1,08	6,72	7,83
H Transportasi dan Pengudangan/Transportation and Storage	10,25	10,99	-12,94	6,73	14,38
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	11,76	8,56	-12,78	2,34	11,01
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	10,37	10,73	11,27	7,64	7,46

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)

Laju pertumbuhan produk domestik bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1 dikalikan dengan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2022, angka PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 28,41 triliun rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 50,04%. Secara umum jika dilihat dari Laju Pertumbuhan PDRB 2022 atas dasar

harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 5,09%, nilai ini sebanding dengan laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur yang mengalami peningkatan sebesar 1,99% dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian *cakupan pertumbuhan PDRB Sektor unggulan* Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut;

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	2020	-0,25	-
		2021	4,19	-
		2022	-1,84	-100,55%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026



No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Tar get	Realis asi	Tar get	Realis asi	Tar get	Realis asi	Tar get	Realis asi	Tar get	Realis asi
1	Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	1,83	-1,84	1,98	-	2,08	-	2,17	-	2,23	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran:**

- ✓ Seluruh Komoditi pada sektor pertanian menurun :
 - Terbatasnya buruh tanam dan alat tanam (transplanter) sehingga beberapa lokasi untuk periode tanam Januari sampai Maret 2022 tidak sesuai dengan hasil kesepakatan tudanmg sipulung atau mengalami pergeseran tanam (jadwal tanam mundur), yang seharusnya ditanam pada Bulan Januari bergeser ke Bulan Februari, Maret dan April Tahun 2022;
 - Fenomena dampak perubahan iklim (DPI) di awal tahun 2022 seperti adanya banjir dan serangan OPT (serangan tikus, penggerek batang, wereng, kresek) yang cukup tinggi pada pertanaman padi di Bulan Maret sampai Mei 2022 sehingga mempengaruhi penurunan produksi pada saat panen;
 - Tingkat kesuburan tanah pada areal sawah yang mulai menurun karena ketergantungan pada pupuk kimia yang masih tinggi melalui alokasi bantuan pupuk subsidi;
 - Ketersediaan saprodi seperti pupuk yang masih terbatas dan terlambat pasokannya sehingga mempengaruhi ketepatan jadwal penggunaan dan aplikasi pupuk pada tanaman padi;
 - Kurangnya alokasi bantuan pemerintah pada sektor-sektor yang mempengaruhi peningkatan produksi seperti penyediaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) spesifik lokasi, sehingga beberapa areal tanam masih menggunakan varietas benih yang memiliki potensi produksi rendah atau masih menggunakan benih asalan (bukan benih berlabel);
 - Infrastruktur irigasi masih ada yang belum maksimal mengalir areal persawahan sehingga beberapa lahan tidak dapat ditanami dan ada lahan sawah lambat ditanami karena aliran air belum tersedia;
 - Tingginya biaya saprodi (keterbatasan modal usaha) sehingga petani tidak dapat memaksimalkan penggunaan saprodi sesuai anjuran;
 - Terbatasnya alat pasca panen seperti mesin panen (*Combine Harvester*) dan *Power thresher* (mesin perontok padi), karena penggunaan alat-alat tersebut dapat menekan kehilangan (losses) pada saat panen yang nantinya dapat mempengaruhi produksi padi;



- Luas areal tanam jagung menurun disebabkan kurangnya bantuan benih dan saprodi lainnya (harga yang cukup tinggi);
 - Mayoritas petani hanya mau menanam benih varietas tertentu yang sesuai dengan spesifikasi lokasi, karena sangat mempengaruhi jumlah saprodi yang harus disediakan dan produksi yang dihasilkan;
 - Ketersediaan dan penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) yang relatif masih rendah, sehingga beberapa areal tanam masih menggunakan varietas benih yang memiliki potensi produksi rendah;
 - Fenomena dampak perubahan iklim (DPI) tahun 2022 pada sebagian besar wilayah Kab. Luwu Timur dimana curah hujan yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi perkembangan tanaman yang tidak optimal (produktivitas rendah).
- ✓ Peremajaan sawit :
- Peremajaan kelapa sawit dilakukan untuk meningkatkan produksi dengan cara mengganti tanaman yang kurang produktif dengan tanaman baru. Di keranakan Secara umum, kelapa sawit adalah tumbuhan dengan usia rata-rata 20 – 25 tahun. Memasuki tiga tahun pertama, buahnya akan disebut kelapa sawit muda. Disebut muda karena belum bisa menghasilkan buah secara optimal. Pada usia 4 hingga 6 tahun, sawit-sawit ini akan mulai berbuah. Ketika mencapai usia 7-10 tahun buah akan memasuki periode matang. Pada pencapaian usia 11 – 20 tahun, sawit-sawit ini akan mengalami penurunan fungsi produksi. Pasalnya, semakin menua, kualitasnya akan menurun. Sehingga dianggap perlu dilakukannya Peremajaan sawit untuk meningkatkan produksi dengan cara mengganti tanaman yang kurang produktif (tanaman Tua/ Tanaman Rusak) dengan tanaman baru yang berasal dari varietas unggul.
- ✓ Produktivitas lada dan sawit turun:
- Berdasarkan data angka tetap statistik perkebunan pada tahun 2021 produktivitas lada sebesar 1,10 Ton/Ha/Tahun, mengalami penurunan menjadi 0,80 Ton/Ha/Tahun di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan beberapa factor antara lain:
- Banyaknya kebun-kebun lada yang tidak terpelihara sesuai standar budidaya yang baik seperti penyiangan gulma, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Hal tersebut terjadi karena semakin tingginya harga pupuk dan pestisida sementara harga jual lada terus menurun (rata-rata harga di tahun 2022 antara Rp. 45.000 – Rp. 60.000). kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani tidak sebanding dengan kebutuhan untuk membeli sarana produksi sehingga petani memilih untuk tidak melakukan pemeliharaan kebun secara optimal;
 - Pada saat terjadi penurunan harga jual lada yang sangat drastis mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 yang sisa Rp. 30.000 – Rp. 35.000 per Kg, menyebabkan banyak kebun lada yang dibiarkan/tidak dipelihara



oleh pemiliknya sehingga banyak tanaman yang rusak bahkan mati. Sesuai data luas tanaman menghasilkan tahun 2019 sebesar 3.196,16 ha mengalami penurunan menjadi 2.954,74 ha.

Komoditi Kepala Sawit :

- Penurunan produksi/produktivitas lebih disebabkan oleh adanya kegiatan peremajaan sawit rakyat (PSR). Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya lahan/tanaman produktif dari tahun 2021 seluas 5.821,51 ha menjadi 4.936,76 ha di tahun 2022. Sedangkan tanaman baru yang merupakan program PSR sejak tahun 2019 belum memproduksi secara optimal.

❖ **Alternative/Solusi yang akan dilakukan:**

- ✓ Konsistensi dalam melaksanakan kesepakatan jadwal tanam hasil tudang sipulung untuk memutus mata rantai perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- ✓ Penyediaan bantuan benih padi Varietas Unggul Baru (VUB) sesuai spesifikasi lokasi melalui alokasi bantuan APBN seluas 16.378 Ha dan bantuan mandiri benih padi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.000 Ha;
- ✓ Untuk memenuhi kebutuhan benih yang spesifik lokasi, maka yang perlu dilakukan adalah memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal (Instalasi Kebun Benih Milik Pemda Kab. Luwu Timur di Desa Teromu Kec. Mangkutana);
- ✓ Pengadaan belerang melalui APBD II Kab. Luwu Timur yang dapat digunakan untuk pengendalian OPT pra tanam;
- ✓ Mendorong dan memfasilitasi petani untuk memnafatkan asuransi pertanian memberi rasa aman dan mencegah tingkat kerugian yang lebih banyak bila mengalami musibah kekeringan, banjir atau kegagalan panen akibat serangan hama;
- ✓ Penyediaan saprodi (pupuk) melalui alokasi pupuk subsidi;
- ✓ Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya petani dan penyuluh pertanian melalui pelatihan, bimbingan dan pendampingan;
- ✓ Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui Pembangunan Rehabilitasi, optimalisasi, dan peningkatan/pengembangan jaringan irigasi baik tingkat utama maupun usahatani;
- ✓ Mendorong petani untuk menggunakan sistem pemupukan berimbang yang diintegrasikan dengan pupuk organik, dan menerapkan praktek budidaya pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan;
- ✓ Pemanfaatan Alsintan khususnya Combine Harvester (alat panen) untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat panen;



- ✓ Harga gabah yang cukup tinggi sehingga mendorong minat petani untuk menambah areal tanam dan memberikan dampak pada peningkatan produksi dan pendapatan petani;
- ✓ Penyediaan alokasi alat dan mesin pertanian seperti alat pemipil jagung (Corn Sheller) melalui alokasi bantuan APBN dan Provinsi Sulawesi Selatan;
- ✓ Penyediaan saprodi (pupuk) melalui alokasi pupuk bersubsidi;
- ✓ Memfasilitasi alokasi bantuan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) sesuai spesifik lokasi melalui alokasi bantuan APBN dan Provinsi Sulawesi Selatan;
- ✓ Melakukan pendampingan intensif kepada para petani untuk terus menerapkan praktek budidaya yang baik;
- ✓ Mendorong kegiatan intensifikasi melalui bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk baik yang bersumber dari APBN, APBD I maupun APBD II, serta selalu memberikan penyuluhan kepada petani untuk memanfaatkan pupuk alternatif dari hasil pengolahan dan pemanfaatan pupuk organik;
- ✓ Untuk penanganan jangka menengah/Panjang, dilakukan upaya pememajaan tanaman terhadap tanaman-tanaman yang sudah tua/rusak.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- ✓ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- ✓ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- ✓ Program Penyuluhan Pertanian;
- ✓ Program Pengembangan Ekspor;
- ✓ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- ✓ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- ✓ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- ✓ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- ✓ Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
- ✓ Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar Rp.50.460.495.603 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.48.794.786.172,2 atau 96,70% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 3,30%. Dengan melihat realisasi anggaran dan realisasi kinerja dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada indikator ini tidak efektif dan tepat sasaran berdasarkan hasil capaian yang diperoleh.



Sasaran Strategis 5

Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *KETERSEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN LAPANGAN USAHA* dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,30	4,48	74%
Rata-Rata Capaian Kinerja			74%		

Indikator Kinerja "*Tingkat Pengangguran Terbuka*"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase Tingkat Pengangguran Terbuka adalah:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{7.230}{161.470} \times 100 \% \\
 &= 0,044 \times 100 \\
 &= 4,48
 \end{aligned}$$

Angkatan kerja adalah (Labor Force) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang melakukan kegiatan bekerja secara aktif atau sedang mencari pekerjaan yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran berarti menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 3,30 % dan realisas kinerja 4,48% dengan persentase capaian sebesar 74%, hal ini menunjukkan bahwa target tidak tercapai atau angka pengangguran terbuka masih besar dan belum sepenuhnya terserap oleh pangsa pasar kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana target kinerja sebesar 2,09% dengan persentase realisas kinerja sebesar 4,96% dengan persentase capaian sebesar 42%, terjadi pergerakan atau pergeseran target yang cenderung menurun . Namun secara keseluruhan capaian realisasi target dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan atau mampu menekan tingkat pengangguran terbuka. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dengan melihat jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja pada tahun 2022 sebesar 7.230 orang,. Adapun perbandingan tingkat



pengangguran terbuka Kabupaten Luwu Timur dengan seluruh Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Data Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

URAIAN KETENAGAKERJAAN	JUMLAH
Penduduk Usia Kerja	225.805 orang
Angkatan Kerja	161.470 orang
- Bekerja	154.240 orang
- Tidak Bekerja	7.230 orang
Bukan Angkatan Kerja	64.335 orang
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,48 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,51%

(Sumber Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Th 2022)

**TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 2020 – 2022
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	2020	2021	2022
Kepulauan Selayan	2,44	2,81	1,49
Bulukumba	3,42	3,14	1,26
Bantaeng	4,27	4,07	2,72
Jeneponto	2,31	2,38	2,21
Takalar	4,16	3,93	2,63
Gowa	6,44	4,30	3,26
Sinjai	2,64	2,61	1,60
Maros	6,28	6,30	5,04
Pangkep	5,18	5,86	5,23
Barru	6,39	6,74	5,32
Bone	3,20	4,15	2,27
Soppeng	4,42	3,92	3,40
Wajo	4,33	4,32	2,54
Sidrap	5,91	4,93	3,56
Pinrang	4,19	4,06	2,79
Enrekang	2,44	2,34	0,58
Luwu	4,94	4,80	3,85
Tana Toraja	2,60	3,09	2,32
Luwu Utara	3,01	3,91	2,81
Luwu Timur	4,46	4,96	4,48
Toraja Utara	3,17	2,61	1,99
Makassar	15,92	13,18	11,82
Pare-Pare	7,14	6,72	5,60
Palopo	10,37	8,83	8,20
SULAWESI SELATAN	6,31	5,72	4,51



❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2020	4,46	48%
		2021	4,96	42%
		2022	4,48	74%

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi
1	Tingkat Pengangu ran Terbuka	3,30	4,48	3,05	-	2,80	-	2,55	-	2,30	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran indikator kinerja:**

- Jumlah pencari kerja terdaftar dalam pengurusan dokumen AK 1 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan dari 8.214 orang tahun 2021 menjadi 9.469 orang pada tahun 2022, sedangkan jumlah penempatan kerja tahun 2022 sebanyak 1.474 orang, sehingga jumlah penempatan kerja mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2021 yakni 3.229 orang. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya perusahaan atau pangsa pasar tenaga kerja yang membuka lowongan kerja di tahun 2022, sementara jumlah pencari kerja terus bertambah dan mengalami peningkatan. Disamping itu, nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Luwu Timur cenderung stagnan dan mengalami penurunan yakni Rp. 4.092.099.248.242 pada tahun 2022 sedangkan tahun 2021 yakni Rp. 4.171.740.631.433.

❖ **Alternative/solusi pemecahan masalah :**

- Meningkatkan dan mendorong nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Luwu Timur sehingga berdampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dengan terbukanya lapangan kerja yang luas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka calon tenaga kerja perlu dibekali keterampilan khusus melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis



kompetensi agar para pencari kerja dan tenaga kerja dapat bersaing dalam bursa kerja. Selain itu, mengoptimalkan penyebaran informasi bursa kerja melalui media online dan offline sehingga dapat diakses oleh semua masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Pelatifa Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Outputnya adalah jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.
 - a. Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, adapun outputnya adalah jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan, jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, dan jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerjasama BLK.
- ✓ Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya adalah jumlah penempatan tenaga kerja.
 - a. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja.
Sub Kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dengan output jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.
 - b. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.
Output kegiatan ini ada 2 (dua), yaitu pertama jumlah calon tenaga kerja mandiri yang mengikuti pelatihan. Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan bagi calon tenaga kerja mandiri atau yang mempunyai usaha sendiri untuk pengembangan usahanya baik itu dari segi manajemen usaha maupun SDM. Kedua adalah jumlah kelompok kerja terampil yang didampingi dan difasilitasi, kegiatan ini berupa fasilitasi pendampingan dan monitoring bagi kelompok usaha mandiri.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp.1.397.106.751 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.357.748.191 atau 97,18% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,82%. Artinya realisasi penggunaan anggaran yang cukup tinggi, tetapi tidak diikuti realisasi kinerja yang cenderung menurun.

Misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas"** dengan tujuan **"Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah Secara Berkelanjutan "**. Untuk mencapai misi 3, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang



membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sasaran Strategi 6

Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *MENINGKATNYA DAYA GUNA DAN HASIL GUNA INFRASTRUKTUR DAERAH* " dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	74,89	58,21	77,73
Rata-Rata Capaian Kinerja			77,73%		

Indikator Kinerja "Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh realisasi persentase Cakupan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur :

Nilai IKM terhadap layanan infrastruktur dihitung dengan menggunakan nilai "rata-rata Tertimbang" terhadap jumlah unsur yang dinilai, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan layanan Infrastruktur terhadap sejumlah X unsur yang dikaji, maka setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X}$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Layanan} \times 25$$

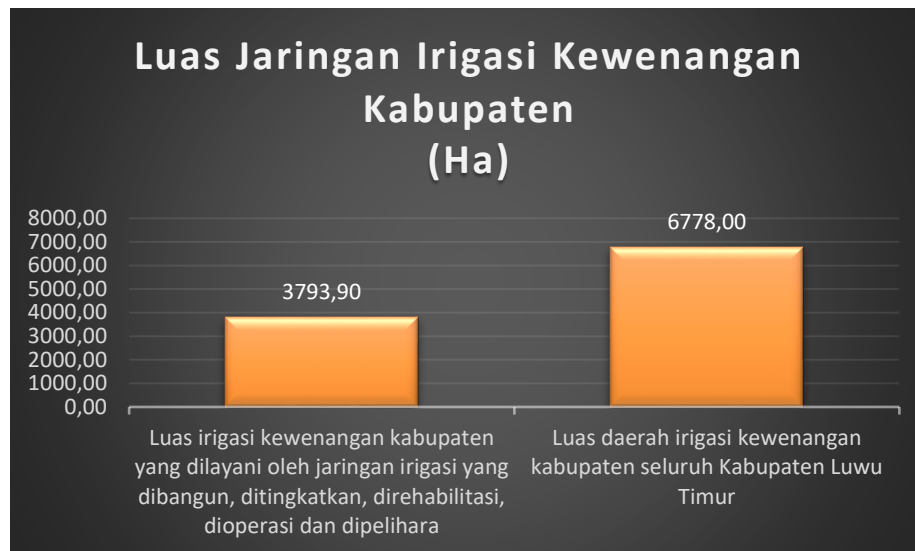
Variabel unsur yang dinilai dalam IKLI antara lain meliputi : Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas,,Penyediaan Transportasi (Darat,ASDP,Laiut dan Udara), Penyediaan Infrastruktur Air Bersih; Penyediaan;Penyediaan Irigasi (pertanian dan air baku);penyediaan infrastruktur perumahan.



$$\begin{aligned}
 & ((\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik } (644,59) / \text{ panjang seluruh} \\
 & \text{jalan kabupaten } (1.889,27) \times 90\% + \text{Jumlah jembatan kabupaten dalam} \\
 & \text{kondisi baik } (340) / \text{ jumlah total jembatan kabupaten } (375) \times 10\%) + (\text{Luas} \\
 & \text{irigasi kabupaten dalam kondisi baik } (3.793,9) / \text{ luas irigasi kabupaten} \\
 & (6.788) \times 40\% + \text{Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik} \\
 & (97,96) / \text{ Panjang seluruh saluran irigasi kabupaten } (142,477) \times 35\% + \\
 & \text{Panjang sungai kabupaten dalam kondisi baik } (0) / \text{ panjang total sungai } (0) \\
 & \times 20\% + \text{Panjang pantai kabupaten dalam kondisi bai } (0) / \text{ panjang total} \\
 & \text{pantai } (0) \times 5\%) + (\text{Jumlah Penduduk berakses air minum } (185.701) / \\
 & \text{jumlah penduduk } (306.082) \times 40\% + \text{Jumlah rumah tinggal} \\
 & \text{bersanitasi } (76.291) / \text{ jumlah rumah tinggal } (77.803) \times 15\% + \text{Jumlah} \\
 & \text{bangunan dalam kondisi baik } (37) / \text{ jumlah bangunan } (41) \times 45\%) + (\text{Luas} \\
 & \text{areal permukiman tertata } (48,85) / \text{ luas areal permukiman} \\
 & \text{keseluruhan } (51,54) \times 35\% + \text{Luas permukiman kumuh yang ditangani } (2,57) \\
 & / \text{ luas permukiman kumuh yang seharusnya ditangani } (95) \times 35\% + \text{Jumlah} \\
 & \text{rumah layak huni } (58.019) / \text{ jumlah total rumah } (65.153) \times 30\%) + (\text{Jumlah} \\
 & \text{perlengkapan jalan yang ada } (5080) / \text{ jumlah perlengkapan jalan yang} \\
 & \text{seharusnya ada } (45831) \times 100\% + \text{Jumlah prasarana perhubungan yang} \\
 & \text{ada } (8,568) / \text{ jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada } (13) \times \\
 & 100\%) / 2 + (\text{Jumlah cakupan koneksi internet pada desa dan kelurahan } (0) \\
 & / \text{ jumlah desa dan kelurahan } (127) \times 100\%) + \text{Jumlah cakupan koneksi} \\
 & \text{internet pada ruang publik } (21) / \text{ jumlah ruang publik } (21) \times 100\% + \text{Jumlah} \\
 & \text{cakupan koneksi internet pada OPD } (41) / \text{ Jumlah OPD } (41) \times 100\%) / 3) / 6 \\
 & = (644,59 / 1.889,27 \times 90\%) + (340 / 375 \times 10\%) + (3.793,9 / 6.788 \times \\
 & 40\%) + (97,96 / 142,477 \times 35\%) + (0 / 0 \times 20\%) + (0 / 0 \times 20\%) + \\
 & (185,701 / 306.082 \times 40\%) + (76.291 / 77.803 \times 15\%) + (37 / 41 \times \\
 & 45\%) + (48,85 / 51,54 \times 35\%) + (2,57 / 95 \times 35\%) + (58.019 / 65.153 \times \\
 & 30\%) + (5080 / 45831 \times 100\%) + (8,568 / 13 \times 100\% / 2) + (0 / 127 \times \\
 & 100\%) + (21 / 21 \times 100\%) + (41 / 41 \times 100\% / 3) / 6 \\
 & = (0,30) + (9,06) + (22,35) + (24,06) + (0) + (0) + (0,024) + (14,70) + \\
 & (40,60) + (33,17) + (0,94) + (26,71) + (11,08) + (32,95) + (0) + (100) \\
 & + (33,33) / 6 \\
 & = 349,274 / 6 \\
 & = \mathbf{58,21}
 \end{aligned}$$

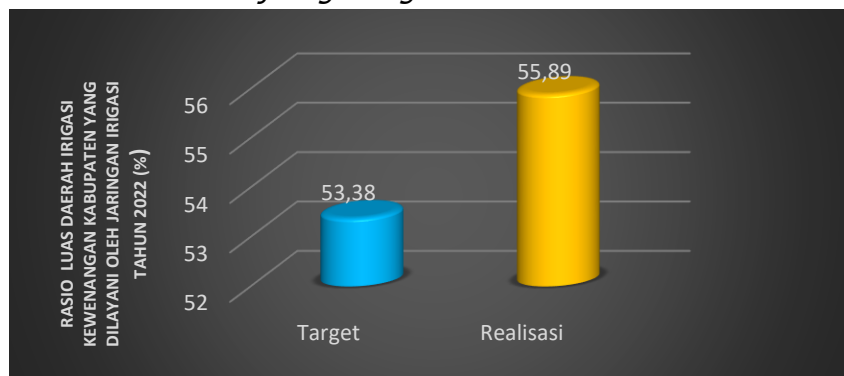
Untuk Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 74,89% dan realisasi kinerja sebesar 58,21% dengan persentase capaian kinerja 77,73%, hal menunjukkan bahwa target tidak dapat dicapai atau kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana *indeks pembangunan infrastruktur* yang ditargetkan sebesar 58,71 dan realisasi kinerja 65,54 dengan persentase capaian kinerja 111,63%, artinya ada penurunan capaian kinerja. Namun jika dilihat dari penetapan target, untuk tahun 2022 target yang ditetapkan terlalu tinggi jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sehingga menyebabkan target 2022 sulit untuk dicapai.

Luas Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022



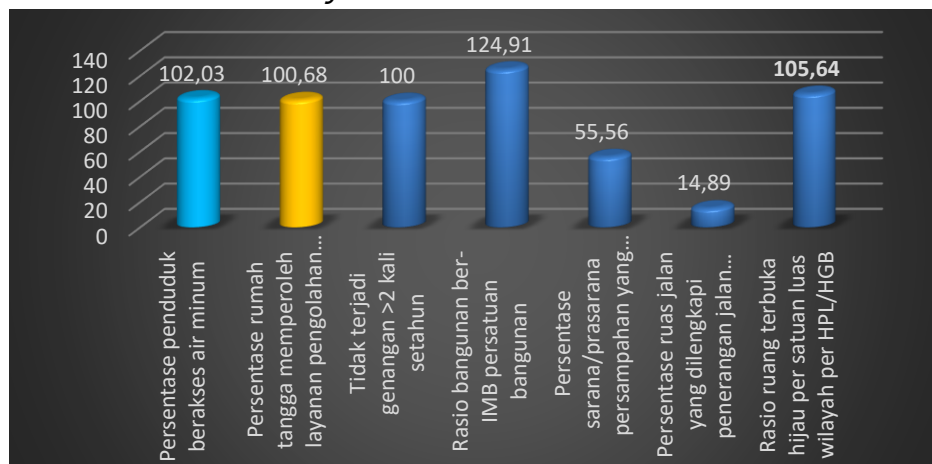
(Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Tahun 2023)

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2022



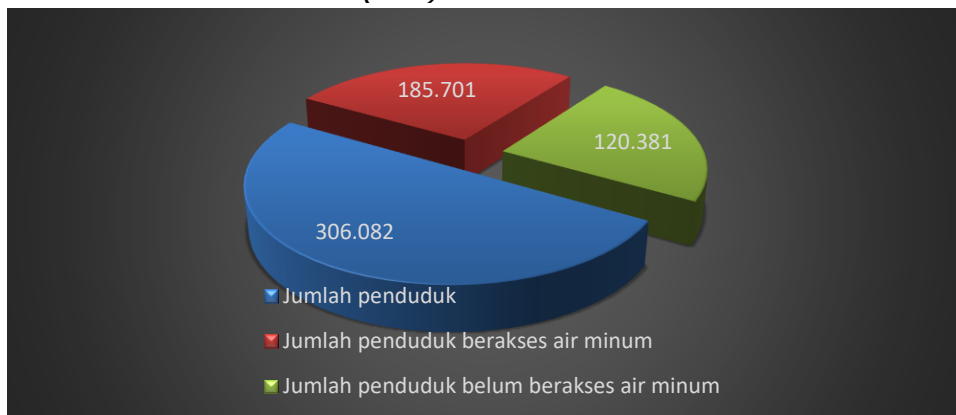
(Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Tahun 2023)

Cakupan indikator sasaran Meningkatnya layanan keciptakaryaan: air minum, sanitasi, drainase, IMB dan bangunan/lingkungan, persampahan dan penerangan jalan umum Tahun 2022



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2023

Jumlah Penduduk (Jiwa) berakses air Minum Tahun 2022



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2023

Jumlah rumah tinggal bersanitasi Tahun 2022



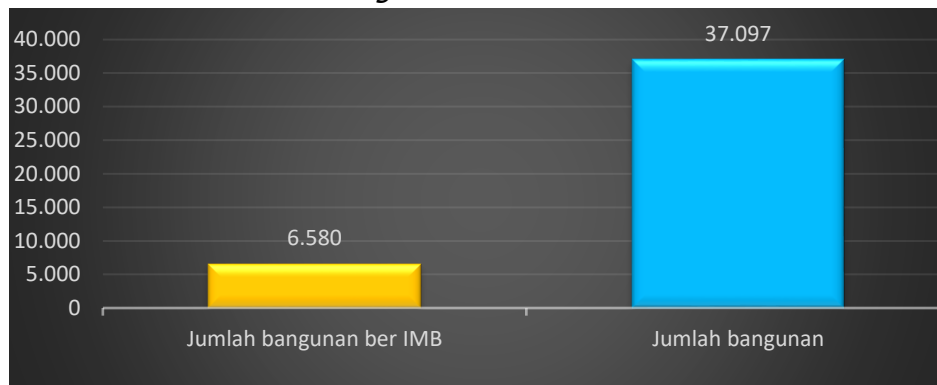
Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2023

Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2022



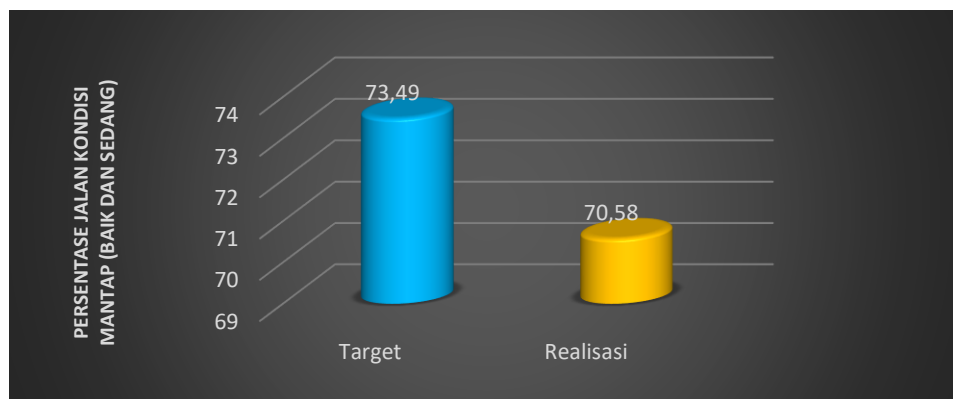
Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2023

Jumlah bangunan ber IMB Tahun 2022



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2023

Persentase jalan kondisi mantap (baik dan sedang) Tahun 2022



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tahun 2023

Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2022



Sumber Data : Pengolahan Data DD1 Bidang Bina Marga Tahun 2023



Panjang peningkatan Jalan (Km) Tahun 2018 - 2022

Tahun	Aspal	Beton	Kerikil
Tahun 2018	21,890	13,440	8,22
Tahun 2019	39,717	3,653	11,565
Tahun 2020	28,029	3,4631	27,391
Tahun 2021	8,56	5,16	72,69
Tahun 2022	8,94	5,78	32,07

Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tahun 2023

Jumlah Jembatan menurut kondisinya Tahun 2022



Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2023

Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan (Unit) Tahun 2018 - 2022

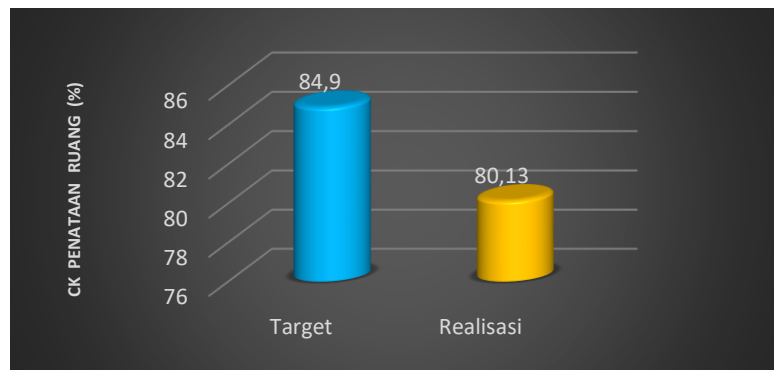
Tahun	Pembangunan jembatan	Pemeliharaan jembatan
Tahun 2018	4 unit	7 unit
Tahun 2019	8 unit	3 unit
Tahun 2020	4 unit	3 unit



Tahun 2021	7 unit	3 unit
Tahun 2022	8 unit	4 unit

Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2023

Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2022



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Penataan Ruang Tahun 2023

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Nilai Cakupan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	2021	65,54	111,63%
		2022	58,21	77,73%

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74,89	58,21	74,93	-	75,15	-	75,32	-	75,59	-



- ❖ **Faktor-faktor penyebab kegagalan pencapaian sasaran:**
 - ✓ Jumlah ruas jalan yang dilengkapi PJU Masih rendah;
 - ✓ Ruas jalan yang diperjanjikan/dilaksanakan pada tahun 2022 banyak tidak termuat dalam SK Jalan Kabupaten (DDI) serta adanya penyesuaian data kondisi jalan dari pemerintah pusat;
- ❖ **Alternative/ Solusi yang akan dilakukan :**
 - ✓ Semua ruas jalan akan dilengkapi PJU sesuai target kinerja;
 - ✓ Seluruh ruas jalan diidentifikasi dan dimasukkan dalam SK Jalan Kabupaten;
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
 - ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
 - Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja.
 - ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.
 - ✓ Program Penyelenggaraan Jalan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;
 - Sub Kegiatan pelebaran Jalan Menuju Standar;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan;
 - Sub Kegiatan pelebaran Jembatan;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan.
 - ✓ Program Pengembangan Perumahan
 - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota;
 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah susun dan Rumah Khusus



- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
 - Pembangunan rumah bagi korban bencana;
 - Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kota.
- ✓ Program Kawasan Permukiman
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah sepuluh Ha
 - Perbaikan Rumah tidak layak huni;
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh.
 - Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian.
- ✓ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
 - Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pembangunan Gedung Terminal;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.
- ✓ Program Pengelolaan Pelayaran
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupten/Kota.
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- ✓ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
 - Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp.137.522.868.087 dan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.135.010.640.835 atau 98,17 % dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,83%. Artinya daya serap anggaran yang tinggi tapi tidak diikuti dengan realisasi kinerja yang mencapai target.

Sasaran Strategis 7

Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA* " dengan 2(dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kualitas lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	87,55	79,71	91,05 %
2.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	202 (tinggi)	176.14 (tinggi)	115 %
Rata-Rata Capaian Kinerja			103.025%		

A. Indikator Kinerja **"Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah"**

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase indeks kualitas lingkungan hidup daerah adalah :

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

A. PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) telah dihitung dan diketahui nilainya.

Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu:

- IKLH nasional meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL;
- IKLH provinsi meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL; dan
- IKLH kabupaten/kota meliputi IKA, IKU, dan IKL.

Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH..

IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan:

IKLH Kabupaten / Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
IKLH Provinsi	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
IKLH Nasional	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$

IKLH Kabupaten/Kota:

- menghitung komponen indeks di kabupaten/kota, yang meliputi IKA, IKU, dan IKL;
- menghitung IKLH dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH kabupaten/kota.

$$\begin{aligned}
 IKLH &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) \\
 &= (0,376 \times 66,52) + (0,405 \times 94,27) + (0,219 \times 75,45) \\
 &= (25,01) + (38,17) + (16,52) \\
 &= 79,71
 \end{aligned}$$

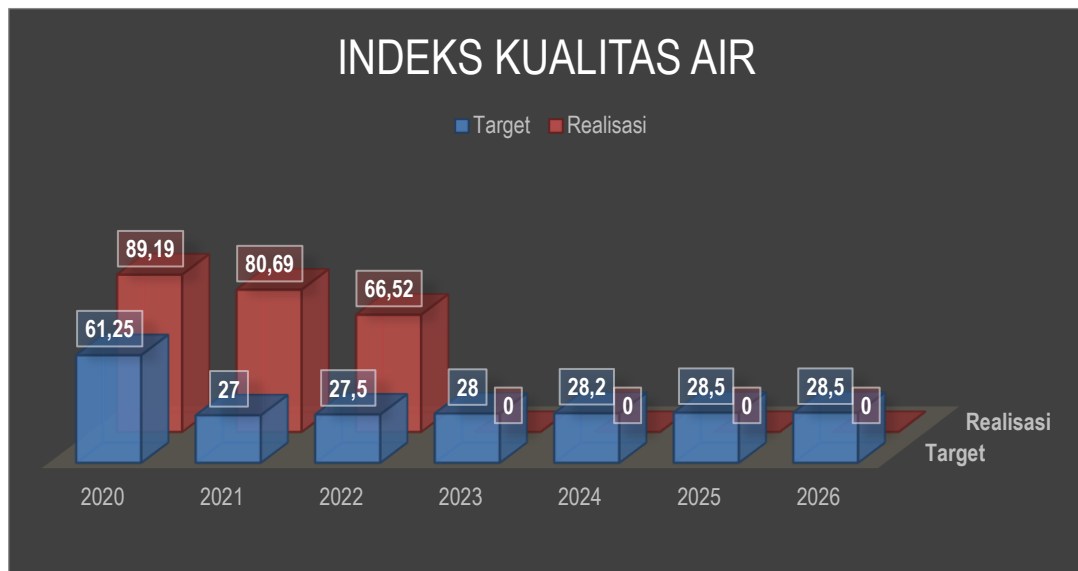
Untuk Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 87,55 dan realisasi capaian target sebesar 79,71% dengan persentase capaian kinerja sebesar 91,05%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak tercapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dimana target kinerja sebesar 60,39% dan realisasi capaian kinerja sebesar 84,07%,



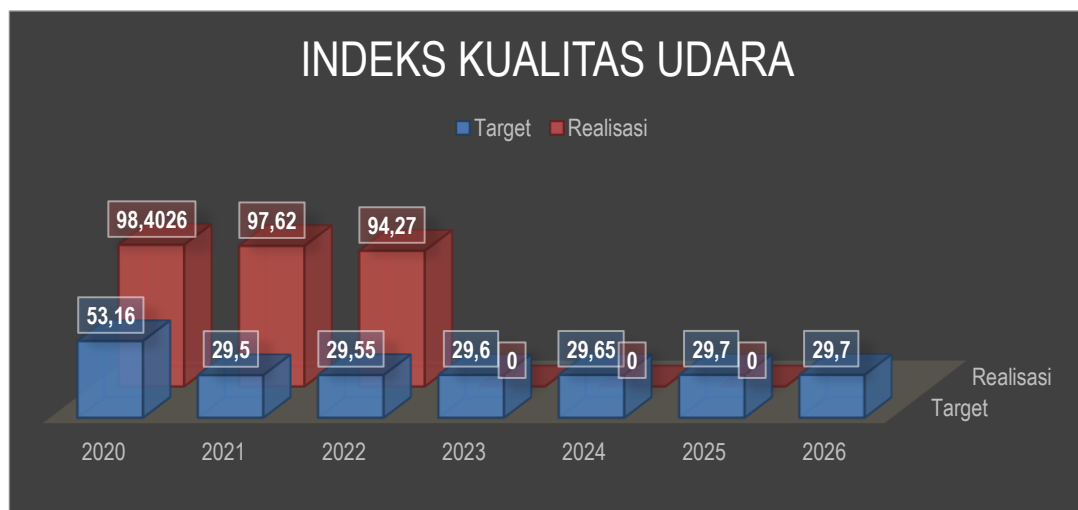
"Waktu yang dihabiskan di antara pohon-pohon tidak pernah membuang waktu."



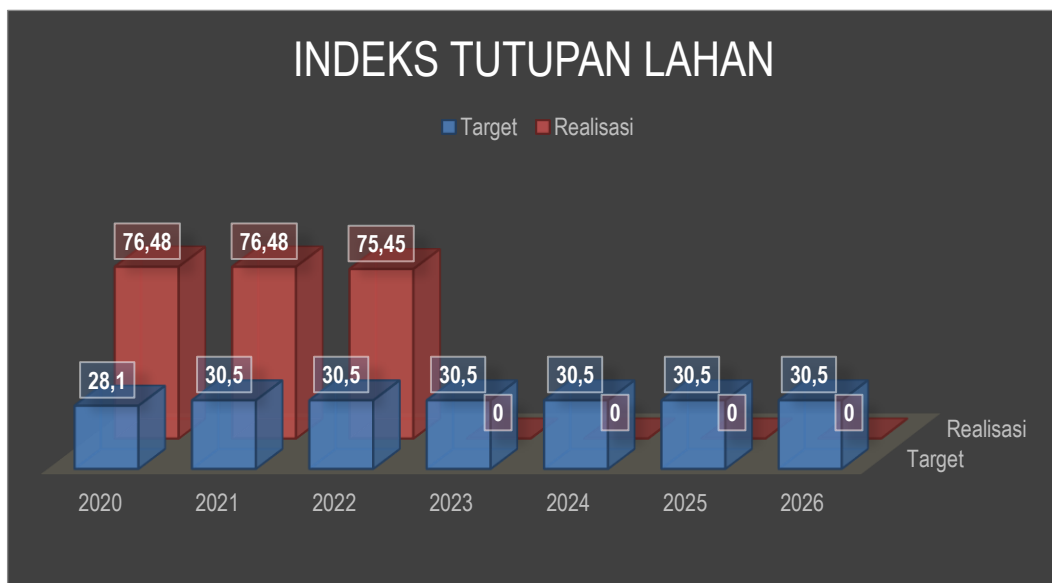
berarti terjadi penurunan realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Luwu Timur , namun masih tetap berada dalam posisi baik, artinya terjadi fluktuasi capaian dari tahun ke tahun terhadap realisas kinerja serta capaian kinerja pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Luwu Timur. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Adapun capaian indikator kualitas lingkungan hidup daerah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



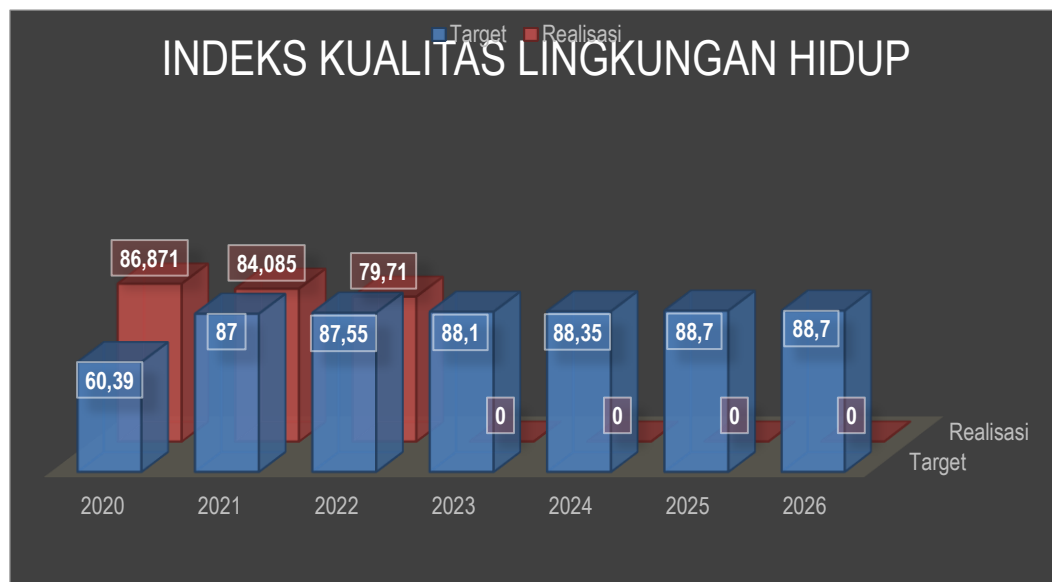
(Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup 2023)



(Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup 2023)



(Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup 2023)



(Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup 2023)

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian IKLHD Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	%	2020	86,87	146,63
		2021	84,08	139,21
		2022	79,71	91,05



❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi	Tar get	Realis asi
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	87,55	79,71	88,10	-	88,35	-	88,70	-	88,70	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ Kegagalan pencapaian Indikator Kinerja:**

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

- Penyebab tidak tercapainya target atau turunnya realisasi dari tahun-tahun sebelumnya adalah :
 - a. Perubahan aturan mengenai perhitungan IKLH (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang mengatur mengenai perubahan rumus, bobot pengali setiap indeks dan perubahan jumlah parameter yang dipersyaratkan;
 - b. Nilai IKA Kabupaten Luwu Timur yang berubah secara signifikan. Perhitungan IKA pada tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada aturan baru tersebut ditentukan bahwa nilai maksimum IKA adalah **70** (Lampiran 1 Permen KLHK No 27 Tahun 2021) sedangkan nilai IKA Luwu Timur pada tahun sebelumnya (2021) adalah 80,69;
 - c. Walaupun ada penurunan pada nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dari tahun 2021 namun terdapat peningkatan yang signifikan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Hasil perhitungan IKA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 berdasarkan data pemantauan kualitas air pada 7 sungai dan 2 danau adalah 66,52 yang berada pada kategori "Sedang". Jika data pemantauan Kualitas air pada tahun 2021 dihitung menggunakan rumus perhitungan yang baru maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 sebesar 58,64. Berdasarkan nilai capaian IKA tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, maka nilai IKA mengalami kenaikan sebesar 13,44%. Peningkatan nilai IKA tersebut dapat terjadi dikarenakan 83% titik pemantauan berada pada status mutu yang "Baik" sedangkan hanya sekitar 17% yang berada pada status mutu "Cemar Ringan";



d. Dengan menggunakan rumus dan bobot perhitungan IKLH yang sama seperti pada tahun 2022, maka diperoleh nilai IKLH tahun 2021 sebesar **78,33** (*84.085 jika menggunakan rumus lama*). Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai IKLH kabupaten Luwu Timur tahun 2022 ini mengalami kenaikan sekitar 1,38 poin pada tahun 2022 yakni **79,71**.

- Alternative solusi yang dilakukan :
 - a. Melakukan koordinasi dengan sektor terkait;
 - b. Melakukan Job Description terhadap SDM yang ada;
 - c. Pengawasan kegiatan Usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, dll mendukung keberhasilan mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan;
 - d. Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang baru;
 - e. Penetapan baku mutu limbah cair serta pengawasan pengelolaan dan pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha dan rumah pada air permukaan, sangat membantu terjaganya kualitas air baik itu sungai dan/ danau yang kerap digunakan sebagai air baku dalam keseharian masyarakat;
 - f. Program pengelolaan sampah yang baik juga secara langsung berdampak pada kebersihan, kelestarian dan kenyamanan tempat tinggal masyarakat;
 - g. Selain Kawasan Hutan yang masih terjaga juga pelaksanaan pemantauan udara ambient diharapkan dapat menunjang terciptanya udara yang sehat dan bebas dari polusi.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.
 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
 - c. Program Pengelolaan Persampahan
 - Kegiatan Pengelolaan Persampahan



- Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

- Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
- Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.

B. Indikator Kinerja "**Indeks Resiko Bencana**"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase indeks kualitas lingkungan hidup daerah adalah :

$$R = H \times \frac{V}{C}$$

Dimana :

R = Risk (Risiko)

H = Hazar (Bahaya)

V = Vulnerability (kerentanan)

C = Capacity (Kapasitas)

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. **Komponen bahaya** adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. **Komponen kerentanan** adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara **komponen kapasitas** adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan



tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memerhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/kota.

Untuk indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) pada tahun 2022, ditargetkan dengan nilai 202 (tinggi) dan realisasi target kinerja menurun menjadi 176,14 (risiko tinggi). Nilai IRB tersebut mengalami penurunan karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. ***"Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun"***. Semakin kecil nilai IRBI berarti semakin baik, IRBI yang turun merupakan indikasi adanya investasi di bidang Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Program penanggulangan bencana dapat mengurangi risiko. **IKD** dan **IRBI** menjadi **RAPOR** bagi **Pemerintah Daerah** di bidang penanggulangan bencana.

Berdasarkan Buku IRBI Tahun 2021, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat 20 kelas Risiko Tinggi dengan skor 195.10, sedangkan di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat kedua Kelas Risiko Tinggi. Jika dibandingkan dengan target nilai 202, maka mengalami penurunan nilai IRB, namun masih berada pada kelas risiko tinggi

Adapun Trend Nilai Indeks Risiko Bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)									
Kabupaten/Kota	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kelas Risiko
Luwu Timur	202	202	202	202	202	202	195.10	176.14	Tinggi

(Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022)

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga tidak ada target pada tahun-tahun sebelumnya).



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	2020	202	-
		2021	195.10	-
		2022	182.45	111%

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (Untuk Indikator Kinerja Indeks Resiko Bencana (IRB) merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026).

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	202	176.14	202	-	202	-	202	-	202	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja:**

1. Indeks Resiko Bencana (IRB)

- Penyebab tercapainya target atau turunnya tingkat resiko bencana dari tahun-tahun sebelumnya adalah :
 - a. Meningkatnya koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana;
 - c. Penyusunan target program/kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan;
 - d. Ketersediaan data dan informasi yang akurat terkait kebencanaan;
 - e. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang dilingkup OPD.
- Alternative solusi yang dilakukan :
 - a. Memaksimalkan pendampingan pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana yang ada di desa melalui dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK);
 - b. Memaksimalkan pendampingan pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana yang dilaksanakan disekolah-sekolah ;
 - c. Mengusulkan proposal bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi melalui PNPB;



- d. Memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait, seperti Dinas PUPR, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, BASARNAS, DAMKAR, Dinas Sosial;
- e. Memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti tim relawan penanggulangan bencana yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan, BASARNAS, Tin SAR, TAGANA, PMI;
- f. Pelaksanaan pelatihan teknis sebagai upaya peningkatan kapasitas Tim Penanggulangan Bencana;
- g. Mencermati realisasi belanja kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun;
- h. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan untuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

1. Indeks Resiko Bencana (IRB)

a. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :

- Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana);
- Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi;
- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp.5.121.370.625 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.4.889.145.701 atau 95,47% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 4,53%. Jika disimpulkan realisasi penggunaan anggaran dengan realisasi kinerja bahwa anggaran yang disediakan untuk menurunkan indeks resiko bencana berhasil digunakan dengan efektif dan efisien.

Misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"** dengan tujuan **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani"**. Untuk mencapai misi 4, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia, Kesehatan, Rumah Sakit, Pendidikan, Perhubungan, Pemerintahan,



Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Pertanian dan Bapelitbangda.

Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN* " dengan 2(dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	A	A**	80,16**
2.	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	BB	B	64,26
Rata-Rata Capaian Kinerja			72,21%		

A. Indikator Kinerja "*Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

Hasil Evaluasi Dari Kementerian Dalam Negeri tentang IPKD

Untuk indikator *Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)* pada tahun 2022 ditargetkan predikat A dan realisasi kinerja dengan predikat A (untuk angka sementara), karena penetapan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupate/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan belum ada sampai dengan saat ini, sehingga belum bisa dilakukan perbandingan target capaian kinerja IPKD dengan tahun lalu. Dengan melihat hasil pengukuran IPKD tahun 2021 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur masuk klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang dengan kategori **BAIK** atau predikat **A**. Adapun tabel Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota Se-Sulawesi Selatan Klaster Sedang Tahun Anggaran 2021

No	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1.	Luwu Timur	14,988	19,1379	11,1207	15	4,9150	15	80,1614	Baik	A
2.	Bantaeng	12,004	20	14,4828	10	3,2398	15	74,7270	Perlu Perbaikan	B



3.	Pangkajene Kepulauan	10,327	18,2759	7,5000	20	3,0166	15	74,1197	Perlu Perbaikan	B
4.	Luwu Utara	6,654	19,6552	8,2759	10	2,3007	15	61,8856	Perlu Perbaikan	B
5.	Bulukumba	9,565	13,7931	12,9310	10	2,6234	10,0050	58,9175	Perlu Perbaikan	B
6.	Wajo	7,449	19,8276	5,4310	15	1,5956	5,0100	54,3132	Perlu Perbaikan	B
7.	Tana Toraja	7,998	12,0690	7,7586	15	2,5781	0	45,4039	Sangat Perlu Perbaikan	C

(Sumber Data : Bapalitbangda Tahun 2023)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1(satu) tahun sebelum tahun berjalan. Pengukuran IPKD dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait dengan dokumen RPJMD dan RKPD;
2. Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait Dokumen KUA-PPAS dan APBD;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD; dan
4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi :

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Penyerapan anggaran;
5. Kondisi keuangan daerah; dan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

B. Indikator Kinerja **"Nilai Akuntabilitas Kinerja"**.

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Nilai SAKIP Daerah adalah :



Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2022 ditargetkan predikat BB dan realisasi kinerja adalah B. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan diperencanaan kinerja tidak dapat dicapai atau belum bisa naik predikat dari B ke BB, namun demikian untuk komponen nilai mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 nilai akuntabilitas kinerja mengalami peningkatan pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga tren implementasi SAKIP cenderung terjadi penguatan dengan hasil nilai yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Artinya penilaian hasil evaluasi atas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada setiap tahunnya mengalami peningkatan nilai yang berarti bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kabupaten Luwu Timur sudah menunjukkan progres peningkatan dan kemajuan yang baik. Adapun hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Nilai			
		Bobot	2020	2021	2022
a.	Perencanaan Kinerja	30	17,04	18,01	18,83
b.	Pengukuran Kinerja	30	15,22	16,01	19,01
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,91	11,91	12,02
d.	Evaluasi Internal	25	5,48	5,48	14,40
e.	Capaian Kinerja	-	11,41	11,41	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,06	62,82	64,26
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B

(Sumber data: Hasil evaluasi AKIP Thn 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & RB Tahun 2023)

❖ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut;

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	2020	-	-
		2021	A (80,16)	-
		2022	A (80,16)**	-

Capaian Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Nilai SAKIP Daerah	Predikat	2020	B	61,06
		2021	B	62,82
		2022	B	64,26

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A		A	-	A	-	A	-	A	-

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi
1.	Nilai SAKIP Daerah	BB	B	BB	-	A	-	A	-	A	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Keberhasilan pencapaian sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dipengaruhi oleh:
 - Kapasitas Manajemen SDM pengelolaan keuangan yang lebih renponsif dan kerjasama yang baik ;
 - Penguatan sistem pengendalian intern dimana dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap triwulan;
 - Intensifikasi koordinasi dengan seluruh perencana SKPD mengenai peraturan perundang-undangan terkait penyusunan APBD;
 - Monitoring dan Evaluasi atas penganggaran SKPD secara berkala;
 - Pelaporan APBD secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Faktor yang menghambat/kegagalan pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja :
 - Perjenjangan/Cascading kinerja pada leven PD belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan critical success factor (CSF) atas pencapaian kinerja yang menyebabkan



perjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat , serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;

- Masih terdapat indikator kinerja belum spesifik, terukur, relevan, orientasi hasil dan tepat level pengampu kinerja;
- IKU Pada level Pemda terindikasi belum dapat mengidentifikasi kinerja prioritas utama yang akan diselesaikan;
- Masih terdapat formulasi indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup;
- Laporan kinerja PD belum secara merata menyampaikan informasi yang memadai tentang analisis faktor penguat atau penghambat capaian target kinerja, namun baru sebatas pada uraian pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Selain itu belum dijelaskan solusi perbaikan khususnya pada program yang tidak mencapai target untuk perencanaan dan pelaksanaan tahun berikutnya;
- Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya;
- Aplikasi e-SAKIP yang sudah dibangun belum sesuai yang diharapkan tim evaluator Kementerian PANRB;
- Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kinerja belum dilaksanakan secara menyeluruh dan maksimal;
- Laporan hasil evaluasi internal bersifat kompilasi sehingga belum menunjukkan catatan yang spesifik per PD;
- Evaluasi hasil pengukuran kinerja masih baru berfokus pada realisasi anggaran dan fisik, belum menjelaskan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan program.
- Kualitas evaluasi internal SAKIP yang masih kurang.

❖ **Alternative /Solusi pemecahan masalah :**

A. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

- Melakukan pembahasan tindak lanjut bersama tim APIP Inspektorat agar tidak ada temua yang berulang;
- Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bersama OPD;
- Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan sesuai kebutuhan.

B. Nilai Akuntabilitas Kinerja :

- Melakukan reviu dan penyempurnaan kualitas perjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke terendah dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya memanfaatkan hasil perjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengungkit kinerja;



- Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau manfaat langsung yang dirasakan masyarakat disertai penetapan target yang terukur;
- Menyempurnakan indikator kinerja agar lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria yang spesifik, terukur, relevan dan cukup dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja daerah;
- Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja berkala tidak terbatas pada realisasi keuangan dan fisik, namun mengacu pada ketercapaian PK (pejabat struktural) dan SKP (kinerja individu). Selanjutnya memanfaatkan hasil pengukuran tersebut sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
- Menyampaikan laporan kinerja Pemda maupun PD melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik;
- Meningkatnya kualitas laporan kinerja khususnya pada PD dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, melengkapi perbandingan dengan target jangka menengah dan target provinsi dan/atau nasional, dan menghitung efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja. Selanjutnya mendorong pemanfaatan dari laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;
- Memberikan catatan spesifik pada masing-masing PD terkait evaluasi implementasi SAKIP, meningkatkan kualitas evaluasi tersebut dengan memberikan penajaman catatan terkait kualitas komponen penilaian dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Para Pengelola SAKIP melalui bimtek atau Coaching SAKIP;
- Melibatkan seluruh tingkatan pada setiap perangkat daerah, mulai dari level pejabat eselon II sampai dengan eselon terendah dalam perencanaan kinerja.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;



- b. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Rep Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran ;
 - Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota;
 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
- d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
- ✓ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - Penilaian Barang Milik Daerah;
 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan barang Milik Daerah;
 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Penataan Kelembagaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp.325.785.726.602 dengan realisasi sebesar Rp.320.015.632.590 atau 98,23% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,77%.



Sasaran Strategis 9

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK* " dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	IKM Pelayanan SPM	Nilai	82.42	91,65	111,20%
2.	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	82,21	87,80	106,80%
Rata-Rata Capaian Kinerja			109%		

A. Indikator Kinerja "*IKM Pelayanan SPM*"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh nilai Indeks Pelayanan SPM adalah :

Nilai IKM terhadap dihitung dengan menggunakan nilai "rata-rata Tertimbang" terhadap masing-masing unsur pelayanan, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan, maka setiap unsur yang dikaji memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1 \times X$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji;

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Layanan} \times 25$$

Keterangan :

Ruang Lingkup IKM antara lain meliputi :

persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk/spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Penerapan dan Pencapaian SPM yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 ditargetkan dengan



nilai sebesar 82,42 dan realisasi kinerja adalah 91,65 atau predikat **TUNTAS UTAMA** dengan persentase capaian sebesar 111,20%. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian realisasi kinerja yang melebihi target pada indikator kinerja tersebut. Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM ini merupakan pencapaian tahun pertama sesuai dengan IKU 2022-2026 Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2022, sehingga tidak ada perbandingan data target dan capaian realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penilaian IKM Pelayanan SPM ini baru pertama kalinya dilakukan Evaluasi Penerapan SPM berdasarkan e-SPM Secara Nasional yang bersumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik. Adapun hasil penilaian untuk tingkat provinsi sulawesi selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**HASIL EVALUASI PENERAPAN IKM PELAYANAN SPM PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

No.	Pemda	Pendidikan	Kesehatan	Pekerjaan Umum	Perumahan Rakyat	Trantibum Linmas	Sosial	Rata-Rata	IP
1.	Prov.Sulawesi Selatan	85,58	99,20	100,00	100,00	100,00	100,00	97,46	TUNTAS UTAMA
2.	Kepualaun Selayar	90,76	92,40	99,17	89,49	98,47	97,95	94,71	TUNTAS UTAMA
3.	Bulukumba	100,00	94,37	95,11	100,00	100,00	94,56	97,34	TUNTAS UTAMA
4.	Bantaeng	100,00	92,53	77,07	96,67	70,96	100,00	89,54	TUNTAS MADYA
5.	Jeneponto	57,94	78,41	100,00	41,30	88,80	98,90	77,56	TUNTAS PRATAMA
6.	Takalar	100,00	29,13	54,79	52,55	78,97	81,69	66,19	TUNTAS MUDA
7.	Gowa	84,29	86,77	96,67	94,17	98,49	95,78	92,70	TUNTAS UTAMA
8.	Sinjai	98,11	81,77	87,91	100,00	99,56	100,00	94,56	TUNTAS UTAMA
9.	Bone	85,21	92,53	100,00	60,00	95,51	93,50	87,79	TUNTAS MADYA
10.	Maros	88,33	98,73	100,00	18,97	84,16	99,73	81,65	TUNTAS MADYA
11.	Pangkep	80,21	92,65	94,23	100,00	91,96	100,00	93,18	TUNTAS UTAMA
12.	Barru	92,37	82,29	100,00	100,00	100,00	94,32	94,83	TUNTAS UTAMA
13.	Soppeng	100,00	100,00	100,00	97,50	100,00	99,47	99,50	TUNTAS UTAMA
14.	Wajo	84,15	92,21	100,00	100,00	58,74	81,07	86,03	TUNTAS MADYA
15.	Sidrap	80,19	87,24	90,08	100,00	96,30	98,67	92,08	TUNTAS UTAMA
16.	Pinrang	88,91	100,00	99,31	96,67	95,14	99,40	96,57	TUNTAS UTAMA
17.	Enrekang	100,00	86,65	100,00	100,00	100,00	100,00	97,78	TUNTAS UTAMA
18.	Luwu	92,30	88,21	71,48	100,00	93,45	92,78	89,70	TUNTAS MADYA
19.	Tana Toraja	96,13	98,78	100,00	97,33	100,00	100,00	98,71	TUNTAS UTAMA
20.	Luwu Utara	99,94	89,90	98,89	90,02	82,17	99,81	93,46	TUNTAS UTAMA
21.	Luwu Timur	99,87	90,45	68,05	100,00	91,78	99,75	91,65	TUNTAS UTAMA
22.	Toraja Utara	6,47	100,00	83,54	72,22	96,21	100,00	85,74	TUNTAS MADYA
23.	Kota Makassar	98,53	94,79	79,92	60,44	97,78	100,00	88,58	TUNTAS MADYA
24.	Pare-Pare	92,52	80,37	89,83	97,31	96,88	100,00	92,82	TUNTAS UTAMA



25.	Palopo	66,38	72,41	86,03	100,00	78,51	100,00	83,89	TUNTAS MADYA
	RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN	88,97	88,07	90,88	86,59	91,75	97,10	90,56	
	RATA-RATA NASIONAL	88,97	88,07	90,88	86,59	91,75	97,10	90,56	

(Sumber Data : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri 2023)

IKM merupakan cara untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat menerima layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dan keberhasilan pelayanan penyelenggaraan publik, yang dilakukan melalui survei IKM. Selain itu, hal penting yang harus diperhatikan untuk mencapai peningkatan IKM adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana telah diatur dalam UU Nomor 32/2004 Pasal 11 ayat (4) yang menyebutkan "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. SPM merupakan alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata berdasarkan jenis pelayanan, indikator, nilai, dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan. Adapun Bidang urusan yang menjadi target survey IKM adalah :

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat;
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Bidang Urusan Sosial;

B. Indikator Kinerja "**IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan** "

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Angka Harapan Lama Sekolah adalah :

Nilai IKM terhadap dihitung dengan menggunakan nilai "rata-rata Tertimbang" terhadap masing-masing unsur pelayanan, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan, maka setiap unsur yang dikaji memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji;

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$



Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Layanan x 25

Keterangan :

Ruang Lingkup IKM antara lain meliputi : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk/spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2022 yang merupakan pencapaian tahun pertama sesuai dengan IKU Kabupaten 2022-2026 dan perjanjian kinerja ditargetkan dengan nilai 82,21 dan capaian realisasi sebesar 87,80 dengan persentase capaian 106,80%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target indikator IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Karena Indikator ini merupakan pencapaian tahun pertama sehingga tidak ada perbandingan target realisasi pada tahun sebelumnya. Adapun tabel perhitungan IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN TAHUN 2022

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
2	4	3	3	4	3	3	4	3	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
8	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
9	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
10	4	4	3	4	3	3	3	3	3	
11	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
12	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
13	4	3	4	4	3	4	3	3	4	
14	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
15	4	4	4	4	4	3	4	4	4	



16	3	4	4	4	4	3	4	4	4
17	3	4	3	4	3	3	4	3	4
18	3	3	3	4	3	3	4	4	4
19	3	3	3	4	3	4	3	3	4
20	4	4	3	4	3	4	4	3	4
21	3	4	3	4	4	4	4	3	4
22	4	3	4	4	3	4	4	3	4
23	3	3	3	4	3	3	3	2	4
24	3	3	3	4	3	3	3	3	4
25	4	4	4	4	4	4	3	4	4
26	3	3	3	4	3	4	3	3	4
27	4	3	3	4	4	4	4	4	4
28	3	3	4	4	3	4	4	4	4
29	3	3	4	4	3	3	4	4	4
30	4	4	3	4	3	3	4	3	4
31	3	4	3	4	3	4	3	4	4
32	4	3	3	4	4	4	4	4	4
33	4	3	4	4	4	4	4	3	4
34	4	4	4	4	4	4	3	3	4
35	3	3	3	4	3	3	3	3	4
36	4	3	4	4	3	4	4	4	4
37	4	4	3	4	3	4	4	4	4
38	4	3	3	4	4	3	4	3	4
39	3	3	2	4	3	2	3	2	3
40	3	4	4	4	3	3	4	3	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	3	3	3	4	3	3	3	3	4
43	4	3	3	4	4	4	4	4	4
44	4	3	4	4	4	4	4	4	4
45	4	3	3	4	3	3	3	4	4
46	4	3	3	4	3	3	4	4	4
47	3	4	3	4	3	4	3	4	3
48	3	3	3	4	3	3	4	3	4
49	4	4	3	4	3	3	3	3	4
50	3	3	3	4	3	3	3	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	3	3	4	3	4	3	4	4
53	3	3	3	4	3	3	3	3	4
54	4	4	3	4	4	3	4	3	4
55	4	4	4	4	3	4	4	4	4
56	3	3	3	4	3	3	3	3	4
57	4	4	3	4	3	4	4	3	4
58	3	3	3	4	3	3	4	3	4



59	4	4	3	4	3	3	3	3	4
60	3	3	3	4	3	3	3	3	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	3	3	3	4	3	3	3	3	4
63	3	3	3	4	3	3	3	3	4
64	3	3	3	4	3	3	3	3	4
65	4	3	4	4	4	3	4	4	4
66	3	3	3	4	3	3	3	4	4
67	3	3	3	4	3	3	3	3	3
68	3	3	3	4	3	3	4	4	4
69	4	4	3	4	3	3	4	3	4
70	4	3	3	4	3	3	4	3	3
71	3	4	3	4	3	3	3	3	4
72	4	3	3	4	3	4	3	4	4
73	4	3	3	4	3	4	3	4	3
74	4	3	3	4	3	3	4	3	4
75	3	3	4	4	3	3	3	4	3
76	3	4	3	4	3	4	3	3	3
77	4	3	3	4	3	4	3	3	3
78	3	3	3	4	3	3	3	3	4
79	4	3	3	4	3	4	4	4	4
80	3	4	3	4	4	3	3	3	4
81	3	4	3	4	3	3	3	3	4
82	4	3	3	4	3	4	3	3	3
83	4	3	3	4	3	3	4	3	4
84	4	3	4	4	3	3	4	3	3
85	4	4	3	4	3	4	4	4	4
86	4	4	4	4	3	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4	3	3	3	4
88	4	4	3	4	3	3	4	4	3
89	3	3	4	4	3	3	3	3	4
90	4	4	4	4	3	3	4	3	4
91	4	4	4	4	3	3	4	4	4
92	4	4	4	4	3	4	4	3	4
93	4	3	4	4	4	4	4	4	4
94	3	4	3	4	3	3	3	4	4
95	3	3	4	4	3	3	4	3	4
96	4	4	4	4	4	4	3	3	4
97	4	4	3	4	3	3	3	4	3
98	4	3	4	4	3	4	4	4	4
99	4	3	3	4	3	4	3	4	3
100	4	3	4	4	3	4	4	4	4
101	3	3	3	4	3	3	3	3	3



102	3	3	3	3	3	3	3	3	3
103	3	3	3	4	3	4	4	4	4
104	3	4	3	4	3	4	4	4	4
105	4	3	3	4	4	4	3	4	4
106	3	3	3	4	3	3	3	3	4
107	3	4	4	4	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	3	4	3	4	4	3	3	3	4
110	3	3	3	4	4	4	3	3	4
111	4	4	4	4	3	4	3	3	4
112	3	4	3	4	4	3	4	3	2
113	3	3	3	4	3	3	3	3	4
114	3	4	3	4	4	3	3	4	4
115	3	4	3	4	3	3	4	3	3
116	4	3	3	4	3	3	3	3	3
117	3	4	3	4	3	3	4	4	4
118	3	3	3	4	3	3	3	3	3
119	3	3	3	4	3	3	3	3	3
120	4	4	3	4	3	4	4	4	4
121	3	4	3	4	3	3	3	3	4
122	3	4	4	4	4	4	4	4	4
123	3	4	4	4	4	3	4	4	1
124	3	3	2	4	4	4	3	3	4
125	3	3	3	3	3	3	4	3	4
126	3	3	3	4	3	3	3	3	3
127	4	4	4	4	3	3	3	3	3
128	4	4	3	4	3	3	3	3	3
129	4	3	3	4	3	4	3	3	3
130	3	3	3	4	3	3	3	3	3
131	4	4	4	4	4	4	3	3	3
132	4	3	3	4	4	4	4	4	4
133	4	3	3	4	3	4	4	4	4
134	3	3	3	4	3	3	3	3	3
135	3	3	3	4	3	3	3	3	3
136	3	3	3	4	3	3	3	3	4
137	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	4	3	3	4	3	4	4	3	4
139	3	3	4	4	4	3	4	4	4
140	3	4	3	4	3	3	4	4	4
141	3	3	3	4	3	3	3	3	3
142	3	3	3	4	3	3	3	3	4
143	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	3	3	3	4	3	4	4	4	4



145	3	3	3	4	3	3	4	4	4
146	4	4	3	4	3	3	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	3	3	3	4	3	3	4	4	4
149	3	4	4	4	3	3	3	3	3
150	4	3	3	4	4	3	4	3	4
151	3	3	3	4	3	3	3	3	3
152	3	3	3	4	3	3	4	3	4
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4
155	4	4	3	4	4	4	4	4	4
156	4	4	4	4	4	3	3	4	4
157	4	3	3	4	4	4	3	3	4
158	3	4	4	4	4	3	4	3	4
159	4	4	4	4	4	3	3	3	4
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4
163	3	3	4	4	4	3	4	4	4
164	4	3	2	4	3	3	4	4	4
165	3	3	3	4	3	3	3	3	4
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4
167	3	4	4	4	3	3	3	4	4
168	3	3	3	4	3	4	3	4	4
169	4	3	4	4	3	4	4	3	3
170	4	3	3	4	3	4	4	4	4
171	3	4	4	4	3	3	3	3	3
172	4	4	3	4	3	3	3	4	4
173	3	3	3	4	4	3	4	4	4
174	3	3	3	4	4	3	3	4	4
175	4	4	3	4	4	4	4	4	4
176	3	3	3	4	3	3	3	4	4
177	4	4	4	4	4	4	4	4	4
178	3	3	3	3	3	3	3	3	4
179	4	4	4	4	4	4	3	4	4
180	4	4	3	4	4	4	4	4	4
181	3	3	3	4	3	4	3	3	4
182	4	3	4	4	3	3	3	3	3
183	3	4	4	4	3	4	4	3	4
184	4	3	3	4	3	3	3	3	4
185	3	4	3	4	3	3	3	3	4
186	3	3	3	4	3	3	3	3	4
187	4	4	4	4	3	3	3	3	4



188	3	3	3	4	3	4	3	3	4
189	3	4	3	4	3	3	3	3	4
190	4	3	3	4	3	3	3	3	4
191	3	3	3	4	3	3	3	3	3
192	3	3	4	4	3	4	3	3	4
193	3	4	4	4	3	4	3	3	4
194	4	4	3	4	3	4	3	3	3
195	3	3	3	4	3	4	3	3	3
196	4	4	4	4	3	3	3	4	3
197	4	4	3	4	4	4	4	4	4
198	4	4	3	4	3	3	3	3	3
199	4	4	3	4	3	4	3	3	4
200	3	4	3	4	3	3	3	3	3
201	3	3	4	4	3	3	3	3	3
202	4	4	4	4	4	4	4	4	4
203	3	3	4	4	3	4	3	3	4
204	4	3	3	4	3	4	3	3	4
205	3	2	2	4	3	3	3	3	3
206	4	3	4	4	3	3	3	3	3
207	3	3	3	3	3	3	3	3	3
208	4	4	4	4	4	4	4	4	4
209	4	4	4	4	4	4	4	4	4
210	3	4	3	4	3	3	3	3	4
211	4	4	4	4	4	4	4	4	4
212	4	4	4	4	4	3	3	3	4
213	4	3	3	4	3	3	3	3	3
214	4	3	3	4	4	4	4	4	4
215	4	4	4	4	4	4	4	4	4
216	3	4	3	4	4	4	4	4	4
217	4	4	4	4	4	4	3	3	4
218	3	3	3	4	3	3	3	3	4
219	4	4	4	4	3	3	3	3	4
220	4	3	3	4	3	4	3	3	4
221	3	3	3	4	3	3	3	3	3
222	4	4	3	4	4	3	3	4	4
223	4	4	4	4	4	4	4	4	4
224	3	4	3	4	4	4	4	3	4
225	3	3	3	4	4	4	3	3	3
226	4	4	3	4	3	4	4	4	4
227	3	4	3	4	3	3	3	4	4
228	3	4	3	4	4	4	3	3	3
229	4	3	4	4	4	3	3	3	3
230	4	3	3	4	3	3	3	3	3



231	4	3	3	4	3	4	4	3	3
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	3	4	4	4	3	4	3	4	4
234	3	4	3	4	3	4	4	4	3
235	4	3	4	4	3	4	3	3	3
236	3	4	3	4	4	3	3	3	3
237	4	4	4	4	4	4	4	4	4
238	3	3	3	4	3	3	3	3	3
239	3	4	4	4	3	4	3	3	3
240	4	3	4	4	4	3	3	3	3
241	4	4	3	4	3	4	3	4	4
242	4	3	4	4	4	4	3	4	3
243	4	3	4	4	3	4	4	3	3
244	3	3	3	4	3	3	3	3	3
245	4	3	4	4	3	4	3	3	3
246	3	3	3	4	3	3	3	3	3
247	4	4	4	4	4	3	3	4	3
248	3	3	4	4	4	3	3	3	3
249	4	4	4	4	4	4	4	4	4
250	3	3	3	4	3	3	3	4	4
251	3	3	3	4	3	3	3	4	4
252	3	3	3	4	3	3	4	4	3
253	3	3	3	4	3	3	3	4	4
254	3	3	3	4	3	3	4	4	3
255	3	3	3	4	3	3	4	4	3
256	3	3	3	4	3	3	3	3	4
257	3	3	3	4	3	3	3	3	4
258	3	3	3	4	3	3	3	3	4
259	3	3	3	4	3	3	3	3	4
260	2	3	3	4	3	3	3	2	3
261	3	3	3	4	3	3	3	3	3
262	3	4	4	4	3	3	4	4	4
263	4	4	4	4	3	3	3	3	4
264	3	3	3	4	3	3	3	3	3
265	4	4	3	4	3	3	3	4	4
266	4	4	4	4	4	4	4	4	4
267	4	4	4	4	4	4	3	4	4
268	3	3	3	4	3	3	3	3	3
269	3	4	3	4	3	3	4	3	4
270	4	4	4	4	3	3	3	3	4
271	4	4	3	4	3	3	3	4	4
272	4	3	4	4	3	3	3	3	4
273	4	3	3	4	3	3	4	3	4



274	4	4	4	4	4	4	4	4	4
275	3	4	3	4	3	3	4	3	4
276	4	3	4	4	3	3	3	3	4
277	3	3	3	4	3	3	3	3	4
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	3	3	4	4	3	3	3	3	4
280	3	3	4	4	3	4	4	3	4
281	4	4	4	4	3	4	4	4	3
282	3	3	3	4	3	4	4	3	4
283	4	4	4	4	3	4	4	3	4
284	3	4	3	4	3	3	3	4	4
285	3	3	3	4	3	3	3	3	4
286	3	3	3	4	3	3	3	3	4
287	3	3	3	4	3	3	3	3	4
288	3	3	3	4	3	3	3	3	4
289	3	3	3	4	3	3	3	4	3
290	4	3	3	4	4	4	4	4	3
291	3	4	4	4	4	3	3	3	3
292	3	3	4	4	3	3	3	3	3
293	4	3	3	4	3	3	3	4	3
294	4	3	3	4	3	4	3	3	3
295	4	3	4	4	3	3	3	3	3
296	3	3	3	4	3	4	4	4	4
297	4	4	4	4	4	4	4	4	4
298	3	3	3	4	3	3	4	4	4
299	4	3	3	4	3	3	3	3	3
300	4	4	3	4	3	4	3	3	3
301	3	4	4	4	3	4	4	3	3
302	4	4	4	4	3	4	4	4	4
303	3	4	3	4	4	4	3	3	3
304	4	3	4	4	4	3	3	3	3
305	4	3	3	4	3	3	3	3	3
306	4	3	3	4	3	4	4	3	3
307	4	4	4	4	4	4	4	4	4
308	3	4	4	4	3	4	3	4	4
309	3	4	3	4	3	4	4	4	3
310	4	3	4	4	3	4	3	3	3
311	3	4	3	4	4	3	3	3	3
312	4	4	4	4	4	4	4	4	4
313	3	3	3	4	3	3	3	3	3
314	3	4	4	4	3	4	3	3	3
315	4	3	4	4	4	3	3	3	3
316	4	4	3	4	3	4	3	4	4



317	4	3	4	4	4	4	3	4	3
318	4	3	4	4	3	4	4	3	3
319	3	3	3	4	3	3	3	3	3
320	4	3	4	4	3	4	3	3	3
321	3	3	3	4	3	3	3	3	3
322	4	4	4	4	4	3	3	4	3
323	3	3	4	4	4	3	3	3	3
324	3	3	4	4	3	3	3	3	4
325	3	4	4	4	4	4	4	4	4
326	4	4	4	4	4	4	4	4	4
327	4	4	4	4	4	4	4	4	4
328	3	4	4	4	4	4	4	4	4
329	3	4	3	4	4	4	3	3	4
330	4	4	4	4	4	4	4	4	4
331	3	3	3	4	4	3	4	4	4
332	4	3	3	4	3	4	4	4	4
333	3	3	3	4	3	3	3	3	4
334	3	3	3	4	3	3	4	3	4
335	3	4	4	4	4	4	4	4	4
336	3	4	3	4	3	4	4	4	4
337	4	4	4	4	4	4	4	4	4
338	4	4	4	4	4	4	4	4	4
339	3	4	3	4	3	3	3	3	4
340	4	4	4	4	3	3	3	3	4
341	3	3	3	4	3	4	3	3	3
342	3	3	3	4	4	4	3	3	3
343	4	4	3	4	3	3	3	3	3
344	4	4	3	4	3	4	4	3	3
345	4	4	4	4	4	4	4	4	4
346	3	3	3	4	3	4	3	3	3
347	4	3	3	4	3	3	3	3	3
348	3	3	3	4	4	4	4	4	4
349	4	3	3	4	3	3	3	3	3
350	4	3	3	4	4	4	4	4	4
351	3	3	3	4	4	3	3	3	4
352	3	3	3	4	3	3	3	3	4
353	3	3	3	4	3	3	3	3	4
354	3	3	3	4	3	3	3	3	4
• Nilai /Unsur	1230	1213	1185	1404	1169	1213	1209	1204	1299
NRR / unsur	3,494	3,446	3,366	3,989	3,321	3,446	3,435	3,420	3,690
NRR	0,388	0,383	0,374	0,443	0,369	0,383	0,382	0,380	0,410

*)



tertbg/ unsur										3,512
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan										87,80

(Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP)

Keterangan :

- U1 s.d U14 = Unsur-Unsur Pelayanan
- NRR = Nilai Rata-Rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM Tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah Nilai Per Unsur dibagi Jumlah Kuisisioner Yang terisi
- NRR Tertimbang = NRR Per Unsur x 0,111 per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,494
U2	Prosedur	3,446
U3	Waktu pelayanan	3,366
U4	Biaya/tariff	3,989
U5	Produk layanan	3,321
U6	Kompetensi pelaksana	3,446
U7	Perilaku pelaksana	3,435
U8	Sarana dan Prasarana	3,420
U9	Penanganan Pengaduan	3,690

IKM UNIT PELAYANAN (hasil konversi) :	87,80	=	Baik
--	--------------	----------	-------------

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian IKM Pelayanan SPM Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga tidak ada perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya).



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
IKM Pelayanan SPM	Nilai	2020	-	-
		2021	-	-
		2022	91,65	111,20%

Capaian IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut. (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga tidak ada perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	2020	-	-
		2021	-	-
		2022	87,80	106,80%

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026. (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga belum ada perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya)

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi	Tar get	Realis asi
1.	IKM Pelayanan SPM	82,42	91,65	84,75	-	85,68	-	87,78	-	90	-

(Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga belum ada perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya)

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi	Tar get	Realis asi
1.	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	82,21	87,80	84,31	-	86,23	-	88,10	-	88,32	-



❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

A. IKM Pelayanan SPM :

1. Dukungan personil dan sarana prasarana yang memadai walaupun belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal;
2. Pelatihan dan Pengembangan kapasitas para pelaku pelayanan

B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

1. Adanya kemudahan perizinan yang berbasis elektronik sehingga pendaftaran bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja;
2. Sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya pelayanan;
3. Kepekaan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan transparan.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan :**

A. IKM Pelayanan SPM

1. Penempatan tenaga/personil yang dilakukan secara merata sesuai kebutuhan dengan memaksimalkan personil yang ada sekarang untuk penyelenggaraan pelayanan;
2. Pemenuhan Sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;

B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1. Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka pendaftaran perizinan secara online;
2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan konsultasi secara offline maupun online;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Penguatan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan melakukan pelatihan dan konsultasi.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

A. IKM Pelayanan SPM

1. Program Pendidikan Anank Usia Dini;
2. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Program Pendidikan Non Formal;
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
10. Program Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota;
11. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
12. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



13. Program Penanggulangan Bencana;
14. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
15. Program Rehabilitasi sosial;
16. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
17. Program Penanganan Bencana;

B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar Rp.212.709.079.326 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.220.214.602.884 atau 103,53% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 0%.

Misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat dengan tujuan "Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Norma Ketertiban dan Ketentraman "**. Untuk mencapai misi 5, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidang ketertiban dan ketentraman, pemadam kebakaran dan penyelamatan dan kesatuan bangsa dan politik.

Sasaran Strategis 10

Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *TERPELIHARANYA RASA AMAN DAN DAMAI DALAM MASYARAKAT*" dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	76,72	65,36	85,19%
Rata-Rata Capaian Kinerja			85,19%		

B. Indikator Kinerja "**Indeks Ketertiban dan Ketentraman**"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase cakupan kinerja ketentraman dan ketertiban umum adalah :

Indikator indeks ketertiban dan ketentraman dibentuk oleh nilai rata-rata :

1. **Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara; = 9,06%**
2. **Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM ketenteraman dan ketertiban umum; = 55,82%**
3. **Persentase Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten; = 50,63**
4. **Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (%); =124**
5. **Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (%). = 87,33**

$$\begin{aligned} \text{Indeks Ketertiban dan Ketentraman} &= 9,06 + 55,82 \\ &+ 50,63 + 124 + 87,33 / 5 \\ &= 326,84 / 5 \\ &= 65,36 \end{aligned}$$



Untuk indikator kinerja indeks ketertiban dan ketentraman pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 76,72 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 65,36 dengan persentase capaian kinerja 85,19%. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan pencapaian target. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan target kinerja dan realisasi yang tidak relevan

sehingga sulit untuk dilakukan perbandingan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan IKU 2022-2026 yang menyesuaikan dengan RPJMD Baru 2021-2026, sehingga disimpulkan bahwa untuk indikator ini merupakan capaian tahun pertama berdasarkan IKU Kabupaten 2022-2026, sehingga tidak ada perbandingan yang relevan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya.

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Kinerja *Indeks Ketertiban dan Ketentraman* Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Indikator ini merupakan capaian tahun pertama berdasarkan IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga tidak ada

perbandingan capaian target dan realisasi tahun sebelumnya). dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	2020	-	-
		2021	-	-
		2022	65,36	85,19%

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisas i	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si
1	Indeks Ketertiban dan ketentraman	76,72	65,36	76,81	-	77,21	-	77,43	-	77,86	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran:**

- ✓ Jumlah pelanggaran perda masih terlalu tinggi;
- ✓ Persentase jumlah SDM terlatih yang ada masih dibawah 50%;
- ✓ Mobil Operasional kegiatan patroli yang masih terbatas;
- ✓ peran Satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat masih dianggap belum penting sehingga kurang perhatian;
- ✓ Cakupan wilayah Manajemen Kebakaran masih terbatas, mengacu pada permendagri 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di daerah disebutkan bahwa terpenuhinya prasarana pemadam kebakaran meliputi pos sektor disetiap kecamatan dan pos pemadam kebakaran setiap desa/kelurahan, sehingga pemenuhan wilayah manajemen kebakaran minimal ada disetiap kecamatan. Untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur terdapat 11 kecamatan dan sampai dengan tahun 2022 jumlah wilayah manajemen kebakaran yang tersedia masih 9 WMK dan masih ada 2 kecamatan yang belum memiliki WBK yang jika terjadi bencana kebakaran maka akan direspon oleh WMK kecamatan lain yang jarak tempuhnya jauh.
- ✓ Sarana dan prasarana pendukung yang masih terbatas.

❖ **Alternative Solusi Yang dilakukan :**

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar melalui Pendidikan dan Pelatihan. PNS pelaksana Satpol PP diikutkan untuk Diklat Jabatan Fungsional Pol PP dan Diklat PPNS bagi PNS yang memenuhi syarat;



- Anggota Satpol PP Non-PNS (upah jasa) diberikan program pelatihan-pelatihan kepomongprajaan agar dapat meningkatkan kemampuan membantu tugas pokok Satpol PP dalam penegakan Perda;
- melakukan monitoring terkait keterlibatan Satlinmas dalam pelaksanaan tugasnya dan berkoordinasi dengan Kepala Desa;
- Pembukaan Wilayan Manajemen Kebakaran (WMK) untuk daerah kecamatan yang belum memiliki WMK.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
 - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massal;
 - c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
 - f. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;
 - g. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - h. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara;
 - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b. Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS
- ✓ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota



Sub Kegiatan Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan,
penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.

- ✓ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan 'Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar Rp.9.820.948.440 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.9.552.850.104 atau 97,27% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,73%.

Misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Yang Berbasis Pada Agama dan Budaya"** dengan tujuan **"Meningkatkan Toleransi dan Kualitas Kehidupan Beragama serta Ketahanan Budaya Daerah "**. Untuk mencapai misi 6, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung secara terpadu oleh urusan yang membidang Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *MENINGKATNYA PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN* " dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Penerapan Nilai Agama dalam Masyarakat	%	95	71,9	75,68%
2.	Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat	%	95	53,79	56,62%
Rata-Rata Capaian Kinerja			66,15%		

A. Indikator Kinerja **"Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat"**

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat adalah :

Dimana : Cakupan Kinerja Kesejahteraan Rakyat

1. A = (Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang difasilitasi/Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang ditargetkan x100%
2. B = Jumlah jemaah haji yang difasilitasi/Jumlah jemaah haji x 100%
3. C = Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi/Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi yang ditargetkan x 100%
4. D = Jumlah petugas keagamaan yang diberikan insentif/Jumlah petugas keagamaan yang ditargetkan x 100% ,
5. E = Jumlah Rumah ibadah dan Lembaga keagamaan yang dibantu hibah/Jumlah Rumah ibadah dan lembaga keagamaan yang ditargetkan x 100%))

$$\text{Rata-rata Persentase (\%)} = \frac{A + B + C + D + E}{5}$$

- Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang difasilitasi = 12
- Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang ditargetkan = 12
- Jumlah Jemaah Haji = 74
- Jumlah Jemaah haji Yang di Fasilitas = 74
- Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi =0
- Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi yang ditargetkan = 0
- Jumlah petugas keagamaan yang diberikan insentif =95



- Jumlah petugas keagamaan yang ditargetkan = 95
- Jumlah Rumah ibadah dan Lembaga keagamaan yang dibantu hibah = 25
- Jumlah Rumah ibadah dan lembaga keagamaan yang ditargetkan = 42

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-Rata Persentase (\%)} &= \frac{(12/12 \times 100\%) + (74/74 \times 100\%) + (0/0 \times 100\%) + (95/95 \times 100\%) + (25/42 \times 100\%)}{5} \\
 &= \frac{(100) + (100) + (0) + (100) + (59,52)}{5} \\
 &= \frac{359,52}{5} \\
 &= 71,9
 \end{aligned}$$

Untuk Indikator *Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat* pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 95 dan realisasi kinerja 71,9 dengan persentase capaian sebesar 75,68%. Hal ini menunjukkan bahwa target tidak dapat dicapai atau kegagalan pencapaian target. Indikator ini merupakan capaian tahun pertama sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan IKU Kabupaten 2022-2026, sehingga tidak ada perbandingan capaian target dan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.

Kehadiran **agama** secara fungsional sebagai “perekat sosial”, memupuk solidaritas sosial, menciptakan perdamaian, membawa **masyarakat** menuju keselamatan, mengubah kehidupan seseorang menjadi kehidupan yang lebih baik, memotivasi dalam bekerja dan seperangkat peranan yang kesemuanya adalah dalam rangka memelihara kehidupan beragama dalam masyarakat. Nilai Agama terdiri dari beberapa bentuk yaitu **Aqidah**, merupakan sebuah sistem dari kepercayaan dan keyakinan yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, **Akhlak** yaitu seperangkat perilaku atau sifat dari seorang individu yang telah melekat dalam diri. Dari sifat-sifat tersebutlah, kemudian menimbulkan perbuatan yang mudah dilaksanakan tanpa harus memikirkan pertimbangan terlebih dulu. **Ibadah** yaitu sebuah bentuk pengabdian individu terhadap Tuhannya dengan berorientasikan pahala. Tujuan Pembentukan nilai-nilai agama dalam masyarakat yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Agar terhindar dari adanya krisis identitas diri yang membuat seorang individu tidak dapat menentukan nasibnya sendiri;
2. Menjadikan bekal berupa ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup untuk mewujudkan Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya;
3. Agar hidup seorang individu menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas;
4. Tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat luas khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.



Adapun untuk beragam contoh nilai-nilai dalam agama di masyarakat, antara lain;

1. Mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis dalam lingkungan bermasyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut.
2. Tidak menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi hasrat duniawi.
3. Memelihara keasrian dan kebersihan lingkungan dan alam sekitar.
4. Menyantuni anak-anak yatim piatu yang berada di panti asuhan disaat sedang memiliki banyak rejeki.
5. Tidak mengeksploitasi secara berlebih sumber daya alam yang tersedia untuk kelangsungan kehidupan generasi di masa mendatang.
6. Tidak melakukan perjudian dengan tujuan untuk menyambung hidup.
7. Tidak melakukan tindakan provokatif mengatasnamakan agama.
8. Menciptakan kedamaian dengan cara saling berbagi terhadap sesama.
9. Melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan.
10. Menjunjung tinggi perintah agama dan menjauhi segala larangan-Nya.
11. Tidak membuang sampah sembarangan.
12. Membantu teman saat tertimpa musibah tanpa memandang agama yang dianutnya.
13. Membantu masyarakat sekitar dalam membangun tempat peribadatan.
14. Mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
15. Mewujudkan cita-cita dengan menggunakan usaha sendiri tanpa harus berbuat kecurangan.
16. Tidak memaksakan kehendak individu lain untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita.
17. Mengedepankan tenggang rasa dalam bermasyarakat.
18. Bertoleransi dalam menjalani kehidupan sosial.
19. Tidak mencontek saat ujian sedang berlangsung.
20. Tidak mengganggu saat umat beragama lain sedang melakukan prosesi peribadatan.
21. Mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan.
22. Tidak membicarakan keburukan orang lain.
23. Memelihara kebersihan dan keutuhan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
24. Tidak menyebarkan berita bohong kepada masyarakat luas.
25. Tidak menyebarkan kebencian kepada masyarakat luas.
26. Memberikan masukan yang sifatnya positif terhadap kinerja pemerintah.
27. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara.
28. Tidak ikut mabuk-mabukan.
29. Tidak melanggar rambu lalu lintas saat sedang berkendara.
30. Selalu berpikir positif dalam menyikapi sesuatu.
31. Berperilaku sopan terhadap orang yang usianya lebih tua dari kita.
32. Bertanggung jawab ketika merusak barang yang bukan milik sendiri.



A. Indikator Kinerja **"Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat"**.

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah Cakupan pelaksanaan Kegiatan Kebudayaan dimana:

A=Persentase capaian kegiatan Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (%) (Dinas Lingkungan Hidup)

B=Persentase capaian kegiatan kebudayaan lokal yang dilestarikan (%)

C=Persentase capaian sanggar seni budaya yang dibina (%)

D=Persentase capaian kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%) (KesbangPol)

E=persentase capaian pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan (%)

F=persentase capaian sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan (%)

G=Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (%) (PMD)

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata (\%)} &= \frac{A+B+C+D+E+F+G}{7} \\ &= \frac{100+22,37+35,8+105+8,3+8,3+96,77}{7} \\ &= \frac{376,54}{7} \\ &= 53,79\end{aligned}$$

Untuk indikator *Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat* pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 95 dan realisasi kinerja sebesar 53,79% dengan persentase capaian kinerja sebesar 56,62% . Hal menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak dapat dicapai atau penerapan nilai-nilai budaya dalam masyarakat masih sangat rendah. Indikator ini merupakan capaian tahun pertama sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan IKU Kabupaten 2022-2026, sehingga tidak ada perbandingan capaian target dan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian *Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat* selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja ini merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga belum ada perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya) dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Cakupan Penerapan Nilai Agama dalam Masyarakat	%	2020	-	-
		2021	-	-
		2022	71,9	75,68%

Capaian *Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat* Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator ini merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga belum ada perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya) dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Cakupan Penerapan Nilai Budaya dalam Masyarakat	%	2020	-	-
		2021	-	-
		2022	95	56,62%

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

(Untuk Indikator ini merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga belum ada perbandingan)

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi
1	Cakupan Penerapan Nilai Agama dalam Masyarakat	95	71,9	95	-	95	-	95	-	95	-
2	Cakupan Penerapan Nilai Budaya dalam Masyarakat	95	53,79 %	95	-	95	-	95	-	95	-

❖ **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran kinerja :**

➤ **Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat**

- Penggunaan anggaran kurang maksimal pada kegiatan pemberian hibah disebabkan hibah 16 rumah ibadah dan 1 lembaga keagamaan yang tidak terbayarkan terkendala pada regulasi mekanisme



pengajuan proposal yang diterima setelah penetapan *KUA-PPAS* Perubahan dan kegiatan Wisata Religi tidak terlaksana karena anggaran yang tidak mencukupi.

➤ **Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat**

1. Masih kurangnya data kebudayaan lokal yang dilestarikan karena belum adanya dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah yang memuat semua data kebudayaan lokal yang perlu dilestarikan;
2. Masih kurangnya cagar budaya yang ditetapkan.
3. Target yang ditetapkan terlalu tinggi;
4. Tidak didukung ketersediaan anggaran;
5. Terbatasnya sumber daya manusia pada beberapa OPD Pengampu untuk melakukan tugas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

❖ **Alternative Solusi yang dilakukan :**

➤ **Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat**

1. Pengajuan proposal penerimaan dana hibah dilakukan atau diterima pihak terkait sebelum penetapan KUA-PPAS Pokok atau Perubahan atau sesuai dengan regulasi batas waktu pengajuan proposal dana hibah pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

➤ **Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat**

1. diperlukan pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan (PPKD) Kabupaten Luwu Timur yang dijadikan dasar untuk mengelola cagar budaya dan seni budaya yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu dibutuhkan SDM yang memadai untuk mengelola cagar budaya, seni budaya dan untuk melestarikan sejarah lokal yang ada di Kabupaten Luwu Timur disamping itu juga tentunya harus di dukung dengan Anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan kebudayaan;
2. Memaksimalkan fungsi tim dan forum yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk membantu melakukan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Luwu Timur;
3. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, sosialisasi, rapat koordinasi serta pemberdayaan forum-forum strategis yang terbentuk di daerah.

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang sasaran**

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual
2. Program Pengembangan Kebudayaan
Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota;



Sub Kegiatan Perlindungan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Wisata;
Kegiatan Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;

Sub Kegiatan Perlindungan, pemanfaatan, objek pemajuan tradisi budaya.

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

Kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;

Sub Kegiatan Peningkatan pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia kesenian tradisional;

4. Program Pembinaan Sejarah

Kegiatan Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah daerah kabupaten/kota;

Sub Kegiatan Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota;

Sub Kegiatan Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah.

5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan Peningkatan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota;

Sub Kegiatan Pendaftaran objek diduga cagar budaya;

Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya;

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah.

7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

✓ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian



kinerja tahun 2022 sebesar Rp.2.424.572.316 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.2.363.310.654 atau 97,42% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,53%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada era otonomi daerah, akuntabilitas menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi untuk mewujudkan **"good governance"** sekaligus **"clean government"**. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 11 sasaran strategis dengan 23 indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka besaran rata-rata capaian kinerja dan persentase realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	100,16%	102,09%	-2,09
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan	0,7031%	97,98	2.02
3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	60,16%	99,28	0,17
4	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	-100,55%	96,70%	3,30%
5	Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha	75%	97,18%	2,82%
6	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	77,73%	98,17%	1,83%
7	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	101,025%	95,47%	4,53
8	Meningkatnya	0%	98,23%	1,77%



	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan			
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	109%	103,53%	0
10	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	85,19%	97,27%	2,73%
11	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan	66,15%	97,42%	2,53%

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.844.563.564.465,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.786.561.532.844,79 atau 96,85%, berdasarkan data hasil audit BPK. Adapun rincian PAD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD
Tahun Anggaran 2022

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(RP)	(RP)	%
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	325.302.193.230,00	341.269.712.002,42	104,91
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	189.380.000.000	202.801.389.953,2	107.09
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	4.833.681.025	3.178.523.320,67	65,76
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	23.740.807.304	23.740.807.304	100
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	107.347.704.901	111.548.991.424,55	103,91

Sumber : BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Aspek Pendapatan Daerah

Hingga akhir tahun 2022, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.341.269.712.002,42 atau melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.325.302.193.230,00 atau mencapai 104,91%. Dari jumlah realisasi pendapatan daerah tersebut, masing-masing kelompok pendapatan daerah memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Realisasi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 202.801.389.953,2 atau sebesar 107.09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 189.380.000.000;
2. Realisasi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 3.178.523.320,67 atau sebesar 65,76 dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp. 4.833.681.025;

3. Realisasi Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Sebesar Rp. 23.740.807.304 atau sebesar 100 % dari target yang ditetapkan 23.740.807.304.
4. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 95.673.630.582,38 atau 99,94% dari target sebesar Rp. 95.729.307.082,00.

Aspek Belanja Daerah

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp	Rp	
5.1.	Belanja Operasi	1.101.225.155.728	1.060.208.662.323,49	96,28
5.2	Belanja Modal	303.462.165.792	289.744.487.264,93	95,48
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	707.600.000,00	20,22
5.4	Belanja Transfer	315.926.564.530,00	315.607.104.841	99,90
6.1	Penerimaan Pembiayaan	113.847.103.327,00	113.847.103.327,37	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.602.575.088,00	6.446.575.088,00	97,64
	Jumlah	1.844.563.564.465,00	1.786.561.532.844,79	96,85

Sumber : BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Di tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 Kategori "Sangat Baik"



Bupati Luwu Timur, H. Budiman menerima penghargaan pencapaian hasil pengawasan kearsipan Tahun 2022 dengan kategori "Sangat Baik" dari Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Halaman Rumah Jabatan Bupati Lutim, Selasa (20/12/2022). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, Moh. Hasan pada acara Pelepasan Tim Gempur Pustaka Kabupaten/Kota se-Sulsel untuk melakukan kunjungan langsung perpustakaan keliling ke beberapa sekolah di Kecamatan Malili.

2. Penghargaan Dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM)



Titing Suhartini Perempuan dari Kabupaten Luwu Timur berjasa dibidang Pendidikan, menerima penghargaan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM) pada puncak peringatan Hari Kartini tahun 2022 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (21/4/2022) di Baruga Patingalloang Rujab Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar. Penghargaan diserahkan Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Naoemi Octarina, disaksikan Gubernur Sulawesi

selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua DPRD Provinsi, Andi Ina Kartika Sari. Titing Suhartini menerima penghargaan didampingi Sekertaris Daerah, H. Bahri Suli dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, Sukarti.

3. Penghargaan Predikat Sebagai "Kabupaten Informatif" Tahun 2022 dari Komisi Informasi Sulsel



Kabupaten Luwu Timur sukses meraih Penghargaan tertinggi dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan predikat "Kabupaten Informatif " tahun 2022 dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk tahun 2022 ini, Luwu Timur satu-satunya Kabupaten/Kota di Sulsel yang berhasil mendapatkan Kategori Informatif dengan indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 93,84. Pencapaian ini

terbilang luar biasa mengingat dua tahun sebelumnya Luwu Timur hanya meraih predikat cukup informatif (2019) dan Menuju Informatif (2021).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh sisten III Pemprov Sulsel, Tautoto Tana Ranggina, kepada Bupati Luwu Timur, H. Budiman pada malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, di Hotel Claro Makassar, Jumat (02/12/2022)

4. Penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Kabupaten Luwu Timur berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dalam Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman pada puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke 353 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sulsel, Rabu (19/10/2022).

Kedua inovasi yang mendapatkan penghargaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 tersebut yakni Inovasi Martabak Berdasi dan Inovasi Jendela Kita



5. Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bertempat di Golden Ballroom Hotel Sultan & Residence Jakarta, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin 12 Desember 2022.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia ke-74 Tahun 2022 dengan tema "Pemajuan Hak

Asasi Manusia Untuk setiap Orang". Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, H. Bahri Suli, yang diserahkan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM dan disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Pemda Luwu Timur, Makassar (27/09/2021).

6. Penghargaan Atas Partisipasi Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu PAUD

Bunda PAUD Kabupaten Luwu Timur, Hj. Sufriaty Budiman menerima penghargaan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan atas Partisipasinya dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Mutu PAUD, Rabu (16/11/2022).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Forum PAUD Provinsi Sulsel, Prof. Dr.



Arismunandar, M.Pd. pada hari kedua kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Sulawesi Selatan, di Hotel Claro Makassar, yang dihadiri pengurus PAUD Sulsel dan kabupaten/kota

7. Penghargaan Atas Kiprah Nyata Dalam Inovasi Gerakan Sebagai Pelopor Perubahan di Luwu Timur Pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua TP PKK Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Hj. Sufriaty Budiman didampingi Ketua Bidang Empat TP PKK Lutim, Hj. Masrah Bahri Suli serta para pengurus TP PKK Lutim menerima penghargaan atas Kiprah nyata dalam inovasi gerakan sebagai pelopor perubahan di Luwu timur pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ke-50 dengan tema "50 Tahun Gerakan PKK Berbakti untuk Bangsa, Berbakti pada Sesama" di Ballroom Hotel Claro, Makassar, Rabu (24/08/2022).



8. Penghargaan Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)



Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur, berhasil meraih dua penghargaan pada lomba memperingati hari kesatuan gerak PKK ke 50 tahun tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yakni juara dua lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) kategori inovasi produk unggulan lokal dan juara dua halaman bernilai ekonomi pada malam ramah tamah peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-50 Tahun dengan tema "Berbakti untuk Bangsa, Berbagi untuk Sesama" di Ballroom Hotel Claro, Rabu (24/08/2022).

9. Penghargaan ADWI 2022 Kategori Kelembagaan

Penghargaan ADWI 2022 tersebut diserahkan oleh Sekretaris Utama Kemenparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani kepada Amsal, Pengelola Desa Wisata (PDW), dengan disaksikan Bupati Luwu Timur, H. Budiman, Kadis Parmudora, Andi Tabacina Achmad.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Mendagri,



Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

10. Penghargaan Kepala Daerah Inspiratif Bidang Realisasi Program Inspiratif



Pada peringatan HUT yang ke-3, Teraskata.com di Gedung Saodenrae Convention Center (SCC) Kota Palopo, Sabtu (23/07/2022).

Bupati Luwu Timur, Drs. H. Budiman, M.Pd menerima piagam penghargaan dari Teraskata.com sebagai Kepala Daerah Inspiratif Bidang Realisasi program inspiratif yang diterima Kabag Prokopim Luwu Timur, Rupidin.

11. Penghargaan Dari Kapolda Sulawesi Selatan



Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen. Pol. Drs. Nana Sudjana, AS,M.M menyerahkan Piagam Penghargaan Kepada Bupati Luwu Timur, H. Budiman di syukuran perayaan hari jadi Bhayangkara ke 76 Tahun yang bertempat di Aula Mappaodang Mapolda Sulawesi Selatan, Selasa (05/07/2022) yang diperingati serentak di seluruh Indonesia.

12. Dekranasda Kabupaten Luwu Timur Raih Penghargaan Pada Pameran SulSel Craft 2022



Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) sukses meraih lima penghargaan pada pameran Sulsel Craft 2022 bertempat di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Rabu (08/06/2022). Kelima penghargaan yang berhasil diraih oleh Dekranasda Lutim diantaranya; The Best Gerabah dan Keramik, The Booth Kategori Inspiratif, The Booth Kategori Artistik, Video Nomintaor Dua, dan Kategori Serat Alam Nominator 1 Anyaman Teduhu. Kepala Disdagkoprinum Kabupaten Luwu Timur, Senfry Octavianus mewakili Ketua

Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Luwu Timur (Dekranasda Lutim) menerima kelima piala tersebut.

13. Komitmen Memajukan Dunia Pendidikan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Raih Empat Penghargaan dari BPMP Sulawesi Selatan

Kabupaten Luwu Timur berhasil meraih 4 penghargaan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Selatan pada Malam Anugerah Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang dihelat pada 21 Desember 2022 lalu di Hotel Claro Makassar. Hadir mewakili Pemerintah Daerah Lutim dalam penerimaan penghargaan tersebut ; Baharuddin (Kordinator Pengawas), Darmawan (Kabid Pembinaan SMP), Ayusnita Wahab (Guru Penggerak SDN 223 Balantang) & Batman



(Kepsek SDN 223 Balantang-Sekolah Penggerak). Keempat penghargaan tersebut adalah 1). Dukungan Pemerintah Daerah dan Komitmen dalam Melaksanakan Tata Kelola Satuan Pendidikan, 2). Komitmen Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP) dengan Level Melebaga, 3). Keberhasilan membina Sekolah dalam memanfaatkan Platform Rapor Pendidikan, dan 4). Komitmen Pemerintah daerah dalam mendukung Kebijakan Merdeka Belajar.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877),
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816),
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323),
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah



provinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selain itu dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah terhadap daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah se-Indonesia.

Dalam pasal 20 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penugasan oleh Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (1) Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, ayat (2) Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan peraturan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya.

Pelaporan Tugas Pembantuan meliputi program/kegiatan kementerian atau lembaga yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 2 kepentingan daerah untuk memberikan pelaporan kepada Pemerintah disamping sebagai bagian strategis dari dokumentasi capaian kegiatan yang memang menjadi potret ketercapaian program/kegiatan tersebut pada daerah yang secara simultan dihajatkan berkontribusi pada masyarakat

Tugas pembantuan pada hakekatnya menjadi keikutsertaan daerah maupun desa termasuk pula masyarakat atas pelaksanaan penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang tertentu.

Penyelenggaraan urusan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, telah diatur lebih lanjut pada Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sementara itu, pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu, sedangkan Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Berkenaan dengan uraian diatas, Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan urusan Bersama berkewajiban



mengintegrasikan keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di daerah baik yang dilaksanakan melalui mekanisme APBD maupun melalui mekanisme APBN, sehingga keseluruhan program dan kegiatan harus dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya dengan melakukan evaluasi kinerja sebagai analisis penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dalam konteks kinerja pemerintah daerah dan Bupati Luwu Timur sebagai kepala daerah otonom yang mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah, berkewajiban melaporkan penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan setiap tahun anggaran berakhir.

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Luwu Timur selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagai berikut:

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Luwu Timur, antara lain:

1) Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kabupaten Luwu Timur pada Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi selain didanai dari APBD, juga mendapatkan dana APBN melalui dana tugas pembantuan. Pada tahun 2022, Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi dana dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

a) Target Kinerja

Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, antara lain;

- Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi Target 100%

b) Realisasi

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan Pusat dari Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, kabupaten luwu timur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan hukum atas pelaksanaan tugas pembantuan yang telah ditetapkan dan mengacu pada program, kegiatan serta rincian kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi
oleh Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur 2022

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 067.07.4.350289/202 2 Tgl 17 Nov 2021	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,Perdesaan Dan Transmigrasi		Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	2,174,421,000	2,152,484,500	98,99				
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	SKPC Koromal ai, Desa Mahalon a, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	91,700,000	91,680,000	99,98	1 Lembaga	1 Lembaga yang difasilitasi di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	100	
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	SKPC Koromal ai, Desa Mahalon a, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	76,600,000	70,225,000	91,68	25 Orang	25 Orang yang difasilitasi memperoleh Layanan Sosial Budaya di Satuan Permukiman/P usat SKP di Kawasan Transmigrasi	100	
			Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	SKPC Koromal ai, Desa Mahalon a, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	187,290,000	181,784,400	97,06	92 KK	92 KK difasilitasi Perpindahan dan Penempatan Warga Transmigrasi	100	
			Bantuan Keluarga	SKPC Koromal ai, Desa Mahalon a, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	242,700,000	239,620,400	98,73	115 Orang	115 Orang Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan	100	

LPPD TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR



			Bantuan Peralatan / Sarana	SKPC Koromalai, Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	460,179,000	455,678,000	99,02	1 Unit	1 Unit Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	100	
			Sarana Pengembangan Kawasan	Desa Buangin dan Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	439,474,000	438,761,000	99,84	2 Unit	2 Unit Fasilitas Umum yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	100	
			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	SKPC Koromalai, Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	676,478,000	674,735,700	99,74	50 meter	50 meter Panjang jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	100	
			Program Dukungan Manajemen		Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur	108,851,000	108,345,000	99,54				
			Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kab. Luwu Timur	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian	108,851,000	108,345,000	99,54	1 Layanan	1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	



2) Kementerian Pertanian

a. Target Kinerja

Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Pertanian, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan, Meliputi;

- Program Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas Target 100% Dengan kegiatan, embun pertanian, irigasi perpompaan besar wilayah tengah, jaringan irigasi tersier, e-RDKK, Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi.
- Program Dukungan Manajemen target 100%
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri target 100%

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan Pusat dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal (Dirjen) Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan oleh Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten luwu timur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan hukum atas pelaksanaan tugas pembantuan yang telah di tetapkan dan mengacu pada program, kegiatan serta rincian kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut dalam bentuk tabel:



Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Pertanian
Oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian	Surat pengesahan DIPA- NOMOR : SP DIPA- 018.05.4.199572/202 2 Tanggal 17 November 2022.	Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	2.550.035.000	2.510.326.315	98.44				
			Embun Pertanian	Kec. Tom- Tim, Kalaena,	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	240.000.000	240.000.000	100	2 Unit	2 Unit	100	
			Irigasi perpompaan besar wilayah tengah	Angkon a	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	140.000.000	140.000.000	100	1 unit	1 unit	100	
			Jaringan irigasi tersier	Burau, TomTim , Tomoni, Mangku tana, kalaena, Angkon a, Wasupo nda	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	1.425.000.000	1.425.000.000	100	19 unit	19 unit	100	
			Rekomendasi perlindungan LP2B dan pengendalian alij fungsi	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.	500.000.000	469.621.315	93.92	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	

LPPD TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR



			lahan pertanian		Luwu Timur							
			Bimtek, Monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	10.000.000	5.980.000	59.80	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
			e-RDKK mendukung pendataan penerima pupuk bersubsidi	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	130.675.000	126.175.000	96.56	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
			Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	104.360.000	103.550.000	99.22	1 Layanan	1 Layanan	100	
	Kementerian Pertanian Ditjen Perkebunan	Surat pengesahan DIPA- NOMOR : SP DIPA-018.05.4.199572/2022 Tanggal 17 November 2022.	Program Dukungan manajemen		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	89.600.000	81.107.400	90.52				
			Layanan Umum	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	89.600.000	81.107.400	90.52	1 Layanan	1 Layanan	100	
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	3.652.207.000	3.628.782.000	99.36				
			Sarana Pengembangan Kawasan	Burau, Malili, Mangkutan, Wasuponda, Wotu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	3.628.782.000	3.628.782.000	100	250 Ha	250 Ha	100	

LPPD TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR



			Program Dukungan Manajemen		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	424.168.000	401.573.285	94.67				
			Layanan manajemen Satker daerah	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	424.168.000	401.573.285	94.67	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Kementerian Pertanian Ditjen Tanaman Pangan	Surat pengesahan DIPA-Nomor : SP-DIPA-018.03.4.199125/2022 Tanggal 02 Maret 2022	Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	229.000.000	218.550.000	95.44				
			Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	229.000.000	218.550.000	95.44	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
			Program Dukungan Manajemen		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	9.500.000	9.500.000	100				
			Layanan perencanaan satker daerah	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	9.500.000	9.500.000	100	1 Layanan	1 Layanan	100	
			Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	313.120.000	313.120.000	100				
			Koordinasi, bimtek, monev dan pelaporan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	313.120.000	313.120.000	100			100	

LPPD TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR



			Com Sheller Mobile	Mangkutana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	46.000.000	46.000.000	100	1 unit	1 unit	100	
			Com Sheller Mobile	Nuha dan Wasuponda	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	54.600.000	54.600.000	100	2 unit	2 unit	100	
			Power Threster	Malili, Wasuponda	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	126.000.000	126.000.000	100	6 unit	6 unit	100	
			Power Threster multiguna	Towuti	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	86.520.000	86.520.000	100	3 unit	3 unit	100	



3.3.2 Tugas Pembantuan/ Penugasan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur untuk anggaran tahun 2022, memperoleh bantuan anggaran Tugas Pembantuan/ Penugasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni;

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

a. Target Kinerja

Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , antara lain;

- Program Penyelenggara Jalan, target 100%, meliputi kegiatan, antara lain:
 - Kegiatan Pembangunan Jalanan
 - Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloa - Tole)

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan Pusat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan hukum atas pelaksanaan tugas pembantuan yang telah di tetapkan dan mengacu pada program, kegiatan serta rincian kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut dalam bentuk tabel;



Tabel 3.3

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Wajib Mendasar Bidang Pekerjaan Umum
Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pekerjaan Umum	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 889/IV/Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	Program Penyelenggaraan Jalan	Luwu Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur	9.157.432.040	9.157.432.040	100				
			Kegiatan Pembangunan Jalan	Luwu Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur	9.157.432.040	9.157.432.040	100				
			Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloe - Tole)	Luwu Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur	9.157.432.040	9.157.432.040	100	1 Kegiatan Pembangunan Jalan	1 Kegiatan Pembangunan Jalan	100	



4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

a. Target Kinerja

Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain;

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, target 100%, meliputi kegiatan, antara lain:
 - Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah
 - Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga,
 - Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga,
 - Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk,
 - Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran,
 - Dan belanja sewa makan, minum rapat, dan alat ukur lainnya.

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan Pusat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan hukum atas pelaksanaan tugas pembantuan yang telah ditetapkan dan mengacu pada program, kegiatan serta rincian kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut dalam bentuk tabel;



Tabel 3.4

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Wajib Tidak Mendasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Oleh Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 889/IV/Tahun 2022, Tanggal 6 April 2022 Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	175,000,000.0 0	174,746,600.0 0	99.9				
		Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 444.1/4462/DPMD, Tanggal 10 Mei 2022 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penanganan dan Gizi Buruk yang	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yan bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabuapten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	175,000,000.00	174,746,600.00	99.9				



**LPPD TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR**

		Bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022										
			Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	175,000,000.00	174,746,600.00	99.9				
			Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
			- Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
			<i>Makan</i>	<i>Luwu Timur</i>	<i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>	<i>20,350,000.00</i>	<i>20,350,000.00</i>	<i>100</i>	<i>814 kotak</i>	<i>814 kotak</i>	<i>100</i>	
			<i>Snack</i>	<i>Luwu Timur</i>	<i>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>	<i>16,280,000.00</i>	<i>16,280,000.00</i>	<i>100</i>	<i>1628 kotak</i>	<i>1628 kotak</i>	<i>100</i>	



LPPD TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR

					Masyarakat dan Desa							
			- Belanja Persediaan untuk di jual/di serahkan ke masyarakat	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98,180,000.00	98,180,000.00	100				
			Pemberian Makanan Tambahan	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98,180,000.00	98,180,000.00	100				
			Balita	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86,000,000.00	86,000,000.00	100				
			- Susu Bubuk 400 Gram	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65,360,000.00	65,360,000.00	100	688 dos	688 dos	100	
			- Vitamin Becafort	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20,640,000.00	20,640,000.00	100	688 botol	688 botol	100	
			Bumil	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12,180,000.00	12,180,000.00	100				
			- Susu Bumil	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,990,000.00	3,990,000.00	100	42 dos	42 dos	100	



**LPPD TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR**

			- Vitamin	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,190,000.00	8,190,000.00	100	42 botol	42 botol	100	
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21,000,000.00	21,000,000.00	100				
			Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21,000,000.00	21,000,000.00	100				
			Spanduk	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11,400,000.00	11,400,000.00	100	228 meter	228 meter	100	
			Baliho	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,600,000.00	9,600,000.00	100	192 meter	192 meter	100	
			Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19,190,000.00	18,936,600.00	98,67				
			Alat ukur status gizi buruk	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19,190,000.00	18,936,600.00	98,67	1 paket	1 paket	100	

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Setelah Diolah Tahun 2022



3.3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan Kendala yang terjadi selama pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur antara lain:

Tabel 3.5
Uraian Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan
Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,Perdesaan Dan Transmigrasi				Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga yang difasilitasi di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
2	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25 Orang yang difasilitasi memperoleh Layanan Sosial Budaya di Satuan Permukiman/Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
3	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	92 KK difasilitasi Perpindahan dan Penempatan Warga Transmigrasi	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
4	Bantuan Keluarga	115 Orang Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan (Jadup untuk 92 KK penempatan tahun 2022 dan 23 KK tahun 2021)	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
5	Bantuan Peralatan / Sarana	1 Unit Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Bantuan Sarana ProduksiPertanian dan Bibit ternak sapi sebanyak 26 ekor untuk 2 Kelompok)	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
6	Sarana Pengembangan Kawasan	2 Unit Fasilitas Umum yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	50 meter Panjang jembatan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
II	Program Dukungan Manajemen				Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
III	Program Ketersediaan, Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
1	Embung Pertanian	2 Unit	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
2	Irigasi Perpompaaan Besar Wilayah Tengah	1 unit	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
3	Jaringan Irigasi Tersier	19 unit	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
4	Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Pertanian	1 Rekomendasi	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
5	Bimtek, monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian	1 Kegiatan	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
6	e-RDKK mendukung pendataan penerima pupuk bersubsidi	1 Dokumen	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
7	Layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi	1 Layanan	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
IV	Program Dukungan Manajemen				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
1	Layanan Umum	1 Layanan	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
V	Program Nilai Tambah dan				Dinas Pertanian dan Ketahanan



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daya Saing Industri				Pangan Kab. Luwu Timur
1	Sarana Pengembangan Kawasan	250 Ha	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
VI	Program Dukungan Manajemen				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
1	Layanan manajemen satker daerah	1 Dokumen	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
VII	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
1	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	1 Kegiatan	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
VIII	Program Dukungan Manajemen				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
1	Layanan Perencanaan Satker Daerah	1 Layanan	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
IX	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
1	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
	Corn sheller Mobile	1 unit	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
	Corn sheller	2 unit	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
	Power Thresher	6 unit	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
X	Program Penyelenggaraan Jalan				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur
	Kegiatan Pembangunan Jalan				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloo - Tole)	1 Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Baru - Mahalona (Ruas Pekaloo - Tole)	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur
XI	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk	Terlaksananya Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk pada 8 Kecamatan dan 30 desa sesuai SK Bupati Luwu Timur Nomor 209/F-02/VI/Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting terintegrasi tahun 2022			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Makan	814 kotak	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Snack	1628 kotak	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Belanja Persediaan untuk di jual/di serahkan ke masyarakat				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemberian Makanan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tambahan				Desa
	Balita	688 dos	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Susu Bubuk 400 Gram	688 botol	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Vitamin Becafort				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Bumil				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Susu Bumil	42 dos	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Vitamin	42 botol	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Spanduk	228 meter	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Baliho	192 meter	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Alat ukur status gizi buruk	1 paket	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga secara minimal berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Capaian Penerapan standar pelayanan Minimal Kabupaten Luwu timur adalah sebagai berikut:

4.1. Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur,

4.1.1. Jenis pelayanan dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan pendidikan adalah sebagai berikut

- 1) Pendidikan Dasar
- 2) Pendidikan Kesetaraan
- 3) Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Target capaian penerapan SPM urusan pendidikan tahun 2022 :

- 1) Pendidikan Dasar target capaian SPM 100 % Setiap Tahun
- 2) Pendidikan Kesetaraan target capaian SPM 100 % Setiap Tahun
- 3) Pendidikan Anak Usia Dini target capaian SPM 100 % Setiap Tahun

4.1.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Pendidikan bersumber dari APBD dan APBN tahun 2022 sebesar Rp.158.869.619.491 dengan besaran Realisasi Anggaran sebanyak Rp.168.279.252.579 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja	Anggaran		(%)
		Indikator Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	6	7	8
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Rp.146.883.128.251	Rp.154.775.143.879	105,37%
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	50547 Siswa		



		Jumlah Anak usia 7-15 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	54391 Anak		
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Rp.774.208.600	Rp.2.771.398.600	357,97%
		Jumlah Anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar dalam pendidikan kesetaraan	4553 Warga Belajar		
		Jumlah Anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	68433 Anak		
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Rp.11.212.282.640	Rp.10.732.710.100	95,72%
		Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	6606 Siswa		
		Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	11.667 Anak		
TOTAL			Rp.158.869.619.491	Rp.168.279.252.579	105,92%

4.1.4. Dukungan Personil

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana Pendidikan yang ada. Jumlah personil pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Dukungan Personil Urusan Pendidikan

No	Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1	Pejabat Struktural	15	
2	Staf / Tenaga Administrasi	51	
3	Fungsional	20	2 Pamong Budaya 18 engawas



4.1.5. Hasil Capaian

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan pendidikan tahun 2022 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Realisasi target SPM urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			
		Indikator Capaian	Target (%)	Batas Waktu	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)	100	Setiap Tahun	34855 (SD)
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)			15692 (SMP)
		Jumlah anak usia 7-15 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan			54391
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun	68344
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar dalam pendidikan kesetaraan			PAKET A = 919 PAKET B = 1288 PAKET C = 2346 TOTAL = 4553
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan			4553
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	6606
		Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD			6606
		Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan			11667

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal,
- Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD,



- c. Masih minimnya kesadaran serta pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini dimana pada usia tersebut adalah usia pertumbuhan anak atau yang disebut Golden ages,
- d. Penempatan tenaga pendidik belum dilakukan secara merata,
- e. Masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas walaupun secara rasio berdasarkan jumlah keseluruhan, jumlah guru dan siswa masih cukup baik dengan Rasio Guru dan Murid SD/MI sebesar 1 : 25 dan SMP/MTs sebesar 1 : 20 dan;
- f. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang belum memadai,
- g. Masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan belum bersertifikat (sertifikasi guru) serta;
- h. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menganalisis dan mengolah data pada satuan Pendidikan

2) Solusi

- a. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai Standar pelayanan minimal pada jenjang TK/ PAUD, SD, dan SMP dengan mengalokasikan/menambah anggaran dibidang Pendidikan,
- b. Pemenuhan perlengkapan dasar PAUD perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram,
- c. Perlunya pendataan tenaga pendidik dan kependidikan sehingga dapat diperoleh data yang akurat untuk pemeratan guru pada satuan pendidikan,
- d. Pemberian upah guru yang masih berstatus honorer untuk semua jenjang,
- e. Memberikan pelatihan kepada guru melalui kegiatan KKG, MGMP dan Pelatihan Tutor untuk jenjang kesetaraan,
- f. Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik jenjang TK, SD dan SMP melalui dana BOP dan BOS,
- g. Bantuan seragam sekolah untuk peserta didik baru pada jenjang SD dan SMP,
- h. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Kesetaraan.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Bidang urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

4.2.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4) Pelayanan kesehatan balita



- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif,
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

4.2.2. Target Capaian SPM

Target capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan tahun 2022 :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 4) Pelayanan kesehatan balita, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun.

4.2.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Kesehatan bersumber dari APBD tahun 2022 sebesar Rp 8.370.347.069,- dan realisasi sebesar Rp 7.913.887.270,- (94,55%) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan 2022

No.	Jenis pelayanan dasar	Alokasi biaya		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp.850.942.425	Rp.797.269.805	93,69
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp.3.506.803.225	Rp.3.325.093.225	93,52
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp.197.254.325	Rp.186.917.825	87,14
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp.1.199.807.350	Rp.1.162.557.900	98,56
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp.830.520.060	Rp.747.830.750	90,04
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Rp.645.288.502	Rp.624.609.550	96,80
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Rp.427.246.930	Rp.413.106.405	96,69
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp.86.034.000	Rp.84.449.000	98,16
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus	Rp.71.851.302	Rp.70.865.000	98,63
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp.133.022.150	Rp.124.416.150	93,53
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	260.601.000	Rp.227.133.280	87,16
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Teninfeksi HIV	160.975.800	Rp.149.638.380	92,96
Total		Rp.8.370.347.069	Rp.7.913.887.270	94,55

4.2.4. Dukungan Personil

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Dinas Kesehatan sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Dinas Kesehatan dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan yang tetap dilingkup Dinas Kesehatan pada tahun 2022 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 4.5
Dukungan Personil Urusan Kesehatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

NO	PERSONIL DINAS KESEHATAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
	Pejabat Struktural	9	
	Staf/Tenaga Administrasi	30	



	Fungsional	807	
	TOTAL	846	

4.2.5. Hasil Capaian

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan Kesehatan tahun 2022 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Realisasi target capaian SPM
Urusan Bidang Kesehatan

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Sasaran dalam Tahun	Target (%)	Jumlah yang terlayani	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	5621	100	5217	92,81
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	5255	100	5250	99,90
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	5251	100	5157	98,21
4.	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	29.570	100	27602	93,34
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	17.930	100	17.167	95,74
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	195.641	100	131.368	67,15
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	19.094	100	15.331	80,29
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	57.319	100	37580	65,56



	sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun				
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus				
	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	5031	100	5031	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	699	100	454	64,95
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB				
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	409	100	409	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV				
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	5014	100	5014	100

4.2.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

1) Kendala dan Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- Masih adanya persalinan yang di tolong oleh Tenaga Kesehatan di rumah sebanyak 18 orang dan ditolong non Tenaga Kesehatan sebanyak 2 orang pada tahun 2022,
- Belum lagi jumlah bayi baru lahir yg memang kurang dibanding jumlah proyeksi sasaran dan tidak mencapai target karena ada kematian bayi baru lahir sebelum mencapai usia 28 hari.
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang belum terlaksana secara optimal karena kegiatan pembelajaran tatap muka belum terlaksana secara menyeluruh dan juga karena masih adanya sekolah yang melaksanakan pembelajaran secara online,
- Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas selama masa pandemi terkhusus pengadaan dokter spesialis jiwa dan perawat jiwa di Puskesmas dan Rumah Sakit.
- Perhitungan jumlah kebutuhan yang belum terlaksana secara maksimal, seperti penyediaan mutu pada strip gula dan kolesterol untuk kegiatan Usia Lanjut yang belum mencukupi dan yang dipakai hanya strip dari kegiatan posbindu dan desa, sehingga bahan tersebut belum dapat memenuhi jumlah kebutuhan warga negara.



- f. Perlunya Peningkatan standar pelayanan Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat meningkatkan mutu secara berkesinambungan,
- g. Belum terpenuhinya kebutuhan ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur serta;
- h. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan rujukan karena minimnya ketersediaan pelayanan kesehatan Rujukan

2) Solusi

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif,
- b. Peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya kesehatan Perorangan (UKP) di Fasyankes dengan melakukan akreditasi Puskesmas,
- c. Peningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin,
- d. Peningkatkan upaya-upaya penurunan kematian ibu & bayi serta penurunan stunting melalui peningkatan kualitas KIA,
- e. Peningkatkan pembangunan Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu Persalinan 24 jam serta meningkatkan Polindes menjadi Poskesdes,
- f. Peningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu,
- g. Peningkatkan Pelayanan Laboratorium Kesehatan,
- h. Peningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintas program diantaranya revitalisasi peran dan fungsi UKBM (Posyandu, Posbindu) sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat,
- i. Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga aktif dan desa sehat,
- j. Peningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisasi profesi, LSM serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan,
- k. Peningkatkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan melalui prinsip-prinsip Asuransi,
- l. Peningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan,
- m. Peningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak,



- n. Peningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat, Peningkatkan Deteksi dini faktor resiko dan Peningkatkan Penanganan Kasus,
- o. Peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan PPK-BLUD,
- p. Peningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan
- q. Peningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDG'S".

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Bidang urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Bidang urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut

Target capaian SPM.

- 1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

4.3.2. Target Capaian SPM

Target capaian penerapan standar pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum tahun 2022 :

- 1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik, target capaian SPM 100% Setiap Tahun.

4.3.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum bersumber dari APBD tahun 2022 sebesar Rp 29.800.962.850,00 dan realisasi sebesar Rp 29.020.399.005,82,- (97,38%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	4	5	6
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.904.776.988,00	13.614.302.786,32	97,91



hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	13.904.776.988,00	13.614.302.786,32	97,91
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.795.663.637,00	1.756.325.783,90	97,81
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	615.250.000,00	587.278.853,00	95,45
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.699.905.421,00	10.538.388.649,42	98,49
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	75.957.930,00	44.034.500,00	57,97
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	718.000.000,00	688.275.000,00	95,86
JUMLAH				
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15.896.185.862,00	15.406.096.219,50	96,92
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.896.185.862,00	15.406.096.219,50	96,92
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	230.000.000,00	133.407.287,00	58
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	14.862.958.362,00	14.552.531.932,50	97,91
	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	20.000.000,00	0	0
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	102.535.000,00	95.745.000,00	93,38



	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	640.000.000,00	624.412.000,00	97,56
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	40.692.500,00	0	0
JUMLAH				

4.3.4. Dukungan Personil

Jumlah aparat yang membidangi urusan pekerjaan umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 sebanyak 12 orang. Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.8
Dukungan Personil Urusan Pekerjaan umum
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PERSONIL URUSAN PEKERJAAN UMUM	JUMLAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Struktural :		
	Kepala Dinas	1	
	Kepala Bidang	1	
	Kepala Seksi	0	
2	Staf/Tenaga Administrasi		
	Staf PNS	2	
	Staf Upah Jasa/ Honorer	5	
3	Fungsional :	3	

4.3.5. Hasil Capaian

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum tahun 2022 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis pelayanan dasar (Indikator Capaian SPM)	Uraian kinerja		
		Jumlah Penduduk	Jumlah yang dilayani	Realisasi (%)
1	2	3	5	6
1.	Penyediaan kebutuhan pokok Air minum	1500 KK	1398 KK	93,2
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari).			
2	Penyediaan pengelolaan air limbah domestik	1922 KK	1922 KK	100
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)			

4.3.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

1) Kendala

- Dukungan Anggaran
- Dukungan Personil



- 2) Permasalahan
 - a. Belum tersedia data rumah terlayani SPAM dan SPALD
 - b. Terdapat sarana SPAM yang mengalami kerusakan akibat bencana
 - c. Terdapat aset bangunan SPAM yang penanganannya merupakan kewenangan BBWS dan BPPW Provinsi Sulawesi Selatan
- 3) Solusi.
 - a. Diperlukan pendataan untuk mengetahui rumah yang terlayani SPAM dan SPALD
 - b. Diperlukan penanganan terhadap sarana SPAM yang mengalami kerusakan akibat bencana,
 - c. Diperlukan dukungan BBWS dan BPPW untuk penanganan aset bangunan SPAM yang penanganannya merupakan kewenangan BBWS dan BPPW Provinsi Sulawesi Selatan.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Bidang urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut ;

- 1) Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

4.4.2. Target Capaian SPM

Target capaian penerapan standar pelayanan minimal urusan Perumahan Rakyat tahun 2022 :

- 1) Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten, target capaian SPM 100% Setiap Tahun,
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah, target capaian SPM 100% Setiap Tahun.

4.4.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat bersumber dari APBD tahun 2022 sebesar Rp 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.10
Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Biaya		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi bencana Kabupaten	250.000.000	0	0



2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	0	0	0
----	---	---	---	---

4.4.4. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Personil Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
	Pejabat Struktural	1	
1	Kepala Dinas	1	Plt. Kepala Dinas
2	Kabid Perumahan	1	
3	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	2	Fungsional
5	Staf Bidang Perumahan	1	Upah Jasa

4.4.5. Hasil Capaian

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan Perumahan Rakyat tahun 2022 berdasarkan target telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Realisasi Target SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			
		Indikator Capaian	Jumlah Target	Jumlah yang dilayani	Realisasi (%)
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1	0	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1	0	100

4.4.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Kendala

- Kurangnya alokasi anggaran untuk pendataan, sehingga identifikasi yang dilakukan masih bersifat makro.
- Belum tersedia basis data
- Tidak ada penetapan status bencana.



- b. Permasalahan
 - Pengumpulan data, perhitungan kebutuhan dan perencanaan korban bencana baru dilakukan setelah adanya penetapan bencana
 - Data yang tersedia tidak berkorelasi langsung dengan kebutuhan inputansi data SPM bidang perumahan.
 - Anggaran telah disiapkan, tapi tidak terealisasi karena tidak ada penetapan status bencana.
- c. Solusinya,
 - Perlu dilakukan identifikasi lokasi bencana lebih detail terhadap lokasi lokasi rawan bencana yang telah ditetapkan.
 - Perlu dilakukan pembuatan baseline lokasi rawan bencana.

4.5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur.

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Capaian SPM

Target capaian penerapan standar pelayanan minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 yakni:

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, target capaian SPM 100% Setiap Tahun



- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, target capaian SPM 100% Setiap Tahun.

4.5.3. Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bersumber dari APBD tahun 2022 sebesar Rp.12.669.201.426,00,- dan realisasi sebesar 12.279.303.318,00- (96,92%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.13
Alokasi Anggaran
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Biaya		
		Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 6.513.944.053	Rp.6.444.223.404	98,93
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Rp.72.518.925	Rp.71.572.000	98,69%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp.551.756.820	Rp.441.140.000	79,95%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp.908.272.910	Rp.762.531.527	83,95%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Rp.4.622.708.718	Rp.4.559.836.387	98,64%

4.5.4. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam penerapan SPM Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Dukungan Personil Penerapan SPM
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	PERSONIL SATPOL, DAMKAR & BPBD	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Pejabat Struktural		



	- Eselon II	3 Orang	
	- Eselon III	11 Orang	
	- Eselon IV	18 Orang	
2	Staf (Jabatan Pelaksana)	17 Orang	
3	Fungsional	16 Orang	
4	Tenaga Upah jasa	365 ang	

4.5.5. Hasil Capaian

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Realisasi Target capaian SPM
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar (Indikator Standar Pelayanan Minimal)	Jumlah Orang yang berhak dilayani	Jumlah Orang yang dilayani	Realisasi (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1	1	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	302.039	278.347	92,16%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	302.039	302.039	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	607	607	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	76	76	100%

Catatan:

- 1) Untuk pelayanan dasar dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara dalam renstra ditarget sebanyak 5 orang hal ini berdasarkan target jumlah kasus penegakan perda yang akan dilaksanakan. Namun pada Tahun 2022 dalam pelaksanaan penegakan perda tidak ada warga Negara yang terkena dampak akibat dari penegakan perda dan perkara sehingga tidak ada warga Negara yang memperoleh layanan terkena



dampak akibat dari penegakan perda dan perkara tersebut, bila di hitung capaian maka akan sama dengan 0 (nol) sehingga untuk mencapai capaian 100 % maka target dan realisasi diberi angka 1(satu) sehingga capaian 100%.

- 2) Untuk Capaian dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan berasal dari pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 262 org, PUSDALOPS BPBD 6.002 org, Papan himbauan informasi bencana di 9 kecamatan 234.687 org dan Rambu evakuasi di 8 desa di Kec. Malili 26.578 org, Workshop Mitigasi Bencana sebanyak 124 org dan pelaksanaan mitigasi bencana Desa Nuha dan Matano (2.525 org), dan melaksanakan mitigasi bencana (sosialisasi) di 17 desa di kec. Towuti (41.135 org) dengan akumulasi secara keseluruhan sebesar 278.347 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 2 kecamatan yang belum memiliki papan himbauan karena kondisi papan himbauan yang sebelumnya rusak berat,
- 3) Capaian dari Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berasal dari pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (Pelatihan TRC) sebanyak 40 org, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi sebanyak 90 org, Sekolah Lapang Gempa Bumi sebanyak 50 org dan BMKG Goes To School sebanyak 300 org, pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 262 org. Selain itu terdapat penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa bumi yang disebabkan oleh sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 302.039 jiwa memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.
- 4) Capaian dari Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui perhitungan jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2022 sebanyak 607 jiwa (313 laki-laki dan 294 perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi,

4.5.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Kendala

- 1) Meskipun capaian layanan dasar SPM Trantibum terealisasi 100% namun kendala yang dihadapi ada dalam pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM trantibum. Pemenuhan Mutu layanan ini belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan anggaran untuk memenuhinya. Selain



anggaran dukungan personil yang memiliki SDM yang berkualitas juga masih kurang,

- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana,
- 3) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada,
- 4) Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis,
- 5) Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas yang baru mandiri pada tahun 2022, dimana sebelumnya merupakan salah satu bidang pada Dinas Satpol PP dan Damkar. Untuk itu kondisi Dinas Damkar dan Penyelamatan masih sangat terbatas, baik itu sarana prasarana, sumber daya manusia, dan jumlah anggaran

b. Permasalahan

- 1) Untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat maka Satpol PP Kabupaten Luwu Timur menempatkan personil di Kecamatan. Namun pelayanan ini tidak dapat maksimal dilakukan mengingat personil Satpol PP di Kecamatan dipimpin oleh 1 (satu) orang PNS pelaksana Satpol PP selain itu, SDM Aparatur Satpol PP di Kecamatan masih terbatas bahkan sarana dan prasarana dikecamatan belum memadai,
- 2) Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana,
- 3) Terdapat Papan Himbauan Informasi Bencana di 2 Kecamatan dalam kondisi rusak berat dan data base terkait jumlah warga negara yang berada di daerah rawan bencana masih skala desa,
- 4) kondisi Dinas Damkar dan Penyelamatan yang masih sangat terbatas, dapat mempengaruhi kinerja dari Dinas Damkar yang tugas pokok dan fungsi adalah urusan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Kebutuhan Dinas Damkar saat ini yang sangat diperlukan adalah mobil pemadam kebakaran yang masih sangat kurang, mobil suplay (tangki) serta alat pelindung diri (APD) untuk personal. Jumlah mobil pemadam kebakaran saat ini adalah 10 unit, dengan jumlah beberapa unit yang sudah sangat tua, sehingga pembentukan/pembukaan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tidak dapat direalisasikan untuk ditambahkan. Dampaknya adalah waktu tanggap/respon time akan jauh dari target karena pelayanan yang sangat jauh dan luas. Disamping itu kondisi yang tidak kalah memprihatinkan adalah alat pelindung diri (APD) yang sangat minim, dimana pelayanan petugas Damkar akan lebih maksimal bilamana memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai.

c. Solusi

Dari Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan



Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur di atas maka berikut beberapa alternatif pemecahan masalah :

1. Melakukan Koordinasi dengan TPAPD kab. Luwu Timur dan mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM Trantibum;
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya Satpol PP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
3. Membentuk UPTD Satpol PP kecamatan,
4. Memenuhi Sarana dan Prasarana secara bertahap
5. Memaksimalkan penyebaran informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Himbauan Peringatan Dini dan Media Sosial,
6. Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebaran informasi rawan bencana,
7. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
8. Melakukan pengumpulan data base ditingkat dusun
9. Memaksimalkan pendampingan desa terkait pelaksanaan Mitigasi Bencana di tingkat desa melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dan Dana Desa,
10. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan,
11. Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya,
12. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG,
13. Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan,
14. Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana,
15. Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur,
16. Diperlukan pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki, minimal 1 unit mobil Damkar untuk 1 Kecamatan, yang sampai saat ini masih ada 2 Kecamatan dari 11 Kecamatan di Kab. Luwu Timur yang belum memiliki WMK/ posko Damkar dan Penyelamatan yaitu Kec. Nuha dan Kec. Mangkutana, Juga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas, dan peningkatan sumber daya aparaturnya pemadam kebakaran, dimana sangat disadari bahwa untuk mencukupi semua itu tentunya diperlukan anggaran yang besar.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Bidang urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti



- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten

4.6.2. Target Capaian SPM

Target capaian penerapan SPM urusan sosial tahun 2022:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti target capaian SPM 100% Setiap Tahun,
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten, target capaian SPM 100% Setiap Tahun

4.6.3. Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Sosial bersumber dari APBD tahun 2022 sebesar Rp.2.748.948.490,00- dan realisasi sebesar Rp.2.721.760.712,00 - (99,01%) dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran
Urusan Sosial Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Biaya		
		Alokasi	Realisasi	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Rp.1.100.477.235	1,096,657,856	99.65 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Rp.56.490.000	Rp.56.105.000	99.32 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Rp.1.100.477.235	Rp.1.096.657.856	99.65 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Rp.194.433.250	Rp.194.348.950	99.96 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	Rp.297.070.770	Rp.277.991.050	93.58

4.6.4. Dukungan Personil

Adapun dukungan personil dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut;



Tabel 4.17
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial

NO	PERSONIL DINAS SOSIAL P3A	JUMLAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Struktural :		
	Kepala Dinas	1	
	Sekretaris Dinas	1	
	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	1	
	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	
	Kepala Bidang Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1	
	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	
	Kasubag Umum dan keuangan	1	
	Kepala UPTD PPA	1	
2	Staf/Tenaga Administrasi		
	PNS	6	
	Non PNS	17	
3	Fungsional :		
	Pekerja Sosial Ahli Muda	2	
	Analisis Kebijakan	3	

5. Realisasi

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan urusan sosial tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.18
Realisasi Target SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran dalam Tahun	Jumlah yg terlayani	Realisasi (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti			
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	42	42	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10	10	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	63	62	98%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			



	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	1	1	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten			
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	200	200	100%

6. Kendala, Permasalahan dan solusi

a. Kendala

- Belum adanya Rumah Singgah
- Belum dibentuknya TRC Ketelantaran

b. Permasalahan

- Belum adanya kegiatan pendataan khusus target penerima layanan SPM
- Minimnya anggaran yang ada untuk mendukung tercapainya target SPM

c. Solusi

- Melaksanakan pendataan PPKS Target SPM;
- Mengusulkan penambahan anggaran pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur, disusun berdasarkan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran tahunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Data yang termuat dalam laporan ini telah direview oleh inspektorat dalam rangka Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan LPPD.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah ini disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2022.

M. Hli 29 Maret 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd



**TIM PENYUSUN LPPD
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno-Hatta, Malili, Luwu Timur, Sulsel

www.luwutimurkab.go.id

Email:sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id